



MEDIA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BUDAYA DAMAI



Prosiding terpilih dari konferensi bertema "*Roles of the Media in Realising the Future We Want For All*" (Peran Media dalam Mewujudkan Masa Depan yang Kita Inginkan untuk Semua Pihak), pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2014. Bali, Indonesia. <http://bali-gmf.com/>

Pendapat yang diungkapkan dalam tulisan yang dikontribusikan disini merupakan pendapat para penulis dan tidak selalu merefleksikan pandangan UNESCO.

Editor:

Guy Berger
Charaf Ahmimed
Mikel Aguirre Idiaquez
Gwen Lister

Daftar Isi

- 4 **PRAKATA**
- 6 **KATA PENGANTAR**
- 8 **PENDAHULUAN**
The Bali Road Map for the Roles of the Media in Realising the Future We Want For All (Pedoman Bali untuk Peran-Peran Media dalam Mewujudkan Masa Depan yang Kita Inginkan untuk Semua Orang) - *Guy Berger, Charaf Ahmimed, dan Mikel Aguirre Idiaquez*
- 24 **BAGIAN I**
Pemberdayaan masyarakat melalui media: Akses terhadap informasi dan partisipasi warga negara
- 27 **BAB 1**
Providing voice to the voiceless (Memberikan suara kepada mereka yang tidak bersuara) - *Naranjargal Khaskuu*
- 32 **BAB 2**
Why the potential of new media hasn't been transformed into democratic reality (Mengapa potensi media baru belum ditransformasikan ke dalam realitas demokratis) - *Toby Mendel*
- 39 **BAB 3**
Access to information: Key to the democratic process (Akses terhadap informasi: Kunci dalam proses demokratis) - *Moez Chakchouk*
- 43 **BAB 4**
Media literacies for empowering females and reducing gender inequalities (Literasi Media untuk pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender) - *Lisa French*

- 49 **BAB 5**
Indonesian women journalists and women empowerment
(Jurnalis perempuan Indonesia dan pemberdayaan perempuan) - *Uni Lubis*
- 55 **BAGIAN II**
Bagaimana Media dapat Memfasilitasikan Pemerintahan yang Baik dan Efektif
- 57 **BAB 1**
For development, ensure safety for journalists (Demi pembangunan, pastikan keamanan bagi para jurnalis) - *Guy Berger*
- 66 **BAB 2**
Investigative journalism shines a light into dark places
(Jurnalisme investigatif menerangi tempat-tempat yang gelap) - *Gwen Lister*
- 74 **BAB 3**
Journalism, technology and good governance (Jurnalisme, teknologi, dan pemerintahan yang baik) - *Maria Ressa*
- 83 **BAB 4**
The culture of impunity in the Philippines (Budaya impunitas di Filipina) - *Prima Jesusa Quinsayas*
- 86 **BAGIAN III**
Bagaimana Media dapat Berkontribusi pada Perdamaian dan Dialog?
- 89 **BAB 1**
Media and information literacy: A crucial element in democratic development (Literasi Media dan Informasi: Elemen krusial dalam pembangunan demokrasi) - *Ulla Carlsson*

95

BAB 2

Media can help promote peace. But should they do so? (Media dapat membantu mempromosikan perdamaian. Tetapi apakah media seharusnya berfungsi demikian?) - Endi Bayuni

101

BAB 3

How media can contribute to peace and dialogue (Bagaimana media dapat berkontribusi untuk perdamaian dan dialog) - Edetaen Ojo

108

BAB 4

The Great Debate: freedom of information and media in the UN's new global development goals (Perdebatan Hebat: kebebasan informasi dan media dalam tujuan-tujuan pembangunan global baru PBB) - Bill Orme

118

BAB 5

Citizen Journalism: Empowering communities (Jurnalisme Warga Negara: Pemberdayaan komunitas) - Harry Surjadi

121

KESIMPULAN

Road Sense: The Bali Road Map for the role of the media in realising the future we want for all (Penilaian yang Masuk Akal: Pedoman Bali untuk peran media dalam mewujudkan masa depan yang kita inginkan untuk semua pihak) - Guy Berger, Charaf Ahmimed and Mikel Aguirre Idiaquez

130

LAMPIRAN

I : Pedoman Bali

136

LAMPIRAN

II : Agenda Forum Media Global (GMF), Bali, Indonesia

PRAKATA

Indonesia dengan populasi lebih dari 240 juta jiwa merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan menikmati salah satu lingkungan media paling bebas di wilayahnya. Meskipun Indonesia masih sering dianggap sebagai negara demokrasi yang muda, dalam beberapa dekade terakhir media yang bebas, majemuk, dan mandiri telah berkembang dan berkontribusi banyak terhadap penguatan lembaga-lembaga demokrasi di dalam negeri. Hal ini telah memungkinkan keterlibatan yang besar dari publik. Indonesia mempunyai lebih banyak warga negara yang mendapatkan informasi dengan baik yang telah dibekali dengan pengetahuan yang lebih baik untuk membuat keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, dan membuat suara-suara mereka didengarkan, untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan untuk memainkan peranan aktif dalam pembangunan negara.

Dengan cara ini, demokrasi dan media yang bebas harus sejalan; keduanya saling mengisi dan berkontribusi pada pembentukan perdamaian dan pemberantasan kemiskinan.

Sekarang ini cerita-cerita tidak hanya dihasilkan dalam rumah produksi berita, tetapi publik juga sering menjadi produser informasi. Hal ini terutama terjadi di Indonesia, yang merupakan tempat tinggal bagi salah satu pengguna media sosial yang berjumlah terbesar di dunia. Negara kepulauan ini sering juga disebut sebagai bangsa twitter dan facebook. Apapun topik yang orang Indonesia sedang bicarakan segera menjadi topik yang *trending* di seluruh dunia.

Peranan media berita dan media sosial penting untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman yang lebih baik akan agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia menyadari hal ini di dalam prioritas pembangunannya.

Oleh karena itu, dalam konteks inilah Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNESCO pada Agustus 2014 mengatur “Forum Media Global: Peran-peran media dalam mewujudkan masa depan yang kita inginkan untuk semua pihak”. Ahli-ahli, akademisi, jurnalis, dan media dari seluruh dunia bertemu di Bali dan berbagi pandangan mereka akan peran-peran yang media dapat mainkan dalam usaha pembangunan sosial dan manusia.

Mengambil kesimpulan dari semua diskusi tersebut, publikasi ini bertujuan untuk menghasilkan momentum lebih lanjut untuk membahas mengenai peranan utama media dalam membentuk masa depan yang kita inginkan untuk semua pihak. Pemerintah Indonesia senang melihat adanya lanjutan dari pembahasan tersebut.

Dr. Freddy H. Tulung

Direktur Jenderal Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Komitmen UNESCO terhadap isu-isu krusial akan bebasnya arus informasi dan akses bebas terhadap sumber-sumber pengetahuan secara mendalam tertanam pada Konstitusinya, yang membuat Organisasi ini berkomitmen untuk “memajukan pengetahuan bersama dan pemahaman bangsa-bangsa, melalui semua alat komunikasi massa dan pada akhirnya merekomendasikan perjanjian-perjanjian internasional yang mungkin perlu untuk mempromosikan arus bebas ide-ide dengan kata-kata dan gambar”.

Sekarang ini, 195 Negara Anggota UNESCO merayakan peringatan pendirian Organisasi ini yang ke 70, dan merayakan relevansinya yang berlanjut.

Sejak pendiriannya, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO telah bekerja secara ekstensif dalam mempromosikan mandat UNESCO di dalam negeri, tidak hanya dalam bidang Komunikasi dan Informasi tetapi juga dalam semua wilayah tematik inti dari organisasi ini, yakni Pendidikan, Budaya, dan Ilmu Pengetahuan.

Salah satu sejarah penting dalam kolaborasi antara Komisi Nasional Indonesia pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan UNESCO adalah pada tahun 2007 adanya forum global bertema Kekuatan Perdamaian untuk mendiskusikan bagaimana memanfaatkan media baru dan tradisional untuk membentuk perdamaian dan mempromosikan dialog. Forum ini meninjau berbagai isu yang luas terkait dengan manajemen konflik dan perdamaian termasuk dialog budaya, dan juga memberikan perhatian yang khusus pada peran media dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam ekspresi diri dan pemahaman bersama.

Forum ini diakhiri dengan suatu deklarasi berjudul “*Spirit of Bali*” (Semangat Bali) yang menghimbau kreasi “mekanisme inovatif untuk mempromosikan perdamaian melalui media dan TIK menjadi inklusif, partisipatif, dan kolaboratif melibatkan pemuda, untuk melibatkan internet, film, radio, dan televisi, dan memanfaatkan semua sistem penyampaian yang memungkinkan, termasuk yang melalui perantaraan radio, online, nirkabel, dan satelit”.

Sekarang ini, pertumbuhan cepat penggunaan dan dampak media sosial mengubah cara orang-orang berinteraksi dengan media berita dan sebaliknya. Hal ini menyebabkan adanya diskusi dan perdebatan mengenai peran pandangan media yang berubah ini.

Semua ini bertepatan dengan kesempatan untuk memeriksa bagaimana hal ini terkait dengan agenda yang menyertai Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium sampai pada Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Semua ini merupakan faktor-faktor yang mendorong kami untuk mendukung pertemuan Forum Media Global di Indonesia pada Agustus 2014. Hal ini dibangun berdasarkan pada Semangat Bali dan semangat ini ditransformasikan ke dalam "*Bali Road Map*" (Pedoman Bali) yang berorientasi pada melakukan aksi, dan pedoman ini telah dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB sebagai kontribusi terhadap pembahasan SDG (Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di New York.

Diskusi-diskusi kunci dari Forum Media Global direfleksikan dalam publikasi ini, yang oleh karenanya memungkinkan masyarakat yang lebih luas untuk terlibat dalam perdebatan mengenai pentingnya komunikasi dan arus bebas informasi dalam upaya pembangunan sosial dan manusia.

Komisi Nasional dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia senang melihat tindaklanjut hal ini yang disampaikan dalam Forum Media Global, dan mereka percaya forum diskusi ini akan membantu para pemangku kepentingan di seluruh dunia dan terutama di wilayah kami untuk secara lebih baik memahami bagaimana kita dapat mewujudkan masa depan yang kita inginkan untuk semua pihak.

Prof. Dr. H. Arief Rachman

Ketua Eksekutif

Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

PENDAHULUAN

THE BALI ROAD MAP FOR THE ROLES OF THE MEDIA IN REALIZING THE FUTURE WE WANT FOR ALL (PEDOMAN BALI UNTUK PERAN-PERAN MEDIA DALAM MEWUJUDKAN MASA DEPAN YANG KITA INGINKAN UNTUK SEMUA PIHAK)

Guy Berger, Charaf Ahmimed, dan Mikel Aguirre Idiaquez
Penulis bab ini adalah anggota dari Sekretariat UNESCO.

FORUM MEDIA GLOBAL

Konferensi yang berjudul “*Global Media Forum: The role of media in realizing the future we want for all*” (Forum Media Global: Peran media dalam mewujudkan masa depan yang kita inginkan untuk semua pihak) diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2014.¹ Kegiatan ini diatur oleh UNESCO dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan berkolaborasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Bali, Indonesia, dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2014.

Acara ini membawa para jurnalis, ahli media, dan komunikator muda dari Asia Tenggara dan seluruh dunia secara bersama-sama, sebagai suatu kontribusi terhadap perdebatan internasional yang sedang berlangsung mengenai pentingnya media dan teknologi informasi dan komunikasi untuk perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman peserta akan bagaimana media yang bebas, majemuk, dan independen dapat memberikan kontribusi. Hal ini dalam konteks dari upaya untuk membuat isu-isu media dikenali dalam perdebatan PBB mengenai Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca tahun 2015. Keluaran dari Forum Media Global disebut Pedoman Bali, suatu dokumen kunci yang dimasukkan pada akhir buku ini.

Memproduksi kembali beberapa presentasi pada Forum Media Global dalam publikasi ini merupakan suatu cara untuk memperkenalkan Bali Road Map (Pedoman Bali) ini lebih lanjut. Sebagaimana dunia menandai

¹ <http://bali-gmf.com/>

tanggal 3 Mei 2015 sebagai Hari Kebebasan Pers Dunia, kumpulan tulisan ini mempersempit kisaran pemikiran mengenai apa yang media bebas lakukan - dan apa yang dapat media bebas lakukan. Ini merupakan isu penting dalam SDG PBB, tetapi hal ini mempunyai resonansi yang lebih luas – untuk pemerintah-pemerintah nasional, aktor-aktor media, masyarakat sipil, perantara Internet, organisasi-organisasi daerah, dll.

Perkataan “kebebasan pers” dalam daerah-daerah tertentu diinterpretasikan dengan makna kebebasan untuk para jurnalis surat kabar. Tentu saja, secara sejarah itulah awal mulanya. Namun sekarang ini, berkat kemajuan teknologi, “kebebasan pers” meliputi kebebasan bagi setiap orang untuk mempublikasikan informasi dan pendapat – apakah itu secara cetak, melalui radio atau televisi, atau melalui komputer atau telepon genggam. Hari Kebebasan Pers Dunia merupakan suatu peristiwa bagi setiap orang yang menggunakan media – untuk mengkonsumsi atau memproduksi informasi – untuk merayakan penggunaan secara publik ini hak-hak yang berada dalam kebebasan berekspresi.

Menjalankan kebebasan berekspresi dapat menjadi bukti dalam suatu diskusi kelompok pada suatu restoran atau di jalan – atau hal ini dapat diperkuat dengan media sebagai alatnya, dimana hal itu menjadi isu kebebasan pers. Media tersebut bisa berupa media berita, media hiburan, media pendidikan atau sosial. Media dapat menyebarkan pesan-pesan, dan seperti sistem transportasi, tempat penyaluran dan isi yang berbeda dapat dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda – para individu, perusahaan swasta, publik melalui negara, komunitas, kelompok politik dan masyarakat sipil, atau lainnya.

Perbedaan yang dapat dibuat oleh media dapat digambarkan dengan perjalanan secara lokal, berjalan kaki, dan pada malam hari, dan dibandingkan dengan perjalanan menggunakan sepeda pada siang hari yang terang pada jalan umum untuk mencapai tempat-tempat tertentu. Media memungkinkan pesan-pesan untuk menyebar lebih lanjut, lebih cepat, dan ke banyak tempat tujuan. Untuk teknologi komunikasi, institusi dan pengguna yang dapat menggantikan media, mereka tergantung pada adanya kebebasan pers.

Pesan-pesan yang dibuat, atau disiarkan, oleh media berkisar dari berita sampai pada fiksi kreatif dan periklanan. Ada juga gosip dan berita burung. “Kebebasan pers” yang menopang semua kegiatan massa yang memposkan pesan-pesan kemungkinan paling dihargai karena pada

kenyataannya hal itulah yang khususnya memungkinkan berkembangnya jurnalisme. Dengan kata lain, kebebasan pers sangatlah penting untuk melindungi publikasi informasi yang dapat diverifikasikan atau pendapat yang disampaikan, yang seharusnya dihasilkan menurut etika berdasarkan pada minat publik.

Anggap jurnalisme seperti menaiki sepeda dengan cara yang dapat diandalkan dan penuh pertimbangan. Jurnalisme mengamati standar yang lebih tinggi untuk menghasilkan dan menyampaikan pesan dibandingkan dengan cara-cara penyampaian pesan lainnya. Yang dimaksud dengan standar yang lebih tinggi, misalnya, dibandingkan dengan berjalan-jalan santai atau penjual keliling – meskipun setiap orang dalam kasus ini mempunyai minat yang sama dalam kebebasan bergerak.

Walaupun kebebasan pers berlaku lebih luas daripada jurnalisme, jurnalisme, oleh karena itu, merupakan penggunaan kebebasan pers yang khusus. Yang mendasari kebebasan pers dan jurnalisme adalah hak atas kebebasan berekspresi. *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) menetapkan hal ini pada Pasal 19 yang berbunyi:

“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk memberikan pendapat tanpa adanya campur tangan dan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide-ide melalui media apa saja dan tanpa menghiraukan perbatasan” (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1948).

Pasal di atas membantu kita mengetahui bahwa kebebasan berekspresi mempunyai dua dimensi: (a) untuk “menyebarkan” – yang merupakan landasan terbentuknya kebebasan pers, dan (b) untuk “mencari” dan “menerima” – yang sering disebut dengan “kebebasan informasi”. Yang pertama (a) merupakan keluaran (*output*) komunikasi, dan yang kedua (b) merupakan masukan (*input*) informasi.

Agar tetap adanya kebebasan pers atau dimensi “*output*” untuk saat ini, kita dapat mengatakan bahwa jurnalisme sebagai jenis berekspresi khusus secara umum dilihat sebagai sesuatu yang penting untuk menjamin adanya dialog, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Namun, keadaan dimana jurnalisme beroperasi di banyak negara mencegah jurnalisme memainkan peran ini. Dasar jurnalisme dapat dikorupsi atau dilemahkan karena masalah-masalah dalam sistem media.

Pertama-tama, undang-undang tidak memungkinkan untuk adanya kebebasan pers. Kedua, pemerintah mungkin mendominasi media yang dimiliki oleh negara, daripada melihat adanya manfaat dalam media pelayanan publik yang independen. Ketiga, kepentingan politik atau bisnis mungkin mempunyai banyak pengaruh atas media yang dimiliki secara pribadi (media swasta) sehingga kepentingan itu memperlemah kemungkinan adanya jurnalisme independen. Keempat, media komunitas sering jarang diakui dalam kebijakan penyiaran nasional dan mengalami perjuangan yang keras karena kesulitan ekonomi agar tetap bertahan “hidup”. Kelima, media sosial kadang-kadang tampak didominasi oleh berita-berita dan gosip pribadi, daripada berita dan informasi yang berkualitas.

Ketika keadaan media seperti yang digambarkan di atas, sulit bagi jurnalisme untuk memberikan kontribusi penting untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan, adil, dan berkelanjutan. Namun, Hari Kebebasan Pers Dunia merupakan suatu kesempatan untuk memfokuskan perhatian pada perbaikan keadaan sehingga media dapat membuat suatu perbedaan.

STATUS MEDIA DI SELURUH DUNIA

Akhir-akhir ini, UNESCO (2014) telah menganalisa tren-tren mengenai perubahan di seluruh lingkungan dunia untuk kebebasan pers. Ada pertumbuhan dalam undang-undang yang menyediakan ruang untuk kebebasan informasi (memberikan warga negara, termasuk jurnalis, hak atas akses yang dipegang oleh negara atau oleh perusahaan, setidaknya ketika relevan untuk fungsi publik). Akan tetapi ada juga pertumbuhan undang-undang yang membatasi Internet dan media sosial. Bahkan ada tren global “penurunan hukum dengan imitasi”, yang memperluas rintangan untuk kebebasan pers.

Lebih lanjut, terdapat undang-undang pencemaran nama baik bersifat pidana, undang-undang fitnah secara lisan, undang-undang penghinaan, dan undang-undang *lèse-majesté* (penghinaan terhadap pemimpin negara) yang tidak mengikuti standar internasional dalam hal batas mana dari kebebasan berekspresi harus menjadi pengecualian untuk norma arus bebas. Agar dapat dibenarkan, segala pengecualian juga harus ditunjukkan menjadi penting dan seimbang dalam hal tujuan yang sah seperti keamanan publik atau perlindungan hak-hak lainnya (misalnya, hak privasi). Selain undang-undang yang tidak memenuhi standar internasional ini, sering ada aturan-aturan lainnya yang terkait dengan keamanan nasional, anti-terorisme atau anti-ekstrimisme yang telah salah diberlakukan untuk

membatasi dan membungkam pandangan kritis dalam media, meskipun pandangan-pandangan ini seharusnya diterima di dalam demokrasi.

Terkait dengan isu-isu lainnya, ada lebih banyak kemajemukan media dari sebelumnya (terutama karena media sosial), tetapi ada juga peningkatan konsentrasi kepemilikan yang dapat berdampak pada keragaman konten. Kemandirian peraturan media masih lemah, sementara sistem yang dapat membuat peraturan sendiri masih berjuang di banyak tempat. Para jurnalis di seluruh dunia tidak terlindungi secara memadai, dan pihak-pihak yang menyerang para jurnalis ini tidak akan dihukum. Para jurnalis perempuan lebih sering diposisikan pada jabatan lebih rendah.

Semua ini merupakan isu-isu yang perlu perubahan apabila media, dan terutama jurnalisme, harus memberikan kontribusi pada masyarakat.

MEDIA DAN TUJUAN-TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PASCA TAHUN 2015

Media merupakan pemangku kepentingan yang penting terkait dengan upaya masyarakat mencapai tujuan-tujuan pembangunan – baik sebagai pemberi kontribusi maupun sebagai penerima keuntungan. Namun, MDG (Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium) yang diusulkan pada tahun 2000 tidak menyertakan topik ini di semua delapan tujuannya.

Tahun 2015 merupakan batas waktu untuk MDG, dan merupakan saat yang tepat untuk meninjau pencapaian dan tantangan, agar dapat mengusulkan agenda pembangunan baru yang mempertimbangkan topik-topik relevan seperti media. Proses pengembangan SDG (Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pasca 2015 inilah yang tepat memberikan kesempatan untuk mengenali media sebagai aktor yang relevan dalam proses pembangunan, dan untuk menyoroti bagaimana kebebasan berekspresi menjadi alat dan sekaligus tujuan pembangunan.

Adalah jelas bahwa kontribusi media bisa lebih besar berdasarkan arahan draf SDG tujuan nomor 16, yang mengacu pada tujuan-tujuan perdamaian, inklusi sosial, keadilan, akuntabilitas, dan keefektifan.² Namun, harus juga

² Tujuan nomor enam belas mengacu pada "mempromosikan masyarakat yang aman dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua pihak, dan membangun lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif pada semua tingkat" (*Sustainable Development Knowledge Platform, 2015*).

dibuat jelas bahwa media bebas mungkin juga dapat membantu dengan semua tujuan SDG lainnya yang diusulkan – misalnya, tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kesehatan atau lingkungan. Untuk alasan inilah, penting bahwa semua aktor media berpartisipasi dalam perdebatan terkini mengenai hubungan antara media dan pembangunan, karena mereka harus menekankan relevansi media dan berbagai kemungkinan kontribusi dengan setiap tujuan di SDG.

Untuk mengintegrasikan peran-peran media bebas sebagai faktor positif untuk pembangunan, akan masuk akal apabila tujuan-tujuan pembangunan itu seharusnya juga meliputi tujuan khusus terkait dengan pembentukan sistem media yang dapat menjamin kontribusi yang sedang berlangsung itu terhadap semua tujuan. Bahkan, draf SDG tujuan nomor 16 mempunyai sub-tujuan atau target yang relevan, yakni akses terhadap informasi. Partisipasi dan integrasi sosial, pembuatan keputusan pembangunan, dan perlindungan nilai-nilai demokrasi semua tergantung pada akses terhadap informasi.³

Seterusnya, akses terhadap informasi secara tepat terkait dengan apakah lingkungan media bebas, majemuk, dan independen. Acuan mengenai akses terhadap informasi dalam Tujuan 16 tidak terhindari mengarah pada suatu inti bahwa kebebasan informasi mencakup dimensi kembar: tidak hanya menerima informasi tetapi juga menyebarkan informasi. Dengan cara ini, semakin besar hak kebebasan berekspresi dapat dipahami sebagai sesuatu yang utama di dalam acuan yang lebih luas terhadap kebebasan mendasar (yang dicantumkan dalam Tujuan 16).

Media, dan terutama jurnalisme, mempunyai peran yang relevan dalam banyak aspek pembangunan, dari pemerintahan sampai pada inklusi, pemberdayaan, perdamaian, dan keterlibatan pemuda:

- Media dan jurnalisme merupakan suatu syarat untuk pemilihan yang sah dan bebas, terutama karena keduanya mempromosikan perdebatan publik dan kritis yang diperlukan demokrasi untuk tetap berkembang. Lebih lanjut, media secara tidak langsung dan media sosial secara langsung memberikan masyarakat kesempatan menjadi aktif dan menjadi peserta yang berpengetahuan dalam masyarakat, yang menguatkan kepemilikan proses pembangunan.

³ UNESCO dan Pembangunan Berkelanjutan, UNESCO, Paris 2005.

- Media dapat juga mempromosikan perdamaian, toleransi, dan dialog antara budaya-budaya, bangsa-bangsa, kelompok agama dan politik. Oleh karena itu, media dapat mendorong terbentuknya pengetahuan dan saling menghargai di antara bangsa-bangsa atau budaya-budaya agar dapat menghindari konflik. Pertukaran ini juga merupakan kunci pendorong terjadinya inovasi.
- Selain itu, media dan terutama komunitas dan media sosial dapat memberdayakan masyarakat – terutama kelompok marjinal dan kelompok rentan. Hal ini dapat terjadi melalui informasi yang membantu mereka mengerti wilayah tempat tinggal mereka dan juga konteks global – untuk tujuan mengubah hidup mereka. Pemberdayaan berarti populasi yang sangat terdidik dan mampu mengubah informasi menjadi pengetahuan dan keahlian yang bermakna.
- Media merupakan penunjang untuk pemerintahan yang akuntabel dan efektif – yang mengkomunikasikan aksi-aksi pihak berwenang, kekurangan dan pencapaian mereka. Selanjutnya, media dapat membuka dialog antara pemerintah dan masyarakat sehingga mereka yang memimpin membuat keputusan berdasarkan pada kebutuhan yang nyata.
- Terakhir, media dapat memberikan suara pada pemuda dan perempuan, yang memungkinkan partisipasi penuh mereka dalam masyarakat.

Maksud dari semua ini adalah media harus dianggap serius dalam pembangunan. Media perlu diperhatikan secara serius pastinya dalam kerangka pembangunan dunia yang baru dan sedang berlangsung, dan kerangka ini dibentuk berdasarkan tiga pilar utama: Pembangunan Berkelanjutan, Pemberantasan Kemiskinan, dan Perdamaian. Lebih terperinci dapat dilihat di bawah ini:

MEDIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Konsep pembangunan berkelanjutan telah mengalami pergantian dari yang dianggap suatu topik kepentingan eksklusif untuk komunitas akademis, institusi, dan ilmiah menjadi suatu istilah yang lebih dikenal dan suatu isu kepedulian untuk masyarakat umum. Karena menjadi ide yang kompleks dan holistik, konsep ini perlu dijadikan populer dan

dilibatkan pada tingkat masyarakat umum. Diskusi pada Forum Media Global membuka dinamisme makna “Pembangunan Berkelanjutan”, dan inisiatif apa yang oleh media dan TIK gunakan untuk pemberdayaan dan terlibatnya masyarakat dalam isu-isu yang dibicarakan.

Informasi dan kampanye kesadaran publik merupakan alat yang tidak dapat dikesampingkan dalam membuat masyarakat umum memahami konsep dan menyadari pentingnya konsep ini. Media merupakan vektor kunci yang dapat membantu memberikan makna praktikal pada konsep ini dan relevansinya untuk kehidupan sehari-hari.⁴ Tidak hanya melalui cetakan dan siaran tradisional, tetapi juga melalui penggunaan TIK, media menyediakan saluran untuk dialog dan diskusi antara para ahli, institusi, dan warga negara.

Pada beberapa dekade terakhir ini, perkembangan TIK telah berjalan dengan kecepatan tinggi dan dalam skala yang besar sehingga dapat mewakili suatu revolusi ekonomi dan sosial global, penuh harapan, meskipun ada tantangan-tantangan. Dalam konteks ini, pertukaran bebas ide-ide dan pengetahuan, yang UNESCO promosikan sebagai salah satu mandat utamanya, lebih dari sekedar pengemudi praktikal pembangunan berkelanjutan. Forum Media Global merupakan salah satu contoh pertukaran bebas, yang kadang-kadang kritis dan provokatif, mengenai bagaimana berbedanya para pemangku kepentingan memberikan dampak pada peran media dalam pembangunan berkelanjutan.

MEDIA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN

Mengamati keberhasilan dan kegagalan upaya-upaya pembangunan telah mengarahkan agensi pembangunan, lembaga swasembada masyarakat dan negara-negara menuju pembentukan struktur pembangunan dengan partisipasi lokal. Ada semacam pengakuan bahwa tanpa pemberdayaan dan pemahaman akan karakteristik wilayah dan masyarakat lokal, bahkan rencana yang didukung sebaik mungkin untuk memperbaiki kehidupan suatu komunitas cenderung akan menghasilkan hasil-hasil yang akan diabaikan atau tidak berkelanjutan.

Dalam konteks ini, media bebas dan independen seharusnya diakui sebagai

⁴ UNESCO dan Pembangunan Berkelanjutan, UNESCO, Paris 2005.

dimensi kunci dalam upaya-upaya untuk memberantas kemiskinan, untuk dua alasan utama. Pertama-tama, para media ini berfungsi sebagai kendaraan untuk berbagi informasi agar dapat memfasilitasi pemerintahan yang baik, menghasilkan kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan-pelayanan penting yang mendasar, mempromosikan akuntabilitas dan memberantas korupsi, dan membentuk hubungan antara penduduk yang terdidik, kritis, dan ikut berpartisipasi dan para pejabat terpilih yang tanggap. Jurnalisme investigatif merupakan suatu topik khusus pembahasan selama acara Forum Media Global.

Kedua, media bebas dan independen dikaitkan dengan banyak keuntungan yang sangat relevan dengan tantangan dalam pemberantasan kemiskinan, termasuk pengakuan dan penguatan hak-hak asasi manusia, inklusi sosial dan kesetaraan gender, masyarakat sipil yang lebih kuat, perubahan institusional, transparansi politik, dukungan terhadap pendidikan, kesadaran kesehatan publik (seperti kampanye pendidikan mengenai HIV dan AIDS) dan mata pencaharian yang berkelanjutan.⁵

MEDIA DAN PERDAMAIAN DAN DIALOG

Dengan kemampuan media yang sangat besar untuk menetapkan agenda-agenda sosial dan melegitimasi apa yang media tuliskan dan sampaikan, media mempunyai peran kunci untuk mempromosikan dialog dan membangun perdamaian.

Sebaliknya, ketika media dikendalikan, media dapat dimanipulasikan untuk mengindoktrinasi penduduk untuk berperang. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab Perang Dunia Kedua, dan oleh karena itu kebutuhan akan media bebas secara sejarah menjadi bagian dari kode DNA (menjadi bagian penting dari kelahiran) UNESCO ketika organisasi ini dibentuk 70 tahun yang lalu. Kebutuhan akan media bebas ini merupakan tema dasar dalam diskusi pada Forum Media Global.

Kebodohan, prasangka buruk, dan stereotipe merupakan halangan untuk pemahaman bersama dan dialog yang damai. Dewan Eksekutif UNESCO telah mengakui bahwa: "Dialog, yang dibentuk berdasarkan sikap saling menghargai dan pemahaman bersama, merupakan cara terbaik untuk

⁵ Pengembangan Media dan Pemberantasan Kemiskinan, UNESCO, Paris, 2006.

menghadapi kebodohan dan mempromosikan perdamaian, toleransi, dan dialog antara peradaban, budaya, bangsa-bangsa, dan agama”.⁶ Pemahaman bersama hanya dapat dicapai melalui pertukaran informasi dan pengetahuan secara terus menerus – melalui arus bebas ide-ide dengan kata-kata dan gambar, sebagaimana yang dinyatakan dalam Konstitusi UNESCO. Benar bahwa arus bebas informasi ini merupakan dasar dari pemahaman bersama, yang pada akhirnya merupakan keadaan yang sangat penting untuk memberantas konsepsi yang salah mengenai “lainnya” – salah satu penyebab akar dari konflik dan perang.⁷ Oleh karena itu, potensi media sebagai dasar bagi dialog antar sesama manusia tidak dapat dibantah, dan jurnalisme yang peka terhadap konflik dapat memainkan peran yang sangat besar dalam hal ini.⁸ Peran media dalam semua ini secara ekstensif didebatkan selama sesi-sesi pada acara Forum Media Global.

PERDEBATAN PADA FORUM MEDIA GLOBAL

Berbagai peran potensial media, yang dapat melakukan banyak hal di masa depan, merupakan tema inti pada acara Forum Media Global. Dengan tepat digambarkan sebagai “forum”, acara ini menyediakan berbagai pandangan yang harus disebarluaskan. Seleksi makalah dalam buku ini mewakili keragaman pandangan yang diungkapkan. Makalah-makalah tersebut tidaklah didukung oleh UNESCO atau pihak lainnya, tetapi merupakan kontribusi untuk pertukaran yang dibuat oleh para individu yang terlibat. Acara ini diatur melalui banyak sesi sebagai berikut:

Selama sesi yang berjudul **Bagaimana media dapat berkontribusi dalam pembangunan manusia dan sosial?**, panelis melihat secara kritis pada bagaimana media terkait dengan pembangunan dan fungsi-fungsi yang berbeda bahwa media bebas dan independen dapat memainkan peran-peran yang kondusif untuk kemajuan. Lebih lanjut, sesi ini juga membahas bagaimana indikator yang dianggap berhasil dapat ditetapkan untuk secara konkrit mengukur pencapaian SDG, terkait dengan peran yang dimainkan oleh media.

⁶ Dinyatakan selama Dewan Eksekutif UNESCO pada bulan April 2006. Paris.

⁷ Deklarasi “Semangat Bali”, UNESCO-Pemerintah Indonesia, 2007, Bali.

⁸ Howard, R. 2009. *Conflict-Sensitive Reporting: State of the Art. A Course for Journalists and Journalism Educators* (Pelaporan Peka Konflik: Suatu Patokan. Kursus untuk Jurnalis dan Pendidik Jurnalisme). UNESCO: Paris. <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001869/186986e.pdf>

Indikator-Indikator Pengembangan Media UNESCO yang ada, bersama dengan Indikator-Indikator Keamanan Jurnalisme, merupakan dasar yang sangat baik. Indikator ini merupakan produk dari Badan 39 Negara Anggota di UNESCO, yang dinamakan *International Programme for the Development of Communication* (Program Internasional untuk Pengembangan Komunikasi - IPDC). IPDC yang sama juga menjadi dasar dari indikator-indikator pengembangan lainnya – untuk keamanan jurnalis, gender, untuk penyiaran pelayanan publik, dan untuk Internet. Posisi UNESCO dalam hal Internet dan pembangunan berkelanjutan akan dipertimbangkan pada Konferensi Umum Organisasi pada bulan November 2015, dalam tanggapan terhadap studi global dan opsi-opsi terkait untuk UNESCO, yang dilaksanakan selama tahun 2013 dan 2014.⁹

Tema untuk sesi kedua, yaitu **Menyediakan suara untuk mereka yang tidak bersuara. Pemberdayaan kelompok-kelompok marjinal melalui media.** Peningkatan akses terhadap informasi secara khusus penting untuk kelompok-kelompok yang, atau berisiko menjadi, marjinal – seperti orang-orang dengan cacat fisik, orang-orang yang tinggal di wilayah pedesaan, kelompok-kelompok kaum pribumi, dan lainnya. Media baru telah mempunyai dampak yang inovatif dalam hal bagaimana kehidupan modern disusun. Ada aspek-aspek positif dan negatif dari perkembangan ini, tetapi satu hal yang pasti adalah hanya dengan adanya ledakan kesempatan informasi dan komunikasi telah selamanya membuka perbatasan, perspektif, dan pikiran, dan ketika didukung oleh pendidikan, hal ini mengarah pada pemberdayaan, setidaknya, orang-orang muda di seluruh dunia. Energi pada acara Forum Media Global merupakan testamen untuk komponen yang kuat dari peserta muda yang juga mengoperasikan ruang berita multi media selama acara ini berlangsung.

Pemuda merupakan aktor kunci secara global dalam menggunakan media baru, terutama media sosial. Praktisi media memberikan presentasi pada sesi berjudul **Revolusi Media Sosial** dan Baru suatu potensi yang sangat besar dalam jaringan komunikasi horizontal tidak hanya untuk kontak sosial tetapi juga untuk penyebaran informasi dan pengetahuan dan kewarganegaraan yang aktif dan ikut berpartisipasi. Pemberdayaan pemuda bersifat kritis di dunia dimana pasar dunia kerja sering meninggalkan generasi muda dalam situasi yang tidak menyenangkan. Walaupun kita mengetahui bahwa tidak

⁹ <http://www.unesco.org/new/internetstudy>.

ada solusi teknologi yang sederhana untuk dilema demokrasi dan bahwa ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi bukanlah jaminan bahwa semua itu akan digunakan untuk kepentingan warga negara seperti yang telah kita saksikan – dalam semua wilayah di dunia – Internet telah menjadi bagian yang kritis dari keterlibatan pemuda. Sesi-sesi Forum Media Global melibatkan banyak dialog antara generasi-generasi berbeda pada isu-isu ini dan isu-isu lainnya.

Isu-isu kesetaraan gender merupakan isu paling penting dari agenda pembangunan internasional. Dalam kerangka ini, acara Forum Media Global berkontribusi pada kegiatan tindaklanjut pada acara **UNESCO Global Media and Gender Forum (Forum Media dan Gender Global UNESCO)** yang diselenggarakan di Bangkok pada bulan Desember 2013. Selama acara Forum tersebut, *GAMAG (Global Alliance on Media and Gender = Aliansi Global untuk Media dan Gender)* diluncurkan sebagai suatu mekanisme untuk kegiatan tindaklanjut yang sistematis dari tujuan strategis gender dan media di dalam Deklarasi Beijing dan Forum untuk Aksi.¹⁰ Pernikahan anak, pembunuhan atas alasan kehormatan, mutilasi organ seksual perempuan, pelecehan seksual di tempat kerja, dan penguntit dunia maya merupakan beberapa dari pelanggaran yang sangat mengejutkan dari hak-hak perempuan, dimana media yang peka gender dapat bantu untuk mengekspos berita tersebut. Dimensi kesetaraan gender merupakan tema utama di seluruh sesi-sesi Forum ini.

Acara Forum Global di Bali juga menyelenggarakan Peluncuran Asia Pasifik dari **Tren Dunia UNESCO dalam Laporan Kebebasan Berekspresi dan Pengembangan Media**.¹¹ Studi ini mencakup tren-tren pada tingkat global dan tingkat regional, termasuk wilayah Asia dan Pasifik. Sesi ini menyoroti dan membandingkan tren-tren global kunci dengan tren-tren di wilayah Asia dan Pasifik. Sesi ini telah mencakup studi pada empat sub-bidang: kebebasan media, pluralisme, kemandirian, dan keamanan, yang semua diteliti dan ditulis dengan perspektif yang peka gender pada keseluruhannya.

Forum ini juga memfokuskan pada **Bagaimana Media dapat Berkontribusi pada Perdamaian dan Dialog?** Dunia kita masih ditandai dengan konflik dan perang. Kekerasan semakin lama semakin tidak berhukum dan komunitas

¹⁰ <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/crosscutting-priorities/gender-and-media/global-alliance-on-media-and-gender/homepage/>

¹¹ <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/world-trends-in-freedom-of-expression-and-media-development/>

internasional mempunyai kesulitan dalam memediasikan banyak konflik ini karena wewenang negara atau aturan hukum lemah atau tidak ada. Media internasional yang mampu untuk menyebarkan berita dalam hitungan detik secara global telah semakin menjadi target manipulasi, informasi yang salah, dan tekanan langsung, sering dalam bentuk-bentuk yang radikal dan kasar. Dalam lingkungan seperti itu, jurnalisme yang dapat diandalkan dan profesional merupakan bagian kritis dari pengawasan dan penjelasan konflik yang keras, dan mencakup solusi-solusi, dan hal ini memerlukan keterampilan dan pengetahuan dalam pelaporan yang secara peka dan tepat.

Tekanan keuangan, yang juga disebut “penyensoran halus”, merupakan alat yang lebih luas digunakan daripada sebelumnya karena tekanan ini secara tepat dan langsung mempengaruhi keberlangsungan perusahaan-perusahaan media. Tekanan ekonomi dari perusahaan swasta dan pihak berwenang bertentangan secara serius dengan tindakan yang diperlukan di dalam media untuk menjamin jurnalisme yang profesional dan beretika. Pada sesi mengenai **Standar Beretika dan Profesional dalam Media**, para panelis mengalamatkan pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah jurnalisme menjual dirinya sendiri kepada pembuat iklan? Apakah pembagian tradisional antara ruang berita dan unit-unit komersial dari media berita sekuat seperti yang seharusnya? Sesi ini juga menyentuh garis-garis yang kabur atau tidak jelas antara jurnalisme profesional dan pelaporan, dan narasi pada blog-blog dan situs-situs berbagai organisasi. Ketika sampai pada permasalahan perdamaian dan dialog antar-budaya, tuntutan yang paling penting untuk jurnalisme profesional adalah untuk melaporkan fakta-fakta yang ada dan untuk menjamin bahwa semua pihak dalam semua konflik didengarkan ceritanya. Hal ini memerlukan suatu kebijakan redaksi yang terbuka dan majemuk dan standar beretika dan profesional yang tidak mudah terperangkap pada pelaporan yang berbias atau bahkan pelaporan yang berapi-api yang menyebabkan timbulnya amarah. Meskipun media dapat berkontribusi besar untuk memperoleh dasar yang sama atau untuk memahami perbedaan-perbedaan atau konflik-konflik faktual, media juga dapat berkontribusi pada memburuknya suatu krisis. Sistem media bebas akan menyediakan publik dengan alternatif terhadap sekumpulan propaganda dan hasutan untuk berperang, dan para jurnalis dapat memperkuat kemandirian dan integritas redaksi dengan melakukan tekanan balik terhadap tekanan ekonomi dan tekanan lainnya.

Forum ini melihat ke dalam salah satu kondisi mendasar yang penting bagi semua penduduk untuk secara penuh mendapatkan keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada sambil secara efektif menanganinya

risiko-risiko yang muncul dari ledakan informasi dan komunikasi, atau dengan kata lain pengetahuan akan bagaimana penduduk dapat secara efektif terlibat dengan informasi dan media dalam segala aspek dari kehidupan sehari-hari mereka. **Literasi Media dan Informasi** untuk semua penduduk menjadi semakin penting, dan Forum ini menempatkan fokus pada mengapa dan bagaimana paket komprehensif dari pengetahuan dan keterampilan ini harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan non-formal, formal, dan tidak formal, pada semua tingkatan dari pendidikan dasar dan pendidikan tingkat selanjutnya.

Pada hari kedua acara Forum ini, para panelis membahas **Bagaimana media dapat memfasilitasi pemerintahan yang baik dan efektif?** Pemerintahan yang baik dan efektif meliputi kemampuan negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi kuncinya dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan para penduduknya, dan bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, penekanan telah sering ditempatkan pada pendekatan yang berpusat pada masyarakat, yakni pendekatan yang diatur oleh kebutuhan masyarakat, kepentingan publik, transparansi, akuntabilitas, dan tanggungjawab pembuat kebijakan. Semua ini juga telah menjadi hal utama bagi pembentukan pembangunan yang berkelanjutan. Negara-negara yang berhasil lebih lanjut sering dikarakteristikan oleh penyebaran dan pembagian informasi dan pengetahuan yang bebas dan tidak terhalangi, dan hal ini sebagian besar difasilitasi oleh Undang-Undang Kebebasan Informasi yang efisien.

Keamanan jurnalis merupakan prasyarat bagi kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga merupakan topik dari panel khusus pada acara Forum ini. Apabila para jurnalis tidak dapat melaporkan karena ada halangan dan merasa takut akan hidup atau kesejahteraan mereka sendiri, atau hidup dan kesejahteraan orang-orang yang mereka cintai, maka masyarakat kehilangan arus informasi yang sangat penting. Seterusnya, ketika orang-orang yang menyerang atau membunuh para jurnalis tidak mendapatkan hukuman, keadaan impunitas yang berlaku untuk aksi-aksi mereka mengarah pada penyensoran dengan sendirinya di antara jurnalis dan masyarakat umum. Dengan cara ini, masalah impunitas mengekspos kelemahan-kelemahan dalam sistem keadilan pidana dalam masyarakat, dan merupakan suatu indeks keadaan aturan hukum dalam yurisdiksi itu. Rencana Aksi PBB tentang Keamanan Jurnalis dan Isu Impunitas merupakan suatu kerangka untuk kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, yang diterima baik oleh Majelis Umum PBB, dan berkontribusi kuat pada pengamanan kebebasan berekspresi dan aturan hukum sebagai faktor-faktor pembangunan.

Pada akhirnya, dalam Sesi Khusus, Forum ini beralih dari perspektif global ke perspektif nasional dan memperdebatkan **Keadaan media di Indonesia, tantangan dan dampak positifnya** dengan panel yang mewakili keragaman penuh media di Indonesia.

Sebagai suatu Negara Berpendapatan Menengah dan salah satu perekonomian yang paling cepat tumbuh di dunia yang pada saat yang sama dikarakteristikan oleh ketidaksetaraan dan kerentanan yang hebat terhadap bencana alam, Indonesia dipertimbangkan untuk memimpin, dan berfungsi sebagai model untuk menangani tantangan-tantangan pembangunan lama dan baru. Sebagai negara terbesar keempat, negara demokrasi terbesar ketiga, dan bangsa dengan jumlah mayoritas muslim terbesar, Indonesia merupakan anggota kuat dari ASEAN (*Association of South-east Asians Nations* = Asosiasi Bangsa-Bangsa Negara Asia Tenggara) dan G20. Indonesia telah memainkan peran yang signifikan dalam diskusi di sekitar Agenda Pembangunan Pasca Tahun 2015. Oleh karena itu, Indonesia dapat menjadi contoh positif untuk negara-negara lain, baik bagi negara-negara maju maupun bagi negara-negara berkembang, dan mewakili beberapa potensi wilayah ASEAN, sambil mengikutsertakan tantangan-tantangan yang sama dan potensial yang dimiliki bersama. Forum ini merupakan contoh bagaimana pentingnya Indonesia yang telah memberikan promosi akan peran media dalam pembangunan berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan, dan perdamaian. Tanda pencapaiannya adalah *Bali Road Map* (Pedoman Bali) yang dibahas dalam Kesimpulan pada buku ini, dan yang muncul dari pertukaran-pertukaran yang difasilitasi oleh Forum ini.

Tujuan dari menghasilkan kembali beberapa kontribusi ini adalah untuk membuat makalah-makalah yang berisi keragaman pandangan dan pengalaman yang disampaikan pada Forum Media Global ini tersedia bagi kalangan yang lebih luas. Makalah-makalah tersebut berisi dari studi kasus yang konkrit sampai pada analisa yang lebih luas. Sebagai bagian dari proses yang sedang berlangsung dari penyelusuran dan pendalaman pemahaman peran-peran media dalam pembangunan, makalah-makalah ini akan menstimulasikan pikiran tentang banyak isu. Ini benar-benar

merupakan tujuan kunci UNESCO – menjadi laboratorium untuk ide-ide.

BIBLIOGRAFI

Sustainable Development Knowledge Platform. (2015). *Open Working Group proposal for Sustainable Development Goals (Proposal Kelompok Kerja Terbuka untuk Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)*. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tersedia di: <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal.html>.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2014). *World Trends in Freedom of Expression and Media Development (Tren-Tren Dunia dalam Kebebasan Berekspressi dan Pengembangan Media)*. UNESCO: Paris. Tersedia di: <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002270/227025e.pdf>.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2014). *“En Haití, los medios de comunicación son una herramienta para mejorar las cosas”*. *Entrevista con Harrison Ernest, Director de la Radio Nacional de Haití*. Tersedia di:

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/en_haiti_los_medios_de_comunicacion_son_una_herramienta_para_mejorar_las_cosas_entrevista_con_harrison_ernest_director_de_la_radio_nacional_de_haiti/#.VRorg-HSCO1.



BAGIAN I

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA: AKSES TERHADAP INFORMASI DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam beberapa dekade ke depan sebagian besar tergantung pada apakah dan bagaimana masyarakat mempunyai akses terhadap informasi. Agar dapat mempunyai pendapat dalam prioritas pengeluaran dan membuat pemerintah mereka bertanggungjawab, penduduk perlu menjadi peserta aktif. Hal ini penting secara khusus terkait dengan kelompok-kelompok dan komunitas yang dimarjinalkan, apakah karena kemiskinan, difabel atau diskriminasi gender, di antaranya.

Kebanyakan orang-orang tergantung pada media untuk sebagian besar informasi, dan ini pada akhirnya memerlukan suatu media yang mengalami

pemberdayaan, profesional, dan dekat dengan komunitas mereka sehingga mereka dapat memberitahukan dan menjelaskan kebijakan-kebijakan dan prioritas pemerintah dengan cara dimana semua orang dapat mengerti. Walaupun di masa lalu kepercayaan merupakan peninggalan utama media, sekarang ini teknologi baru telah membuka wawasan untuk akses publik yang lebih luas. Apabila media tradisional mematuhi standar-standar profesional dan beretika tinggi, dan cara-cara dan alat-alat ditemukan untuk memanfaatkan media baru untuk secara positif meningkatkan akses terhadap informasi dan pemberdayaan masyarakat, maka demokrasi akan menjadi suatu proses lebih bermakna bagi penduduk, dan pemerintah dapat diminta pertanggungjawabannya.

Dalam bab ini, **Naranjargal Khaskuu**, yang memberikan argumen bahwa ‘masyarakat terdidik mempunyai kekuatan’, melihat pada upaya-upaya di Mongolia untuk pemberdayaan komunitas lokal melalui radio dan upaya yang serupa untuk memberikan pemuda setempat alat-alat untuk terlibat dalam aktivisme digital dan isu-isu pemerintahan. Meskipun ada masalah, ada pula keberhasilan.

Toby Mendel, seorang ahli dalam hukum dan demokrasi, dalam kontribusinya memfokuskan pada isu-isu kunci dari kekuatan media digital untuk mengasuh pemberdayaan dan menghadapi ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh media digital yang sama terhadap privasi kita. Dia memberikan argumen bahwa terlalu mudah mengatakan bahwa media sosial merupakan pemberdayaan yang bermakna – karena media sosial berkomunikasi dengan cara memberitahukan dan mendidik, dan karena media sosial menempatkan privasi pada belas kasihan orang-orang yang berkuasa.

Dari perspektifnya yang unik, **Moez Chakchouk**, yang menjalankan agensi internet nasional Tunisia, melihat pada pertempuran atas akses terhadap informasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, dan memberikan argumen bahwa masyarakat hanya dapat mengalami pemberdayaan apabila mereka diijinkan mendapatkan akses yang bebas dan tidak terbelenggu terhadap informasi. Dia juga melihat pada pentingnya membawa pemuda ‘ke dalam hal-hal yang sedang menjadi pembicaraan’ melalui penyediaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mereka menjadi peserta yang terlibat dalam membangun masa depan yang lebih cerah untuk negara mereka.

Lisa French, yang mempunyai pengalaman yang luas dalam meneliti perempuan dalam media, memberikan argumen akan pentingnya literasi

media dan informasi untuk pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender untuk mencapai partisipasi penuh dalam pembangunan.

Uni Lubis, seorang jurnalis dari Indonesia, memberikan suatu pandangan sejarah mengenai jurnalis perempuan di Indonesia, dan juga melihat pada situasi terkini. Dia memberikan argumen bahwa meskipun masih jauh jalan untuk menjamin tempat bagi perempuan yang setara menurut hukum di ruang berita, ada beberapa kemajuan yang telah dibuat.

BAB 1

MENYEDIAKAN SUARA UNTUK MEREKA YANG TIDAK BERSUARA

Naranjargal Khaskuu

Naranjargal Khaskuu adalah Ketua Globe International, Mongolia

Globe International Center adalah suatu Lembaga Swasembada Masyarakat (LSM) Mongolia yang didirikan pada tahun 1999 dan misinya adalah mempertahankan demokrasi di Mongolia dan masyarakat sipil dengan menyebarkan kekuatan informasi dan pengetahuan. Visi kami adalah membentuk suatu budaya demokrasi, dengan penduduk yang terdidik dan mengalami pemberdayaan. Kami menjalankan kegiatan kami dengan moto: 'Pengetahuan adalah Kekuatan'.

Informasi merupakan sesuatu yang mendasar bagi pengetahuan, dan penduduk yang terdidik dan berpengetahuan adalah penduduk yang mengalami pemberdayaan dan oleh karena itu dapat berpartisipasi dalam urusan penduduk, pembangunan sosial, dan kemajuan. Hak publik untuk menikmati kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi merupakan hal yang penting untuk mengkonsolidasikan dan membangun masyarakat yang demokratis, sipil, dan sehat yang menghargai hak-hak manusia dan benar-benar melayani publik. Konsep strategis kami adalah "Masyarakat yang Terdidik adalah Masyarakat yang Mempunyai Kekuatan".

Kami telah bekerja dengan kelompok komunitas yang berbeda untuk memberdayakan mereka melalui media dan dua dari proyek-proyek kami memfokuskan pada 1) pemberdayaan populasi lokal melalui radio komunitas; dan 2) pemberdayaan pemuda lokal yang menggunakan teknologi baru.

Mongolia merupakan salah satu negara dengan populasi yang paling jarang di dunia dengan 2,8 juta jiwa yang hidup dalam wilayah 1,5 juta kilometer persegi. Kaum minoritas nasional termasuk Kazakh dan Tuvas, dan ada lebih dari 80 kelompok suku Mongol. Mereka mendominasi empat provinsi di bagian barat.

Pada tahun 2011-2012, *Globe International Center* mendirikan 10 radio komunitas pada 10 wilayah terpencil *Soums* di empat wilayah bagian

barat Aimag: Bayan-Olgii, Uvs, Khovd, dan Khuvsgul, dengan bantuan dari UNESCO, Kantor Beijing. Proyek ini merupakan bagian dari “Pelayanan Komunitas Komprehensif untuk Memperbaiki Keamanan Manusia di Wilayah Pedesaan Mongolia” secara inisiatif dan bersama diimplementasikan oleh UN Trust Fund (Dana Perwalian PBB) dan pemerintah Mongolia di bawah pengarahannya UN Trust Fund. Proyek ini menyampaikan Rekomendasi Kebijakan kepada Pemerintah Mongolia, yang meliputi berikut ini: 1) mengasuh media komunitas yang ramah pada lingkungan legislatif dan administratif (misalnya, prosedur pendaftaran yang disederhanakan, perijinan yang disederhanakan untuk komunitas penyiar yang kecil, dll.); 2) mengimplementasikan mekanisme yang otomatis dan transparan untuk secara finansial membiayai media komunitas dengan pendanaan publik tanpa adanya campur tangan redaksi dari pemerintah lokal dan pusat (misalnya, berdasarkan anggaran yang berlebih (*surplus*) pada tingkat Soum/Aimag, dan pendapatan dari konsesi mineral dan lainnya); dan 3) menemukan cara-cara untuk menyediakan pengembangan kapasitas lebih lanjut untuk media komunitas mengenai kegiatan yang menghasilkan pendapatan, mobilisasi sumber daya, serta produksi dan manajemen penyiaran.

Media besar dan utama tidak melayani komunitas lokal sebagaimana saluran media yang berlokasi di kota-kota pusat provinsi tidak menjangkau desa-desa terpencil. Penyiar publik tidak mempunyai cabang-cabang di provinsi-provinsi dan laporan mereka dari wilayah-wilayah itu terjadi hanya sekali-sekali. Populasi lokal lebih mengetahui isu-isu nasional daripada masalah dan tantangan lokal mereka. Dalam skenario ini, radio komunitas merupakan alat yang unik untuk memenuhi kebutuhan informasi kelompok marjinal.

Di Bayannuur, Bayan-Ulgii aimag, suatu provinsi Kazakh, masyarakat dapat mendengarkan berita lokal di radio berbahasa Kazakh yang berkantor pusat di kota pusat provinsi Ulgii, dengan Internet menjadi jembatan untuk masyarakat yang bertempat tinggal di provinsi-provinsi. Radio komunitas membantu masyarakat lokal untuk membuat suara mereka didengarkan dan menggalakkan dialog dan kemampuan para penduduk lokal untuk mengambil aksi. Di Tsagaan-Uul Soum, Khuvsgul Aimag, komunitas radio memberikan suara pada kepedulian masyarakat akan tingginya harga air. Diskusi dan dialog yang muncul menyebabkan penurunan pada harga air.

Di Bayannuur soum, Bayan-Ulgii Aimag, staf radio komunitas menarik perhatian komunitas mereka terhadap bendungan yang terpolusi

penuh dengan sampah yang menghalangi arus bebas air dan juga menyebabkan risiko bencana apabila terjadi hujan deras. Para wartawan mulai mewawancarai masyarakat, mendidik penduduk setempat akan bendungan yang terpolusi dan menanyakan apakah mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam pembersihan bendungan. Sebagian besar bersedia membantu. Masyarakat kemudian datang bersama-sama untuk membersihkan bendungan dan pada akhirnya hal ini melindungi desa itu dari bencana banjir seperti yang pernah terjadi pada musim panas sebelumnya.

Pasar media Mongolia sangat dipenuhi oleh 506 saluran media. Ada jumlah total 214 media penyiaran, 221 media cetak, dan 71 media online pada akhir 2013. Lebih dari 180 stasiun penyiaran kecil beroperasi di provinsi-provinsi. Undang-undang tahun 1998 mengenai Kebebasan Media melarang kepemilikan media oleh pemerintah, dan kepemilikan oleh swasta dominan di negara ini. Pada tahun 2005, Parlemen Mongolia mengeluarkan Undang-Undang mengenai Radio dan Televisi Publik sehingga konsep keragaman media menjadi terkenal di antara komunitas media dan politisi. Dalam tahun-tahun sejak itu, Masyarakat Terbuka dan UNESCO mendirikan radio komunitas di provinsi-provinsi, tetapi media komunitas diterjemahkan menjadi bermakna media publik.

Di Mongolia, 'media komunitas' merupakan konsep baru dalam hal bentuk media serta terminologi. Kami tidak mempunyai kata Mongolia yang khusus untuk mendefinisikannya jadi kami menggunakan kata 'Hui' yang berarti 'pusat', maka itu media 'Huin' berfungsi untuk melayani masyarakat yang mempunyai hubungan 'pusat' (yang berkaitan dengan pusat) atas kepentingan bersama mereka.

Media komunitas tidak diakui pada tingkatan kebijakan, hukum, dan peraturan. Kurangnya lingkungan yang memungkinkan menciptakan suatu tantangan bagi radio komunitas untuk bertahan hidup dan tetap berkelanjutan dalam suatu komunitas kecil dimana tidak ada pasar periklanan dan tidak ada dukungan pemerintah. Globe International Center yang memberikan dukungan pada CRAMO (*Community Radio Association of Mongolia* = Asosiasi Radio Komunitas Mongolia) bertujuan untuk mempromosikan keberlanjutan radio komunitas dan juga mempunyai Kelompok Lobi/Advokasi di Parlemen.

Contoh kedua adalah bagaimana pemuda dapat memberikan dukungan untuk perubahan melalui aktivisme digital. Proyek Duta Pemuda untuk

Pemerintahan yang Baik menargetkan para pemuda dari 15 provinsi: enam provinsi di bagian barat, tiga provinsi di bagian tengah, empat provinsi di bagian selatan, dan dua provinsi di bagian timur. Proyek ini diimplementasikan dalam tiga tahap: i) untuk mengidentifikasi masalah dan isu lokal, ii) untuk mengambil aksi dalam mengalamatkan masalah-masalah ini, dan iii) untuk mendorong mereka memberikan rekomendasi untuk memecahkan masalah tersebut. Pada permulaan, suatu buku pedoman dikembangkan agar dapat mendidik pemuda mengenai isu-isu pemerintahan. Buku pedoman ini juga berisi bagaimana menggunakan alat-alat online, termasuk bagaimana menciptakan akun media sosial dan setelah itu bagaimana menyusun suatu acara komunitas. Buku pedoman ini meliputi keterangan mengenai *pitching* (tender periklanan di media sosial), bagaimana mengedit foto dan video dengan menggunakan Windows Movie Maker, dan seterusnya. Buku pedoman ini juga mengarahkan para pemuda ke penghubung setempat yang penting untuk mempelajari lebih banyak mengenai hak-hak asasi manusia, kampanye anti korupsi, perlindungan lingkungan, kesetaraan gender, dll.

Intervensi proyek pertama berupa acara komunitas untuk masyarakat setempat untuk mengidentifikasi masalah mereka. Jumlah total 3300 mahasiswa terlibat (secara langsung 900) dalam lokakarya pengembangan pengetahuan. Untuk mengalamatkan masalah-masalah yang teridentifikasi, pemuda membentuk dan membagi diri mereka sendiri ke dalam 48 kelompok dan menghasilkan iklan-iklan video, yang membicarakan tentang ide-ide di belakang aksi-aksi mereka dan mempos video-video itu di Facebook. Para juri berbicara dengan semua kelompok melalui Skype dan memilih proposal yang terbaik. Lebih dari 300 aksi kecil melawan korupsi dan mempromosikan pemerintahan yang baik yang meliputi survei, kinerja, produksi audio dan video, kontes, papan reklame, lokakarya, dll. telah dilakukan oleh kelompok pemuda setempat. Para pemuda menyusun barisan di depan stasiun polisi aimag (provinsi) atau klinik lokal dan mahasiswa membawa poster-poster yang menuntun masa depan yang bebas korupsi dan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan tuntutan lainnya.

Setelah peristiwa-peristiwa ini, para pemuda mengundang para pembuat kebijakan setempat untuk menghadiri rapat untuk secara langsung berhadapan muka dan menyampaikan rekomendasi mereka. Hasilnya adalah para gubernur dari beberapa provinsi berjanji untuk mendirikan komite-komite pemuda atau mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemuda.

Pemuda memposting berita, video, dan foto mereka online dan mengungkapkan pendapat mereka pada proyek itu pada situs *The Facebook Good Governance Youth Action* (Aksi Pemuda Pemerintahan yang Baik di Facebook) dan mahasiswa dari dua Soums menciptakan halaman Facebook mereka sendiri yang dihubungkan dengan situs Aimag. Dalam jumlah totalnya, lebih dari 17.100 orang muda dan dewasa telah terlibat dalam intervensi dan kegiatan proyek.

Teknologi TIK baru menjadi populer di antara penduduk Mongolia. Diperkirakan ada 880.000 pengguna Facebook di Mongolia dan 80% dari pengguna itu berusia antara 18-35 tahun. Sebagai bagian dari tujuan pengembangan teknologi informasi, pemerintah Mongolia telah mengadopsi dan telah mengimplementasikan program-program nasional berikut ini, termasuk: Digital Mongolia (2005), Unified information Structure (2008), dan E-governance (2012). Dalam jumlah totalnya, 168 dari 340 Soums telah terkoneksi dengan Internet dengan broadband kecepatan tinggi pada tahun 2012, dan direncanakan bahwa jaringan optik fiber akan mencakup 148 Soums lebih banyak pada akhir tahun 2014. Proyek ini yang akan melihat adanya total 318 Soums terjangkau pada tahun 2014 diimplementasikan dengan pinjaman yang berdiskon dari China. Lima perusahaan, termasuk Telecom Network, sebuah joint venture yang dimiliki oleh pihak swasta dan pemerintah serta perusahaan-perusahaan swasta, Mobicom Corporation, Railcom, Jemnet, dan Skynetwork, telah membangun jaringan optik fiber dengan panjang 18.123,8 km. Lebih dari dua juta orang Mongolia menggunakan telepon genggam.

Pada Globe International Center tujuan strategis kami adalah untuk mempromosikan akses publik terhadap informasi dengan menggunakan semua alat distribusi informasi dan pengetahuan yang mungkin ada, termasuk media tradisional, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baru. Kami menjalankan kegiatan kami di dalam tiga program strategis: Mendukung Hak-Hak Media Independen, Mempromosikan Pemerintahan yang Baik dan Transparan, dan Pemberdayaan Publik melalui Media dan Seni.

Dengan cara-cara ini, memberikan suara kepada mereka yang tidak bersuara merupakan kontribusi kami pada pembangunan berkelanjutan.

BAB 2

MENGAPA POTENSI MEDIA BARU BELUM DITRANSFORMASIKAN KE DALAM REALITAS DEMOKRASI

Toby Mendel

Toby Mendel adalah Eksekutif Direktur di Pusat untuk Hukum dan Demokrasi yang berkantor pusat di Kanada.

Saya akan memfokuskan pada dua isu kunci, pertama, kekuatan media digital untuk mengasuh pemberdayaan dan, kedua, ancaman-ancaman yang disebabkan oleh media digital yang sama terhadap privasi kita.

KEKUATAN MEDIA DIGITAL

Saya sangat mendukung ide bahwa revolusi media digital mempunyai potensi untuk secara radikal mengubah keseimbangan kekuatan dan untuk mengasuh pemberdayaan dan saya telah sering membicarakan dan menuliskan tentang hal ini.

Ketika seseorang mulai dengan dukungan yang kuat seperti itu, selanjutnya hampir pasti akan berjalan dalam arah yang berlawanan. Dan inilah yang akan saya lakukan, dengan menyoroti apa yang saya lihat sebagai halangan utama untuk mewujudkan potensi media digital. Atau, dengan kata lain, untuk menanyakan mengapa potensi media baru belum ditransformasikan ke dalam realitas demokrasi.

Telah ada banyak laporan mengenai bagaimana media digital dan alat-alat komunikasi telah membawa perubahan. Beberapa berupa contoh penting, tetapi secara terbantahkan contoh-contoh itu berupa perkembangan-perkembangan tersendiri (terisolasi) yang pada dasarnya terbatas sifatnya. Dan, dalam banyak kasus, cerita-cerita melibatkan sejarah yang ekstrim, dimana hanya dengan mengekspos masalah dengan menggunakan alat-alat digital menciptakan suatu kemarahan yang kemudian berkontribusi dalam mengalamatkan masalahnya. Namun, kita telah mendengar lebih sedikit tentang kapan media digital telah mengakibatkan perubahan pada dinamika kekuatan tradisional, sesuatu pendapat pemberdayaan yang lebih mendalam dan lebih berjangkauan luas.

Saya ingin menggunakan suatu contoh di Mesir untuk menggambarkan inti pembicaraan saya. Sebagai informasi sampingan, saya berada di Mesir pada tanggal 14 Januari 2011, pada hari dimana diktator Zine El Abidine Ben Ali melarikan diri dari Tunisia, dan saya menghadiri lokakarya regional mengenai kebebasan Internet. Ada euforia di antara kelompok yang menghadiri lokakarya, dan terutama mereka yang berasal dari Tunisia, yakni mereka yang pernah dipenjara oleh Ben Ali, sementara yang lainnya masih hidup dalam pembuangan. Dan sentimen ini pastinya juga dirasakan oleh orang-orang Mesir. Pada saat yang bersamaan, orang-orang Mesir semua bersikeras bahwa apa yang terjadi di Tunisia tidak akan pernah terjadi di negara mereka, tetapi dalam waktu 11 hari kemudian, revolusi Mesir diluncurkan.

Tidak diragukan lagi bahwa yang disebut dengan media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam mengasuh dan mendukung revolusi Mesir dan bahkan mungkin bahwa revolusi ini tidak akan mungkin terjadi atau berhasil tanpa media sosial. Organisasi saya, *the Centre for Law and Democracy* (Pusat untuk Hukum dan Demokrasi), mempunyai seorang yang magang dari Mesir beberapa tahun yang lalu yang sangat terlibat dalam revolusi ini dan yang memiliki sekitar 20.000 pengikut di Twitter.

Namun, media sosial selama revolusi Mesir digunakan secara berlebihan sebagai alat komunikasi yang sangat dasyat, seperti semacam telepon dengan kekuatan besar, daripada sebagai media atau sumber informasi atau sejenisnya. Ini juga terjadi pada pemegang kami, yang menggunakan Twitter untuk menggerakkan, mengarahkan, dan memperingati para pendukung mengenai masalah, daripada memberitakan informasi kepada mereka.

Yang saya perhatikan selama saya bekerja di Mesir setelah revolusi terjadi adalah adanya kesenjangan yang sangat signifikan mengenai bagian dari sebagian besar mereka yang bekerja dengan saya, termasuk para pejabat, aktivis masyarakat sipil, dan pekerja media – dalam hal kemampuan mereka untuk terlibat secara aktif pada isu-isu perubahan yang menarik perhatian mereka. Khususnya pada bidang kebebasan media dan hak terhadap informasi, yakni dua bidang yang menjadi fokus saya, ada kejelasan bahwa perubahan diperlukan, tetapi jauh dari pemikiran bagaimana menyampaikan perubahan itu, bahkan tidak juga dalam pemikiran kebijakan khusus atau penyesuaian praktikal apa yang diperlukan untuk tujuan dua bidang itu. Keadaan ini tidak hanya terjadi pada kelompok yang lemah dan marjinal, tetapi juga bahkan terjadi pada mereka yang secara relatif mengalami pemberdayaan dan terdidik yang bekerja dalam masyarakat sipil.

Mungkin ini kesimpulan yang agak kasar dan sederhana, tetapi seseorang mungkin mengatakan bahwa alat-alat media sosial secara relatif efektif dalam menggerakkan masyarakat pada saat-saat khusus, yakni terjadinya revolusi, dan dalam membawa masyarakat keluar ke jalan-jalan untuk memprotes melawan kediktatoran, tetapi sangat kurang efektif dalam pemberdayaan masyarakat ke dalam hal-hal yang sifatnya lebih nyata.

Bahkan dalam negara-negara dengan demokrasi yang sudah mapan, kita menyaksikan suatu fenomena dimana aktor-aktor yang mempunyai kekuasaan menemukan cara-cara efektif dalam menggunakan alat-alat media digital sehingga dapat memanipulasi proses konsultasi (pemberian nasihat) dan proses lainnya yang ingin mereka kendalikan. Hal ini dapat memberikan kesan dari proses partisipatif sesungguhnya, walaupun prosesnya tidak nyata.

Suatu contoh yang baik dari ide ini adalah balai kota Twitter, yang menjadi semakin populer di antara para elit yang berkuasa. Semua ini tampak seperti latihan demokrasi, dimana bahkan warga negara kelas paling bawah dapat berkomunikasi secara setara dengan seorang menteri atau politisi senior lainnya untuk membahas suatu isu yang lagi hangat dibicarakan. Namun, dalam praktiknya, ini hanyalah ilusi belaka. Dinamika yang tidak dapat dipisahkan dari forum ini adalah bahwa para politisi akan dapat memilih *tweet* atau pesan yang mana yang perlu ditanggapi, sehingga mereka dapat menghindari topik-topik yang sulit dan yang mereka tidak senangi. Lebih lanjut, tidak dapat dihindari bahwa dalam forum seperti ini luasnya keragaman pandangan dapat diungkapkan. Hal ini berarti bahwa para politisi hampir selalu dapat menemukan dasar pendukung untuk apapun keputusan yang mereka ambil sebelum pemilihan ke forum dalam diskusi. Dengan kata lain, seseorang dapat didengarkan, tetapi pemimpin sesi masih sangat mengendalikan perdebatan dan kesimpulannya. Maka tidaklah mengherankan apabila pemerintah sangat tertarik dengan tipe konsultasi seperti ini.

Meskipun ini hanya satu format khusus, sifat media digital dan komunikasi yang sangat demokratis berarti hampir tidak dapat dipisahkan bahwa banyak format mempunyai karakteristik serupa. Setiap orang dapat terlibat dan berpartisipasi, tetapi hampir tidak mungkin untuk menarik suatu tren tertentu atau mengambil kesimpulan jelas dari diskusi ini.

Saya ingin memperkenalkan satu kualifikasi untuk hal ini, yaitu pada tingkat lokal, dimana angka-angka lebih kecil dan kemampuan untuk

mendorong untuk terjadinya perubahan mungkin lebih besar. Suatu contoh yang bagus untuk hal ini adalah kekuatan radio komunitas untuk menyediakan masyarakat setempat dengan suara dan untuk mengakibatkan perubahan pada tingkat itu.

Saya mempunyai tiga anak laki-laki yang berusia 12, 15, dan 17 tahun, secara berurutan – yang semuanya secara relatif terlibat dalam media sosial baik dalam satu tipe media sosial atau tipe yang lainnya. Namun, seperti orang-orang Mesir selama masa revolusi, mereka menggunakan alat-alat ini hampir secara eksklusif untuk tujuan komunikasi, atau kadang-kadang untuk melakukan riset untuk sekolah, daripada untuk memberitahukan diri mereka sendiri untuk tujuan yang lebih terkait dengan pemberdayaan. Bukannya mereka tidak tertarik dengan atau peduli akan isu-isu publik. Dan tentunya bukan karena masalah literasi digital. Ketiga anak saya, bahkan yang masih berusia 12 tahun, jauh lebih melek digital dari pada saya. Melainkan alasannya adalah karena mereka tidak benar-benar merasa bahwa alat-alat ini menyediakan mereka dengan cara yang efektif untuk terlibat dalam proses-proses publik atau dalam mengakibatkan perubahan.

Saya melihat adanya potensi yang sangat besar untuk pengaruh politik masyarakat biasa digunakan melalui alat-alat media digital. Alat-alat ini menyediakan cara-cara yang unik dan mempunyai kekuatan untuk berbagi informasi, meningkatkan kesadaran, dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung maksud-maksud yang layak melawan kepentingan orang-orang berkuasa yang mengharapkan keuntungan. Telah dikatakan bahwa kemajuan pers cetak, yang merupakan pergantian paradigmatik sebelumnya dalam hal penyebaran informasi, secara mendasar mengubah hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Saya rasa kita belum lagi melihat kemunculan bentuk-bentuk baru dalam berbagi informasi dan pergerakan dalam era digital yang dapat benar-benar menantang struktur kekuasaan yang ada. Ketika kita melihat adanya bentuk-bentuk yang baru, saya yakin pemuda akan terlibat.

PRIVASI

Tema saya yang kedua, yakni cara-cara dimana media digital mengancam privasi kita, secara mendasar berbeda sifatnya, tetapi kesimpulan saya tampaknya serupa. Secara ringkas, kesimpulannya adalah bahwa aktor-aktor berkuasa dalam masyarakat menyalahgunakan sistem media dan

komunikasi baru untuk merusak privasi kita, sementara itu privasi digunakan sebagai pedang melawan pemberdayaan tidak hanya para kaum miskin dan marjinal, tetapi juga, misalnya, para orang-orang yang berpendidikan.

Penyingkapan dari Snowden telah membuat jelas bagi semua orang bahwa privasi berada dalam bahaya pada dunia modern. Tetapi menurut pandangan saya sendiri bahaya atau risikonya lebih mendalam dari yang mungkin kita bayangkan. Tentu saja, pendapat saya adalah konsep privasi berada dalam keadaan krisis sekarang ini baik secara hukum maupun secara sosial.

Saya akan mulai dengan meminta anda untuk mendefinisikan, dalam suatu cara yang secara praktis bermakna, apakah privasi itu. Mungkin secara arogan, saya akan menyarankan bahwa anda tidak dapat mendefinisikannya. Ini sedikit tidak adil karena bahkan pengadilan-pengadilan tertinggi dalam kebanyakan negara dan secara internasional tidak lagi mencoba untuk mendefinisikannya. Namun, tantangan untuk memberikan definisi akan privasi sekarang ini telah menjadi semakin tidak mungkin.

Revolusi digital telah secara mendasar menantang pengertian tradisional dari privasi. Usia seseorang selalu menjadi contoh paradigmatik dari sesuatu yang dianggap privasi. Tetapi hanya seorang pertapa digital (orang yang tidak menggunakan digital) yang dapat menyembunyikan usia seseorang di dunia modern.

Tantangan terhadap pengertian tradisional dari privasi tidak berasal dari pengawasan pemerintah yang menindas. Bahkan tantangan tidak berasal dari kenyataan bahwa kita semua telah menjual sebagian besar informasi privasi kita ke Google dan Facebook. Melainkan, tantangan muncul disebabkan oleh adanya arus komunikasi dan informasi yang benar-benar masif oleh aktor-aktor swasta melebihi saluran-saluran publik atau secara relatif publik. Sebagai hasilnya, bahkan pernyataan saya yang sebelumnya bahwa hanya pertapa digital dapat menyembunyikan usia seseorang tidaklah benar. Dalam era digital, usia anda dapat terekspos ke dunia oleh siapapun yang mengetahuinya, walaupun anda sendiri benar-benar seorang pertapa digital.

Konstruksi hukum tradisional dan privasi sosial telah memberikan tanda kegagalan untuk mengikuti perubahan-perubahan ini, dan sering memunculkan halangan-halangan yang hampir tidak masuk akal terhadap keluaran (*outcome*) yang berguna secara sosial. Contoh yang baik dari hal

ini adalah konferensi tahun lalu di Berlin untuk pejabat tinggi pemerintah bidang informasi, seperti penjaga transparansi publik – dari seluruh dunia. Seseorang menanyakan para penyelenggara, yang merupakan para pejabat tingkat tinggi bidang informasi di Berlin dan Jerman, yang juga menjadi pejabat tingkat tinggi swasta dari kedua wilayah itu, untuk daftar peserta. Permintaan ini, yang juga tidak dipercayai oleh hampir semua yang hadir, ditolak dengan alasan bahwa hal itu merupakan suatu pelanggaran dari aturan-aturan perlindungan data di Jerman. Walau terdengar tidak masuk akal, hal itu tampaknya benar secara hukum. Pada akhirnya, disetujui bahwa daftar itu akan dibuat publik tetapi semua orang yang menginginkan hal ini dapat memilih untuk tidak berada dalam daftar itu. Saya mencatat bahwa ini mungkin tidak sehat secara hukum karena, apabila informasinya berupa data yang dilindungi, hal ini memerlukan adanya pilihan secara eksplisit untuk mendapatkan ijin untuk dibagikan ke publik. Dalam kasus apa saja, dokumen yang kita terima pada akhir konferensi mempunyai daftar semua peserta (tidak ada yang dicoret dari daftar), bersama dengan gelar formal mereka, tetapi tidak ada informasi kontak, seperti yang diinginkan semua orang pada awalnya.

Ada banyak contoh lain dari bagaimana privasi digunakan sebagai halangan bagi orang awam untuk mencoba mencapai tujuan-tujuan biasa. Misalnya, privasi telah menjadi salah satu dari alasan yang paling diandalkan untuk menolak menyediakan akses terhadap informasi yang dipegang oleh badan-badan publik. Ada suatu peningkatan akan argumen-argumen privasi yang benar-benar tidak masuk akal yang digunakan dalam konteks ini, seperti rincian-rincian dari apa yang pejabat pesan untuk makanan mereka yang dibayarkan oleh uang rakyat tidak dapat disediakan karena pilihan makanan mereka merupakan suatu yang sifatnya privasi.

Kita mempunyai skala masif pengawasan NSA (*National Security Agency* = Badan Keamanan Nasional) di Amerika Serikat, yang pastinya hanya berupa titik ujung gunung es; kita dapat mengasumsikan bahwa hampir setiap negara lainnya terlibat dalam pengawasan yang serupa, yang tergantung hanya pada keterbatasan pada kapasitas teknis untuk melakukan pengawasan. Dan kita juga mempunyai Google dan Facebook di dunia ini yang membongkar informasi privasi pada kecepatan yang mengejutkan, yang pada dasarnya secepat langkah kita dalam menyediakan informasi itu kepada mereka. Secara signifikan, semua ini dianggap sah secara sempurna. Kegiatan NSA telah disetujui oleh suatu pengadilan (rahasia) pada saat tombol “Saya terima” kita klik untuk bergabung dengan Facebook atau situs media sosial

lainnya, dan hal ini dianggap memenuhi bahkan standar perlindungan data Eropa (karena kita dianggap telah memberikan persetujuan untuk mereka menggunakan data pribadi kita).

Sebagai hasilnya, kita dihadapi dengan situasi dimana pihak yang berkuasa secara tidak tahu malu memanfaatkan informasi pribadi kita untuk berbagai tujuan keamanan dan komersial, sementara itu privasi digunakan untuk mencegah penduduk biasa untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang sangat layak. Oleh karena itu, menurut saya kita perlu untuk secara mendasar mendefinisikan kembali konsep privasi. Kita perlu untuk memfokuskan pada apa yang dapat digambarkan sebagai kepentingan-kepentingan yang nyata atau yang benar-benar privasi, dan kemudian kita perlu menempatkan aturan-aturan dan struktur-struktur yang sehat dan realistis untuk sungguh-sungguh membela kepentingan privasi yang inti ini.

Sampai batas tertentu, saya telah memerankan penasihat yang memberikan ide yang bertentangan, yang menyarankan bahwa, daripada berfungsi sebagai alat-alat untuk pemberdayaan, media digital dan alat-alat komunikasi sungguh-sungguh disalahgunakan oleh orang-orang yang berkuasa terhadap mereka yang tidak hanya tidak mengalami pemberdayaan tetapi juga bahkan penduduk biasa. Saya mengharapkan pernyataan-pernyataan saya ini ditantang.

BAB 3

AKSES TERHADAP INFORMASI: KUNCI DALAM PROSES DEMOKRASI

Moez Chakchouk

Moez Chakchouk adalah Direktur ATI (Tunisian Internet Agency = Agensi Internet Tunisia) di Tunisia.

Pembangunan akhir-akhir ini pada abad ini telah menyoroti realitas bahwa sukses di setiap negara dalam mewujudkan proses demokrasinya tergantung secara dasarnya pada individu. Pada tingkat ekonomi, sosial, atau budaya, kita harus memfokuskan pada hak-hak asasi warga negara untuk kepentingan bersama.

Isu mengenai akses terhadap informasi telah sejak lama menjadi pertempuran yang sedang berlangsung antara masyarakat sipil dan berbagai pemerintah. Di Tunisia, kediktatoran Ben Ali menghasilkan kebijakan kendali penuh atas informasi publik. Namun, hal ini telah menjadi terbalik sejak tahun 2011, ketika kebutuhan akan transparansi dari para gubernur, sangat keras disuarakan oleh masyarakat Tunisia, yang mengarah pada suatu transformasi akan keadaan informasi di negara itu. Hal ini pada akhirnya menghasilkan suatu pasal konstitusi yang unik secara global yang menjamin hak terhadap informasi termasuk akses online.

Setelah mengalami suatu proses transisi demokrasi di Tunisia, kita telah mempelajari bahwa hal yang paling penting yang dapat memungkinkan terjadinya perubahan adalah kebebasan atas akses terhadap informasi dan kebebasan berekspresi. Hak-hak ini penting dalam mengasuh kemampuan manusia dan sosial serta pembangunan ekonomi berkelanjutan yang tidak akan pernah dijamin apabila kita tidak membela kebebasan kita sendiri.

Namun, ketika kita berurusan dengan hak-hak dan akses terhadap informasi, aktor-aktor utama adalah media, karena peran mereka penting dalam membentuk suatu forum dan lingkungan untuk perdebatan di antara para penduduk. Di satu sisi, media merupakan sumber informasi dan kesadaran bagi para penduduk, dan di sisi lain, media merupakan

suara kaum minoritas dan kelompok marjinal, terutama di negara-negara berkembang.

Dengan arus teknologi baru, terutama Internet dan bentuk-bentuk media sosial, tugas media adalah memungkinkan – apabila semua alat-alat ini benar-benar tetap bebas/gratis. Teknologi-teknologi baru telah mengubah cara kita mengungkapkan ide-ide kita dan telah juga lebih lanjut menekankan fakta bahwa akses terhadap informasi dan terhadap Internet yang harganya dapat dijangkau seharusnya menjadi prioritas global utama. Dengan media warisan atau tradisional secara meningkat menghadapi masalah dan penurunan, akanlah penting untuk mengadopsi model ekonomi baru sejalan dengan keberadaan Internet dan online yang menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Internet tidaklah berfungsi sebesar media karena Internet merupakan katalisator pembangunan untuk sektor ini sebagaimana dengan semua teknologi modern.

Internet telah datang mentransformasikan arus utama informasi, membuat informasi semakin cepat dan secara luas dapat diakses. Teknologi ini juga telah memberikan dampak pada kinerja dan kemandirian media warisan. Oleh karena itu, cukup jelas untuk tidak mengkaitkan pengembangan media dengan keterbukaan Internet terhadap pencapaian tujuan-tujuan yang lebih luas dari pembangunan dan demokrasi dengan mempertimbangkan segala forum di bawah payung konvergensi.

Teknologi informasi dan media baru secara dekat terhubung. Sesungguhnya, Internet dan terutama media sosial kadang-kadang merupakan sumber informasi dan juga menyiarkan informasi kepada para hadirin/pendengar/penonton di seluruh dunia. Seterusnya, sebagaimana penjualan koran terus menurun dalam jumlah yang besar, keberlangsungan percetakan di banyak negara mengandalkan pada pengembangan akses terhadap Internet. Oleh karena itu, penting untuk pengembangan media untuk menggalakkan hubungan-hubungan yang berguna antara sektor-sektor yang berbeda dan mengasuh perdebatan antara pemangku kepentingan yang berbeda yang terkait dengan semua isu-isu pemerintahan, agar dapat mencapai tujuan bersama membangun masa depan yang kita semua inginkan untuk generasi-generasi yang akan datang.

Pada isu ini, kita perlu beradaptasi dan memfokuskan pada reformasi yang akan menjamin hak untuk setiap orang untuk secara bebas mengakses informasi dalam bentuk apapun juga. Inisiatif perlu dijalankan

untuk mempromosikan pengadopsian pendekatan model pemerintahan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini akan memperkuat hubungan antara aktor-aktor berbeda dalam cara yang menjamin akses yang setara dan partisipasi untuk mereka semua. Pada akhirnya, hal ini akan mewakili kekuatan yang mendorong yang dapat mengarahkan suatu negara menuju pembangunan keberlanjutan.

Peran utama pemerintah, sektor publik dan swasta adalah untuk memastikan alat-alat akses terhadap informasi tersedia untuk semua dalam bentuk Internet dan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) lainnya. Mereka juga harus bertindak untuk mendukung inisiatif yang inovatif akan bentuk-bentuk media baru dan yang paling penting adalah untuk melakukan usaha lebih untuk terlibat dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia.

Peran media dan perwakilan masyarakat sipil tetap penting dalam menyediakan forum bagi suara-suara warga negara, dan upaya-upaya mereka penting untuk mendorong individu untuk terlibat dalam perdebatan-perdebatan publik. Mereka juga mempunyai peran sebagai pengawas kunci dalam mengawasi dan melaporkan atas isu-isu pemerintahan, dan bekerja untuk mempertahankan kebebasan untuk para warga negara melalui pelatihan pengembangan kapasitas dan kampanye advokasi.

Para jurnalis dari media warisan dan media baru harus menunjukkan diri dan menjamin adanya rasa menghargai terhadap kode etik dan tetap memiliki prinsip dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi ke publik, dan melakukan itu semua tanpa adanya tekanan dari luar atau tidak mengkorupsi pengaruh atau membiarkan diri mereka sendiri dimanfaatkan sebagai alat-alat propaganda atau untuk menjadi penyebarluasan kabar burung. Pola-pola harus mengubah untuk membatasi pengaruh pemerintah atau individu di atas isi media. Demokrasi diukur oleh jumlah media yang bebas, majemuk, dan independen, dan peran masyarakat secara garis besar adalah mempromosikan keamanan para jurnalis dan untuk menyediakan mereka dengan alat-alat untuk melindungi integritas mereka.

Berdasarkan hal di atas, model partisipatif hanya dapat muncul dan berkembang apabila kerangka hukum mengijinkannya. Negara-negara berkembang perlu mengadaptasikan kebijakan mereka, tidak hanya terhadap fasilitasi keterbukaan nasional yang lebih besar dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga dengan mengadaptasikan konstitusi mereka dan undang-undang lainnya serta kode etik pers dan

undang-undang yang mengatur Internet. Semua undang-undang ini seharusnya mempunyai dasar yang sama sebagai hak yang mendasar dari kebebasan untuk akses terhadap informasi, karena sebagian besar halangan dari tujuan ini berasal dari perbedaan-perbedaan antara undang-undang yang mengatur media dan Internet.

Dalam proses transformasi media dan masyarakat secara umum, adalah perlu untuk mendukung and memberdayakan pemuda. Para pemuda merupakan pembawa ide-ide baru dan inovatif; kontribusi mereka hanya dapat menjadi menguntungkan untuk keseimbangan kekuasaan antara sektor media dan pengembangannya. Jadi, aktor-aktor yang peduli seharusnya melakukan upaya mereka dua kali lipat dalam membawa para pemuda ke permasalahan yang sedang hangat, terutama melalui penyediaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mereka menjadi peserta yang terlibat dalam membangun masa depan yang lebih cerah untuk negara mereka.

BAB 4

LITERASI MEDIA UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MENGURANGI KETIDAKSETARAAN GENDER

Lisa French

Lisa French adalah Wakil Dekan di Sekolah Media dan Komunikasi di RMIT University yang telah mempublikasikan dan meneliti perempuan di media secara luas.

Aliansi GAMAG (*Global Alliance on Media and Gender* = Aliansi Global pada Media dan Gender) didirikan sebagai pengakuan bahwa isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan menjadi prioritas pembangunan dalam dekade ke depan. Hal ini merupakan elemen penting dalam pemberdayaan yang akan dicapai melalui pengembangan literasi media baik pada konsumen maupun pada produsen media.

LITERASI MEDIA

Dengan 'literasi media', saya mengacu pada "kompetensi komunikasi" yang kritis dan kreatif, "termasuk kemampuan untuk mengakses, menganalisa, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam variasi bentuk" (*American National Association of Media Literacy* = Asosiasi Nasional Amerika untuk Literasi Media).

Melalui literasi media, terutama yang diperoleh melalui pendidikan media formal, masyarakat mendapatkan kompetensi penting yang memungkinkan adanya pengertian media yang kritis, termasuk pengertian akan cara-cara media "mempunyai kekuatan untuk melawan atau menggalakkan kesetaraan gender", mengutip dari *Background Paper of the Bali Global Media Forum* (Makalah Latar Belakang dari Forum Media Global Bali) (GMF, hlm.10). Oleh karena itu, mempromosikan literasi media akan menjadi penting untuk mencapai tujuan pembangunan dari kesetaraan gender di dalam dan melalui media. Memperluas program pendidikan media, dan melakukan penelitian ke dalam dampak media merupakan elemen penting untuk mencapai pemberdayaan para perempuan dan anak-anak gadis.

Di Sekolah Media dan Komunikasi di RMIT, kami memfokuskan segala macam literasi media yang menopang pengajaran pendidikan media kunci:

- a. Literasi jaringan: “latihan membuat, melakukan, dan berada di dalam ekologi jaringan”
- b. Literasi sosial: “kolaborasi dan kerja tim yang beretika”
- c. Literasi media yang berkembang: “pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan agar dapat menggunakan dan menginterpretasikan media” (Buckingham, 2003, hlm. 36).
- d. Literasi pembelajaran: “pemikiran kritis, keterampilan riset, refleksi, kritik dan umpan balik, keterampilan berkolaborasi”. (Miles dkk., 2007)

Mahasiswa memperoleh semua literasi ini sambil juga mempertimbangkan sumbu-sumbu perbedaan yang meliputi gender, sejarah, ras, kelas, budaya, akses sampai pada teknologi atau pendidikan.

Konsumen yang melek media memahami peran yang dimainkan oleh industri-industri ini dalam membentuk pengetahuan mengenai diri kita sendiri, dan dunia di sekitar kita. Literasi media memungkinkan para individu untuk melawan representasi media yang diinternalisasikan, misalnya, penyebaran penggambaran tubuh yang negatif, atau yang menyebarluaskan pandangan dunia yang bersifat seksime, stereotipe, dan patriarki. Produsen isi literasi media mampu memahami peran, tanggungjawab, dan kekuatan mereka sebagai profesional media.

Media dan literasi jaringan memberdayakan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender dalam beberapa cara. Hal ini termasuk memfasilitasi kefasihan dengan teknologi sehingga dapat memajukan literasi informasi (kemampuan untuk melokasikan, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi). Yang lainnya adalah dengan membantu kebebasan berekspresi yang memungkinkan para perempuan untuk menghasilkan materi yang membuat semakin jelas ketidaksetaraan gender, mendokumentasikan pencapaian dan isu-isu perempuan, dan membuat ekspresi kreatif melalui media menjadi mungkin.

STRATEGI UNTUK MENGEMBANGKAN LITERASI MEDIA

Literasi media dapat mungkin dicapai melalui serangkaian strategi yang meliputi:

- Kemitraan global dan regional: ATOM (*Australian Teachers of Media* = Guru-Guru Media Australia) mengembangkan materi kurikulum yang peka gender, melaksanakan pelatihan dan seminar profesional untuk para guru, dan menghasilkan pedoman studi media dan majalah-majalah media. Keahlian ini dapat dikembangkan di wilayah Asia-Pasifik dan di seluruh dunia.
- Riset: Melaksanakan riset pada keterlibatan perempuan di media, dan halangan-halangan pada akses, memungkinkan pemahaman partisipasi (atau kurangnya partisipasi), dan menyediakan dasar bukti penting untuk melakukan aksi.
- Pendidikan dan Pelatihan: adalah penting untuk menopang pembangunan keterampilan-keterampilan dan hal ini mungkin akan berbentuk beasiswa yang ditargetkan, pemagangan, pengembangan kurikulum, atau kemitraan yang memperluas media komunitas – suatu sektor dimana pelatihan dan akses merupakan ciri khasnya.

Memperluas and berkomitmen pada program-program pendidikan media dan menjamin akses merupakan elemen-elemen penting untuk mencapai pemberdayaan bagi para perempuan dan anak-anak gadis.

PEMBERDAYAAN

Istilah ‘pemberdayaan’ mengacu pada “proses kolektif dan individu para perempuan dan laki-laki yang mempunyai kendali atas hidup mereka, menetapkan agenda mereka sendiri, memperoleh keterampilan, membangun rasa percaya diri, memecahkan masalah, dan mengembangkan keandalan diri sendiri” (UNESCO 2013, hlm.30).

UN Women (2010) telah menggarisbawahi tujuh elemen kunci yang memfasilitasi pemberdayaan perempuan: kepemimpinan, kesempatan yang setara, tempat kerja yang aman, menjamin kesehatan, keamanan, dan kebebasan dari kekerasan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan wirausaha, kepemimpinan dan keterlibatan komunitas, dan transparansi dalam pengukuran dan pelaporan.

Elemen-elemen yang diidentifikasi oleh *UN Women* (2010) dapat diambil sebagai pedoman yang berguna untuk memikirkan tentang strategi pemberdayaan literasi media. Pertama-tama, pemimpin

yang melek media, terutama mereka dalam organisasi media, dapat memberdayakan para perempuan melalui promosi representasi media yang tidak diskriminatif, menjamin kesetaraan gender dan peningkatan partisipasi melalui inisiatif-inisiatif seperti target-target gender, menjaga dukungan tingkat tinggi untuk perempuan, dan polisi yang peka gender (semua ini mendorong partisipasi perempuan dan kemungkinan dapat mempromosikan pemberdayaan perempuan).

Kedua, partisipasi dan retensi perempuan ditingkatkan dengan mengadopsi kesempatan yang merata di tempat kerja dengan memprioritaskan kebijakan inklusi dan tidak diskriminatif melalui inisiatif seperti remunerasi yang setara, perekrutan yang peka gender, dan tempat kerja yang fleksibel. Peningkatan partisipasi perempuan kemungkinan akan menghasilkan penggambaran yang beragam, dan dalam representasi yang menggambarkan perempuan setara dengan laki-laki (misalnya, sama-sama kompeten dan berhasil dalam berbagai karir dan industri).

Pada akhirnya, tempat kerja yang aman, dimana kesehatan, keamanan, dan kebebasan dari kekerasan merupakan suatu ciri khas, akan mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam media, dan oleh karena itu memungkinkan perempuan yang mempunyai media literasi untuk bekerja di media. Pendidikan mempunyai peran yang signifikan untuk dimainkan tidak hanya dalam mengembangkan media, online, dan literasi lainnya, tetapi juga memandang gender sebagai suatu isu misalnya menyatakan bahwa ada masalah dan isu gender yang perlu dialamatkan. Hal ini merupakan tantangan pembangunan yang signifikan.

PERAN MEDIA DALAM MEMBANGUN BUDAYA DAMAI

Media mempunyai potensi untuk berkontribusi pada 'budaya damai', yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa didefinisikan sebagai "serangkaian nilai-nilai, sikap, modus tingkah laku, dan gaya hidup yang menolak kekerasan dan mencegah dengan menyelesaikan penyebab-penyebab akar untuk memecahkan masalah melalui dialog dan negosiasi di antara individu, kelompok, dan bangsa-bangsa" (United Nations, 1999). Elemen-elemen penting di dalam konsepsi PBB yang mengutamakan 'budaya damai' ini adalah untuk bekerja menuju pada terjaminnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan juga untuk mengasuh partisipasi yang demokratis.

Kegunaan dari media sosial yang telah ditentukan menyediakan contoh-contoh

dari cara-cara dimana budaya damai dimungkinkan. Sampai saat ini, media sosial telah meningkatkan akses bagi para perempuan dan memungkinkan adanya demokrasi yang lebih leluasa dan keragaman suara-suara serta menyediakan forum-forum untuk isu-isu perempuan. Sebagai contohnya, aktivis hak-hak asasi manusia Rosebell menuliskan blog yang berisi analisa mandiri yang ditulisnya sendiri akan isu-isu yang terkait dengan pelanggaran hak-hak perempuan di Uganda, dan blog ini telah menciptakan kesadaran dan komunikasi dari isu-isu ini, terutama dengan orang-orang muda (United Nations, 2011). Sebagaimana tercatat di dalam *GMF Background Paper* (Makalah Latar Belakang Forum Media Global), secara meningkat, “bentuk-bentuk digital dan media sosial yang lebih baru memberikan perempuan suara untuk menentukan nasib sendiri dan mengungkapkan pendapatnya sendiri”, dan di beberapa negara “media sosial menyediakan forum yang efektif untuk hak-hak perempuan” (2014, hlm.10).

Namun, tidak semua negara mempunyai akses terhadap teknologi dan oleh karena itu menjembatani ‘kesenjangan digital’ ini (dimana sebagian negara mempunyai teknologi yang bagus dan canggih, dan sebagian lainnya tidak mempunyai teknologi yang bagus dan canggih) penting untuk pembangunan dan memungkinkan budaya damai. Akses terhadap teknologi tidak hanya memungkinkan berekspresi tetapi juga merupakan sumber pengetahuan, yang merupakan kekuatan. Kurangnya akses terhadap internet dan parahnya literasi (termasuk literasi media) menciptakan ‘kesenjangan digital’ dan merupakan halangan untuk kesetaraan sosial dan ekonomi.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, literasi media merupakan strategi pembangunan yang penting dengan sendirinya. Inisiatif literasi media akan mengurangi ketidakadilan gender di sistem, struktur, dan isi media, dan oleh karena itu memberdayakan perempuan. Hal ini akan terjadi melalui kepemimpinan, pendidikan, dan penelitian, serta melalui peningkatan akses perempuan terhadap informasi dan kebebasan berekspresi. Semua ini akan menjamin bahwa suara-suara perempuan didengarkan, dan hal ini akan mempromosikan partisipasi penuh perempuan dalam masyarakat secara global. Literasi media akan mengembangkan kapasitas, dan dengan peningkatan kapasitas akan ada pilihan dan kebebasan.

REFERENSI

- American National Association of Media Literacy webpage; tersedia pada: <http://name.net/publications/media-literacy-definitions/>
- Buckingham, D., (2003), *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture (Pendidikan Media: Literasi, Pembelajaran, dan Budaya Kontemporer)*, Polity: Cambridge.
- GMF (Global Media Forum), 'Background Paper' (Makalah Latar Belakang), (2014): *'The Role of Media in Realizing the Future We Want for All'* (Peran Media dalam Mewujudkan Masa Depan yang Kita Inginkan untuk Semua) disediakan untuk para delegasi Forum Media Global 25 – 28 Agustus, Bali – Indonesia.
- Miles et al: RMIT University, (2007), 'Post Industrial Media' (Pasca Media Industri); tersedia pada: http://media.rmit.edu.au/projects/pim/index.php/Main_Page
- UNESCO, (2013), *UNESCO Priority Gender Equality Action Plan For 2014-2021 (Rencana Aksi Kesetaraan Gender Prioritas UNESCO untuk tahun 2014-2021)*, UNESCO: Paris; tersedia pada: <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/GENDER/GEAPENGLISHFINAL.pdf>
- United Nations, (1999), UN Resolutions A/RES/52/13: Culture of Peace and A/RES/53/243, Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace (Budaya Damai dan A/RES/53/243, Deklarasi dan Program Aksi untuk Budaya Damai). [Lihat ringkasan yang bermanfaat dari Budaya Damai pada: http://www3.unesco.org/iycp/uk/uk_cp.htm]
- United Nations, (2011), *Using Social Media to Promote Human Rights (Menggunakan Media Sosial untuk Mempromosikan Hak-Hak Asasi Manusia)*, <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/InternetFreedom.aspx> Diakses pada tanggal 15/3/15.
- UN Women, (2010), *Women's Empowerment principles/Equality means business (Prinsip Pemberdayaan perempuan/Kesetaraan berarti bisnis)*; tersedia pada: [http://www.unwomen.org/~media/Headquarters/Attachments/Sections/Partnerships/Businesses and Foundations/Women-s-Empowerment-Principles_en.pdf](http://www.unwomen.org/~media/Headquarters/Attachments/Sections/Partnerships/Businesses_andFoundations/Women-s-Empowerment-Principles_en.pdf)

BAB 5

JURNALIS PEREMPUAN INDONESIA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Uni Z. Lubis

Uni Z Lubis, seorang jurnalis Indonesia, yang juga menjalankan program dalam pelatihan jurnalisisme perempuan, adalah dua kali anggota Dewan Pers Indonesia, satu-satunya perempuan yang berada dalam Dewan ini selama empat dekade.

Pada tahun 1903, Raden Ajeng Kartini menuliskan sebuah surat kepada Menteri Keadilan Belanda:

“... bagaimana mungkin para perempuan Jawa sekarang ini mendidik anak-anak mereka jika mereka sendiri tidak berpendidikan? Pendidikan dan pembangunan orang-orang Jawa tidak akan pernah secara memadai maju apabila para perempuannya tidak dilibatkan, apabila mereka tidak diberikan suatu peranan yang dapat mereka mainkan dalam hal ini”.

Kami, di Indonesia, kemudian mempelajari isi surat ini yang diberi judul: *“Give the Javanese Education (Berikan Orang-Orang Jawa Pendidikan)”*. Kartini, (21 April 1873 - 17 September 1904) terkenal sebagai pendidik perempuan pertama Indonesia. Dia lahir di Jepara, Jawa Tengah bagian Utara, dan ayahnya adalah Bupati Jepara. Tidak seperti anak-anak gadis lain dalam keluarga bangsawan pada saat itu, Kartini diijinkan oleh ayahnya untuk belajar di sekolah dasar di sekolah berbahasa Belanda. Koleksi surat-surat Kartini untuk Nyonya Abendanon, berjudul ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’, dipublikasikan dan menerima pujian dimana-mana. Dalam surat-suratnya, Kartini berbagi ide-idenya mengenai bagaimana perempuan Indonesia perlu diberdayakan.

Kartini bukanlah seorang jurnalis, tetapi dia merupakan penulis perempuan pertama yang dikenal dari Indonesia. Dan semangat yang dia bagikan, terutama tentang pentingnya pendidikan perempuan dan bagaimana mereka, para ibu, mempunyai posisi yang strategis dalam memajukan keluarga, masih memberikan inspirasi kepada perempuan lainnya. Sekarang ini, aktivis perempuan, termasuk jurnalis, juga mengkritik Kartini karena menerima poligami dalam pernikahan dia

dengan suaminya, tetapi hal itu tidak mengurangi nilai kontribusinya untuk pemberdayaan perempuan selama masa kolonisasi Belanda.

Jurnalis perempuan pertama Indonesia adalah Rohana Kudus (20 Desember 1884 - 17 Agustus 1972). Dia lahir di Agam, Sumatera Barat, dan juga dikenal sebagai aktivis perempuan. Rohana Kudus tidak pernah menempuh pendidikan formal, tetapi ayahnya mengajarkan dia tentang bahasa dan pengetahuan.

Kudus mendirikan satu sekolah pada tahun 1911, dan kemudian mempublikasikan koran *Sunting Melayu* pada tahun 1912. Koran ini memfokuskan pada isu-isu perempuan dan dia menjabat sebagai Kepala Editor.

Sekolah yang didirikan oleh Rohana Kudus mengajarkan para perempuan kerajinan tangan dan keterampilan-keterampilan diluar tugas biasa mereka di rumahtangga. Rohana menerima dukungan dari suaminya yang membela dia terhadap kritikan dari masyarakat akan pemberdayaan perempuan lainnya. Sekolah itu bernama Sekolah Kerajinan Amal Setia, dan menjadi pusat untuk para pekerja seni yang bekerja dengan pemerintah Belanda dalam penjualan karya mereka di kota-kota besar dan di luar negeri. Sekolah ini merupakan satu-satunya produsen kerajinan tangan pada saat itu yang memenuhi standar pembelian internasional.

Jurnalis perempuan yang paling dikenal dari generasi Indonesia terkini adalah Soerastrī Karma (11 Mei 1912 – 20 Mei 2008). 'Trimurti' atau 'Karma' merupakan slogan Soerastrī dalam artikel-artikel yang dia tulis. S.K Trimurti dikenal sebagai seorang guru, penulis, dan jurnalis, dan kontribusinya signifikan dalam Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Soerastrī pernah dipenjara selama sembilan bulan di Penjara Bulu, Semarang, Jawa Tengah, karena mendistribusikan selebaran yang memprotes terhadap penguasa kolonial oleh Belanda.

S.K Trimurti pernah bekerja untuk beberapa surat kabar dan bersikap kritis terhadap penguasa kolonial. Kemudian S.K Trimurti menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama Indonesia pada tahun 1947 – 1948 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin.

Karena Kartini, Rohana Kudus, SK Trimurti dan lainnya, pemberdayaan perempuan menjadi suatu kepedulian inti, dan kita, sebagai generasi terkini, telah terinspirasi oleh tokoh-tokoh itu. Jurnalis Indonesia,

terutama para perempuan, percaya bahwa pemberdayaan perempuan di media dapat dicapai melalui pembukaan akses terhadap pendidikan dan pendekatan bahasa & pengetahuan untuk para perempuan.

Sebagaimana dinyatakan dalam dokumen latar belakang dari Forum Media Global Bali, akses terhadap dan penyebaran informasi dan pengetahuan adalah hal yang imperatif untuk pembangunan. Dan media yang bebas, profesional, dan independen tidak dapat diabaikan untuk tujuan ini.

Beberapa wilayah dan topik terkait dengan hal ini telah didiskusikan dalam banyak pelatihan dan lokakarya untuk jurnalis perempuan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers Indonesia, dan beberapa organisasi media profesional, seperti Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI), Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) serta Forum Jurnalis Perempuan Indonesia.

Mengatasi rintangan budaya dan stereotipe masih dianggap sebagai tantangan yang signifikan, demikian juga dengan pelecehan seksual baik di ruang berita maupun dalam menjalankan tugas di lapangan. Kesenjangan pembayaran dan tunjangan gender serta kurangnya fasilitas yang mendukung seperti ruang untuk menyusui bayi dan kamar untuk bayi buat para jurnalis perempuan dengan anak, masih merupakan beberapa rintangan yang mereka hadapi. Di daerah, terutama wilayah-wilayah terpencil, isu keamanan bagi jurnalis perempuan dalam melakukan pekerjaan mereka telah menjadi sorotan utama dalam diskusi sebagai salah satu yang dipedulikan.

Dalam ruang berita, jurnalis perempuan di Indonesia telah menjadi lebih bersaing berdasarkan pada keterampilan dan pengetahuan mereka. Lebih banyak perempuan telah berhasil mendobrak halangan dan berada pada posisi redaksi ruang berita paling atas. Namun, tekanan bisnis, seperti rating, jumlah yang mendatangi dan mengklik halaman, dan juga persaingan peredaran, untuk mencakup isu-isu perempuan dari sudut pandang yang lebih sensasional, masih menjadi suatu tantangan untuk para editor perempuan. Ini termasuk peliputan korupsi dan kekerasan terhadap perempuan.

Pelatihan untuk jurnalis perempuan (dan laki-laki) pada isu-isu yang terkait dengan Tujuan-Tujuan Pembangunan Pasca tahun 2015 masih diperlukan, dan juga kapasitas untuk menggunakan teknologi informasi untuk mengakses informasi. Dalam era digital ini, dimana sejumlah besar orang mengkonsumsi informasi dari online dan media sosial, kebutuhan untuk menyusun agenda,

mengambil sudut pandang yang benar, serta menyajikan paket berita untuk mendorong keterlibatan yang lebih besar dengan para pendengar/penonton/pembaca, menjadi semakin penting dari sebelumnya.

Menurut Riset Media Nielsen tahun 2013, orang Indonesia masih mengkonsumsi informasi utamanya dari televisi, terutama dari sepuluh stasiun TV milik swasta yang bersiaran secara nasional. Sekitar 90% masyarakat mendapatkan informasi mereka dari televisi, 27-30% dari Internet, terutama media online yang beroperasi berdasarkan standar-standar media utama. Sumber informasi tingkat ketiga adalah radio, dengan sekitar 20% pendengar, kebanyakan orang setempat; sementara itu, pembaca media cetak telah menurun sampai pada 12-13% dalam lima tahun terakhir.

Keadaan di atas perlu diingat ketika merancang acara-acara pelatihan jurnalisme, yang meliputi jurnalis perempuan, sehingga mereka secara lebih baik dipersiapkan untuk menghadapi isu-isu Pasca tahun 2015, terutama yang terkait dengan gender dan pemberdayaan perempuan. Lebih penting lagi, hal ini akan memungkinkan mereka untuk menampilkan konten jurnalistik yang lebih baik kepada penonton/pendengar/pembaca yang berubah.

Dewan Pers Indonesia mulai memfokuskan pada pemberdayaan jurnalis perempuan pada tahun 2011. Serangkaian lokakarya pelatihan di Jakarta, serta di kota-kota di daerah telah dilaksanakan, tetapi karena keterbatasan anggaran, Dewan Pers hanya menyelenggarakan lima sampai enam acara per tahun untuk jurnalis perempuan. Pelatihan ini memfokuskan pada peliputan konflik dan bencana dari perspektif gender dan juga isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Mengidentifikasi berita terkait dengan isu-isu Pasca tahun 2015 dan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan juga dialamatkan dalam lokakarya ini.

Kegunaan informasi dan teknologi untuk membantu kerja jurnalis, termasuk perbaikan penggunaan jurnalisme data, telah juga menjadi bagian dari pelatihan yang dirancang oleh Dewan Pers pada tahun 2011-2013. Sebagai kepala Komisi Dewan Pers Bidang Pelatihan dan Pengembangan Profesional Jurnalis pada saat itu, saya menganggap hal ini sebagai prioritas, sejalan dengan semangat bahwa kaum perempuan seharusnya dibiarkan mengakses pendidikan ilmu alam, teknologi, teknis, dan matematika dalam konteks global.

Pemahaman teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta isu-isu konseptual dan praktikal, dapat mendukung jurnalis perempuan

dalam menggunakan jurnalisme data untuk menceritakan cerita yang meyakinkan. Sayangnya, pelatihan TIK belum berlanjut karena rintangan dalam anggaran. Namun, kami berharap perusahaan dan organisasi media untuk menyediakan pelatihan TIK untuk jurnalis mereka, lebih khususnya jurnalis perempuan.

Saat ini, ada kira-kira 30.000 jurnalis di Indonesia. Hanya kira-kira 1000 (dimana sepertiganya adalah perempuan) dari mereka dapat memperoleh akses terhadap pelatihan setiap tahun. Tidak ada data yang tepat yang tersedia, tetapi hal ini berdasarkan pada survei cepat dari 30 organisasi media utama. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan persentase lebih tinggi dari partisipasi perempuan dalam media.

Dalam karir mereka, banyak jurnalis perempuan berhenti di tengah jalan karena berbagai alasan, dan fleksibilitas lebih besar di tempat kerja diperlukan untuk mengakomodasi mereka. Para jurnalis yang bekerja pada media online dapat melakukan pekerjaan mereka dari rumah sambil mengasuh anak-anak mereka. Pada media cetak, hal ini mungkin terjadi juga. Dalam budaya Indonesia, penopang keluarga, suami dan orangtua, juga memberikan keuntungan pada para jurnalis perempuan yang mempunyai keadaan istimewa itu. Sekarang ini, lebih banyak perempuan mampu lulus berbagai tes dan menjadi jurnalis, dan mereka tentunya mempunyai kemampuan yang setara dengan rekan kerja laki-laki mereka.

Dalam diskusi pada forum jurnalis perempuan, kita sepakat bahwa status perempuan di perusahaan-perusahaan seharusnya merefleksikan kesetaraan. Masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan, tetapi lebih banyak perusahaan memperlakukan karyawan perempuan mereka lebih baik; misalnya, asuransi, yang beberapa tahun yang lalu hanya diberikan kepada pekerja laki-laki, sekarang diberikan ke perempuan juga.

Dalam ruang berita, beberapa jurnalis perempuan mengakui bahwa mereka harus bekerja keras dua kali lipat pada awal-awal karir mereka, untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki. Penghinaan verbal masih terjadi, misalnya, ketika perempuan memberikan alasan karena keluarga mereka untuk tidak pergi bekerja. Hal ini tidaklah terjadi ketika laki-laki melakukan hal yang sama.

Dalam beberapa 'lokasi panas', wilayah konflik, seperti Ambon, Poso, Aceh dan Papua, isu-isu keamanan untuk jurnalis perempuan menjadi penting. Pemantauan kerja mereka di wilayah-wilayah itu penting

dilakukan karena mereka dapat menjadi target tindakan kekerasan juga. Jurnalis perempuan di Papua juga menghadapi kesulitan dan satu jurnalis setempat berbagi pengalamannya harus menaiki sepeda motor dalam kondisi dan wilayah berbahaya, untuk meliputi cerita.

Jurnalis di Medan, Aceh, dan Manado membentuk Forum Jurnalis Perempuan Indonesia untuk menyediakan forum bagi jurnalis perempuan untuk mengalamatkan tantangan-tantangan yang ada. Medan, ibukota Sumatera Utara, merupakan tempat dimana pada tahun 1919, 'Perempuan Bergerak', suatu surat kabar untuk perempuan, dipublikasikan untuk pertama kalinya. Hal ini memberikan inspirasi kepada para jurnalis perempuan di Medan untuk membentuk Forum Jurnalis Perempuan Indonesia yang sekarang mempunyai sekitar 100 anggota dan telah memotivasi para kolega mereka di Aceh dan Manado, Sulawesi Utara, untuk melakukan hal yang sama.

Jalan masihlah jauh untuk membantu para jurnalis perempuan untuk memajukan kemampuan dan persaingan mereka. Namun, setidaknya prosesnya telah dimulai. Mendukung isu-isu perempuan melalui media sosial dapat juga menjadi cara yang efektif untuk mencapai penonton/ pendengar/pembaca.

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mengeluarkan suatu standar kerja untuk jurnalis perempuan. Beberapa hal yang seharusnya disediakan oleh perusahaan media meliputi perlindungan dari perlakuan diskriminatif dan pelecehan seksual baik di kantor maupun di lapangan. Standar kerja yang layak juga diperlukan untuk memenuhi hak-hak reproduksi perempuan, misalnya, dengan memberikan satu hari untuk tidak bekerja ketika seorang perempuan mendapatkan mens, dan tiga bulan cuti kelahiran sebagaimana diatur oleh hukum. Transportasi, ruang-ruang untuk merawat bayi untuk para ibu dengan bayi, serta asuransi kesehatan dan kesejahteraan juga telah disoroti.

Lebih dari setengah dari 250 juta populasi Indonesia adalah perempuan. Untuk memberdayakan mereka berarti memberdayakan suatu bangsa. Tidak hanya, sebagaimana yang R.A Kartini katakan seabad yang lalu, 'karena perempuan merupakan pendidik pertama di keluarga', tetapi juga karena jumlah mereka yang sangat besar di negara ini. Gagal memberdayakan perempuan merupakan kerugian besar bagi bangsa kita, Indonesia, dan tentunya bagi dunia juga. Jurnalis perempuan mempunyai peranan kunci untuk dimainkan.



BAGIAN II

BAGAIMANA MEDIA DAPAT MEMFASILITASI PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN EFEKTIF?

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik benar-benar kritis untuk pembangunan berkelanjutan dalam suatu negara. Apabila iklim untuk pembangunan demokrasi memungkinkan, memberikan tempat yang leluasa untuk bebas berpendapat, akses terhadap informasi, dan kebebasan media, maka kemungkinan besar pemerintah akan terbuka terhadap transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan sebaik mungkin dari sumber daya. Hal ini berarti bahwa lingkungannya kondusif untuk para warga negara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah mereka, dan untuk diri mereka sendiri tidak hanya menjadi peserta dalam pembangunan mereka sendiri, tetapi juga menjamin bahwa kebutuhan mereka terpenuhi melalui pemerintah yang tanggap akan kebutuhan mereka.

Media yang bebas, majemuk, dan independen, yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan etika, merupakan hal yang penting untuk memfasilitasi pemerintahan yang baik dan efektif dalam suatu negara dan mempromosikan pemerintahan yang tanggap. Dengan mengakses teknologi media baru untuk memberikan suara yang lebih luas kepada warga negaranya, dan menggabungkan dengan jurnalisme investigatif yang tajam dan jelas, penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya dapat disingkapkan, dan pemerintah dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui peran media sebagai pengawas. Hal yang paling kritis terhadap peran media dalam memfasilitasi pemerintahan yang baik dan efektif adalah pertanyaan apakah jurnalis mampu melakukan pekerjaan mereka dengan aman.

Dalam seksi ini, **Guy Berger**, Direktur Divisi Kebebasan Berekspresi dan Pengembangan Media di UNESCO, memfokuskan pada kebutuhan akan keamanan bagi jurnalis. Apabila para jurnalis tidak dapat bekerja dengan bebas karena rintangan fisik dan rintangan lainnya, maka pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan tidak akan terjadi. Guy Berger memberikan argumen bahwa pemerintah merupakan penghubung antara keamanan jurnalis dan pembangunan.

Pendiri/editor dan sekarang Kepala Namibia Media Trust, yang memiliki surat kabar, **Gwen Lister**, menyampaikan perspektif Afrika bagian selatan dan membicarakan pentingnya jurnalisme investigatif yang mematuhi aturan-aturan profesionalisme dan etika untuk pemerintahan yang baik dan efektif.

Maria Ressa, CEO dari Rappler.com, melihat pada bagaimana teknologi mengubah cara kita berpikir, berkomunikasi, dan bertindak. Menurut Maria Ressa, jika dimanfaatkan dengan tepat, teknologi dapat memberikan kekuatan yang besar kepada jurnalis untuk melakukan lebih dari sekedar menceritakan berita untuk menggerakkan para penonton/pendengar/pembaca untuk bertindak. Dengan cara ini, media independen dapat membawa makna baru pada demokrasi partisipatif.

Prima Jesusa Quinsayas, seorang penuntut swasta dan pengacara yang sangat berpengalaman dalam jurnalisme dan hukum, berurusan dengan pertanyaan yang sulit akan impunitas, dimana dia memberikan argumen bahwa impunitas mempunyai posisi yang kuat di Filipina dan membuat semua warga negara rentan.

BAB 1

UNTUK PEMBANGUNAN, PASTIKAN KEAMANAN UNTUK PARA JURNALIS

Guy Berger

Guy Berger adalah Direktur Divisi Kebebasan Berekspresi dan Pengembangan Media, UNESCO.

Pembangunan merupakan satu hal, dan penyerangan terhadap jurnalis adalah hal lain. Namun, ada hubungan di antara keduanya, dan hubungannya lebih dalam daripada yang mungkin dipikirkan oleh orang-orang. Dan karena hubungan ini, kita tidak dapat mengharapkan adanya pembangunan yang berkelanjutan atau berkeadilan dalam masyarakat kecuali jurnalis mampu melakukan kerja mereka dengan aman.

Setiap orang tahu bahwa salah satu pelanggaran hak kebebasan berekspresi yang terburuk adalah ketika jurnalis mendapatkan ancaman atau penyerangan fisik. Akan tetapi yang kurang jelas adalah bagaimana hal ini berdampak secara langsung pada pembangunan.

Yang menghubungkan keamanan dan pembangunan adalah “pemerintahan”.

Bayangkan suatu segi tiga antara “pembangunan”, “jurnalisme”, dan “pemerintahan”. Kinerja yang optimal pada setiap aspek di atas dapat berkontribusi pada penguatan yang lainnya. Namun, kelemahan dalam satu aspek juga mempengaruhi kemungkinan pada aspek lainnya. Untuk memahami ini, anda perlu menyelusuri hubungan di antara aspek-aspek itu.

PEMERINTAHAN MENGHUBUNGKAN PADA PEMBANGUNAN

Ada perdebatan mengenai makna “pemerintahan” – yang kadang-kadang disebut “pemerintahan yang efektif” dan “pemerintahan yang baik”. Akan tetapi, menurut Dewan Hak-Hak Asasi Manusia PBB, isu kunci adalah apakah pengaturan kekuasaan masyarakat dapat secara efektif menjamin “hak atas kesehatan, perumahan yang memadai, makanan yang cukup, pendidikan yang berkualitas, keadilan yang adil, dan keamanan pribadi?”¹²

¹² <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx>

Pandangan ini diperkuat oleh laporan dari Panel Tingkat Tinggi PBB dari Pejabat Penting pada Agenda Pembangunan Pasca tahun 2015. Panel ini diketuai bersama oleh Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia, Presiden Ellen Johnson Sirleaf dari Liberia, dan Perdana Menteri David Cameron dari Britania Raya. Lapornya menyebutkan media sebanyak 20 kali, dan laporan ini menyediakan kerangka holistik untuk memikirkan pemerintahan dalam hal masyarakat menjamin kebebasan berekspresi, kesadaran, dan asosiasi, bersama dengan partisipasi warga negara, di antara elemen-elemen yang ada.¹³

Pada akhirnya, “pemerintahan” memutuskan apakah suatu negara telah memenuhi tanggungjawabnya untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan mengakui kemajemukan politik.

Secara setara, “pemerintahan” adalah mengenai apakah suatu negara transparan dan akuntabel, dan apakah suatu negara mempunyai sektor publik yang efisien dan efektif. Elemen kunci lainnya adalah “aturan hukum”, yang berarti suatu sistem dimana tidak ada satu orang pun yang berada di atas hukum, dan dimana setiap orang berhak atas keadilan.

Apabila anda menyatukan ide-ide ini, mudah untuk melihat mengapa pemerintahan merupakan syarat yang benar-benar diperlukan untuk pembangunan yang optimal. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sulit untuk membayangkan kemajuan manusia dalam masyarakat yang melanggar hak-hak asasi manusia dan menekankan kemajemukan. Hal yang sama juga terjadi pada suatu masyarakat dengan pelayanan sipil yang tidak berfungsi dengan baik atau kepemimpinan yang tidak melakukan apapun untuk menghentikan korupsi.

Pemerintahan juga mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti pertumbuhan yang memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang ini tanpa mengorbankan generasi di masa depan. Intinya adalah perluasan ekonomi tidak dapat berlangsung lama apabila pemerintahan hanya menguntungkan beberapa pihak, atau apabila perluasan ekonomi itu mengorbankan hak-hak asasi manusia dan lingkungan alam.

¹³ United Nations. 2013. *A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development: The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda (Kemitraan Global Baru: Memberantas Kemiskinan dan Mentransformasikan Ekonomi melalui Pembangunan Berkelanjutan: Laporan Panel Tingkat Tinggi dari Pejabat Penting pada Agenda Pembangunan Pasca tahun 2015)*. New York: UN Publications.

TUJUAN-TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Hubungan antara pemerintahan dan pembangunan diakui dalam suatu dokumen tahun 2014 yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengusulkan “Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” (SDG) pada komunitas internasional. SDG akan menggantikan “Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium” yang telah disepakati secara universal yang merupakan target yang dicapai pada akhir tahun 2015, dan yang telah mencapai keberhasilan di beberapa bagian dunia.

Untuk SDG, dokumen PBB tahun 2014 ini menyatakan: “Pemerintahan yang baik dan aturan hukum pada tingkat nasional dan internasional merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, pembangunan yang berkelanjutan, dan pemberantasan kemiskinan dan kelaparan.”

Dokumen ini merefleksikan perjanjian dari sekitar 40 pemerintah, yang dipilih oleh Majelis Umum PBB sebagai “Kelompok Kerja Terbuka” untuk mengusulkan “Agenda Pembangunan Pasca Tahun 2015”. Setelah satu setengah tahun konsultasi, kelompok ini menyepakati 17 tujuan-tujuan untuk dicapai oleh negara-negara di dunia pada tahun 2030.

PBB terus membahas proposal ini pada tahun 2015, dan juga bagaimana mencapai, memantau, dan memberikan laporan mengenai SDG. Namun, sebagian besar isi dari proposal ini secara luas diharapkan untuk menemukan perjanjian secara umum. Sekretaris Jenderal PBB telah meminta semua anggota negara untuk mempertahankan 17 tujuan, walaupun pembahasan tentang hal-hal yang bersifat teknis masih berlangsung, yakni pembahasan mengenai apakah perlu menggabungkan beberapa tujuan, atau apakah beberapa sub-tujuan dapat dihilangkan atau dianggap sebagai indikator.

Kelompok Kerja Terbuka dalam pembahasan SDG yang disarankan mencakup tujuan-tujuan, seperti: mengakhiri kemiskinan yang ekstrim pada tahun 2030, mengurangi ketidaksetaraan, menurunkan tingkat kematian, menjamin pendidikan universal, mengakhiri diskriminasi gender, memerangi perubahan iklim, dan menjamin energi yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi untuk semua pihak.

[0]. Tersedia pada: http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf. Diakses pada tanggal 05/02/2014.

Yang mempunyai relevansi khusus dengan “pemerintahan’ adalah Tujuan 16. Tujuan ini mengusulkan bahwa untuk pembangunan untuk terjadi, dunia seharusnya: “Mempromosikan masyarakat damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua pihak, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif pada semua tingkat.

Seharusnya sudah jelas bahwa tujuan ini menopang pencapaian semua tujuan lainnya. Tanpa perdamaian dan inklusi semua orang dalam pembangunan, kemanusiaan akan mengalami kemunduran, bukan kemajuan. Tanpa lembaga-lembaga yang berjalan dengan baik, dan tanpa sistem untuk hukum dan keadilan yang efektif, tidak akan ada kemajuan di bidang-bidang seperti pertumbuhan ekonomi, kesehatan, atau pendidikan.

Intinya adalah pemerintahan merupakan kunci untuk Tujuan 16, dan tujuan ini merupakan kunci untuk semua tujuan lainnya. Jadi, apa hubungan hal ini dengan keamanan jurnalis? Mohon terus membaca makalah ini.

AKSES TERHADAP INFORMASI DAN KEBEBASAN PERS

Tujuan 16 mencakup sub-tujuan atau target yang penting. Yang pertama adalah 16.10, yang mengatakan bahwa pemerintah seharusnya “menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan yang mendasar, sesuai dengan legislasi nasional dan perjanjian internasional”.

Untuk UNESCO, “akses terhadap informasi” merupakan bagian dari hak yang lebih luas dari kebebasan berekspresi. Hak ini tercantum dalam Pasal 19 dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk *mencari* dan *menerima* informasi. Hak yang sama dari kebebasan berekspresi juga mencakup sisi lainnya, yaitu hak untuk menyebarkan informasi.

Adalah jelas dengan sendirinya bahwa masyarakat tidak dapat mencari dan menerima – dengan kata lain, mempunyai akses terhadap – informasi, apabila ada belenggu dalam memproduksi informasi itu. Dan tidak ada gunanya mencoba untuk menyebarkan informasi apabila orang-orang dihalangi dalam menerima informasi itu. Dua dimensi ini berjalan bersama. Secara bersama-sama, dua hal ini merupakan syarat yang diperlukan untuk arus bebas informasi – yang penting untuk masyarakat untuk membuat keputusan terdidik mengenai pembangunan.

Untuk UNESCO hak atas informasi berarti kita juga harus mempertimbangkan hak kebebasan pers – keduanya merupakan aspek saling terkait dari hak asasi kebebasan berekspresi.

Pada Konferensi Umum ke 37 UNESCO, negara anggota organisasi mengaplikasikan perspektif ini pada SDG. Mereka mengenali “pentingnya mempromosikan kebebasan berekspresi dan akses universal terhadap pengetahuan dan pemeliharaan akses ini – termasuk, di antaranya, melalui media yang bebas, majemuk, dan independen, baik *offline* (luar jaringan) maupun *online* (dalam jaringan) – sebagai element yang tidak dapat dihilangkan untuk demokrasi yang berkembang dan untuk mendorong partisipasi warga negara.” Dan mereka menghimbau agar hal ini direfleksikan dalam agenda pembangunan pasca tahun 2015.¹⁴

Setelah menetapkan bahwa akses terhadap informasi dan kebebasan pers merupakan kunci untuk jenis pemerintahan yang SDG prediksikan, kita sekarang dapat menyelusuri bagaimana semua ini terkait dengan keamanan jurnalis.

KEAMANAN JURNALIS DAN ATURAN HUKUM

Pandangan UNESCO atas kebebasan berekspresi mencakup keamanan jurnalis, sebagaimana disoroti dalam laporan *World Trends in Freedom of Expression and Media Development (Tren-Tren Dunia dalam Kebebasan Berekspressi dan Pengembangan Media)*,¹⁵ yang diluncurkan di Asia selama Forum Media Global pada tahun 2014.

Tanpa keamanan jurnalis, tidak akan ada media yang bebas, majemuk, dan independen. Keamanan adalah penting untuk hak jurnalis untuk menyediakan informasi tanpa merasa takut akan keamanan dan hidup mereka – dengan kata lain, untuk melaksanakan hak mereka atas kebebasan pers. Keamanan para jurnalis juga merupakan hak warga negara atas akses terhadap informasi. Jurnalis sering menghadapi serangan-serangan keras dari orang-orang yang ingin membuat informasi tertentu tetap tersembunyi. Tindakan yang tidak ramah ini membahayakan hak mendasar masyarakat untuk tetap terdidik.

¹⁴ In Resolution 64(v). <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226162e.pdf>

¹⁵ <http://www.unesco.org/new/en/world-media-trends>.

Ketika jurnalis dibunuh atau diintimidasi, arus informasi menjadi kering – dan pembangunan dapat tertunda atau terganggu. Sebaliknya, dengan melindungi jurnalis masyarakat menjamin bahwa mereka bisa mendapatkan informasi yang mereka perlukan untuk membentuk pembangunan mereka.

Keamanan jurnalis juga relevan dengan tiga sub-tujuan lainnya di bawah Tujuan 16 – yang mengusulkan bahwa seharusnya ada target-target pembangunan untuk:

- secara signifikan mengurangi semua bentuk kekerasan dan tingkat kematian yang terkait dengan kekerasan dimana pun
- mempromosikan aturan hukum pada tingkat nasional dan internasional, dan menjamin akses setara terhadap keadilan untuk semua pihak
- memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk mengembangkan kapasitas pada semua tingkat, terutama dalam negara berkembang, untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme dan kejahatan.

Pertempuran untuk mencegah kekerasan dan kejahatan, dan untuk mempromosikan aturan hukum, adalah bersifat relevan untuk setiap warga negara. Namun, karena media dapat terlihat dengan jelas, ketika jurnalis menjadi korban intimidasi atau kekerasan, hal ini menjadi isu publik yang besar, dan ketika impunitas diberlakukan – berarti bahwa pelaku kejahatan tidak akan dibawa ke pengadilan.

Kurangnya penerapan aturan hukum pada serangan-serangan terhadap jurnalis menjadi suatu lambang akan bagaimana aturan hukum mengatasi kejahatan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia secara lebih umum. Ketika pembunuh jurnalis diberikan impunitas atas tindakan mereka, makna yang ditunjukkan disini adalah pembunuh secara garis besar dapat melakukan tindakan mereka tanpa takut adanya konsekuensi.

Intinya adalah serangan-serangan terhadap jurnalis, dan cara dimana serangan tersebut tidak dihukum berdasarkan hukum, mempunyai pengaruh buruk yang luas.

Akibatnya adalah membungkam jurnalis lainnya serta masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang berfungsi sebagai sumber-sumber untuk jurnalisme. Hal ini mengarah pada adanya penyensoran sendiri yang menyebar yang pada akhirnya membuat masyarakat kekurangan berita dan pandangan yang diperlukan untuk membuat keputusan.

Pengacara, hakim, penuntut, dan asosiasi mereka peduli utamanya dengan keadilan bukan jurnalisisme – tetapi mengatasi masalah keamanan jurnalis dapat membuat mereka menyelesaikan masalah yang lebih besar. Adalah signifikan dalam konteks ini bahwa Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi pada tahun 2013 untuk menetapkan tanggal 2 November setiap tahun sebagai ‘Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas untuk Kejahatan terhadap Jurnalis’.¹⁶

Hari ini memberikan kesempatan untuk memfokuskan pada bagaimana aturan hukum berdampak pada keamanan jurnalistik, dan sebaliknya.

Ini adalah kesempatan untuk memberitahukan masyarakat secara garis besar bahwa kekerasan pidana tidak akan ditoleransikan, dengan poin awal yang logis menjadi prioritas untuk kasus-kasus yang melibatkan jurnalis, yakni kasus-kasus dari korban dengan profil-profil publik dan mereka yang diserang karena kerja publik mereka.

Untuk mencegah serangan-serangan, lindungi para jurnalis dan hukum para pelaku penyerangan, dan suatu kerangka kerjasama telah muncul, yang disebut Rencana Aksi PBB mengenai Keamanan Jurnalis dan Isu Impunitas.¹⁷ Rencana ini menghimbau untuk peningkatan dan kerjasama aksi-aksi tentang keamanan di dalam sistem PBB, serta kerjasama dengan badan-badan antar-pemerintah lainnya, pemerintah, masyarakat sipil, akademia, dan media. Adalah suatu inisiatif untuk memperkuat keamanan dan aturan hukum, dan oleh karena itu memperkaya pembangunan yang berkelanjutan.

Kesimpulannya, keamanan jurnalis terkait dengan Tujuan 16, dan Tujuan itu terkait dengan pemerintahan, yang pada akhirnya diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan.

BERKAMPANYE UNTUK MEMBUAT KONEKSI

Tujuan 16 menekankan pada isu-isu akses terhadap informasi, perang melawan kekerasan, dan penguatan aturan hukum. Selain itu, Tujuan 16 juga menghimbau perlindungan kebebasan mendasar secara umum.

¹⁶ http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/hrc_resolution_september_2014.pdf

¹⁷ <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/un-plan-of-action/>

Pengakuan ini telah sangat kuat didukung oleh UNESCO, yang telah menyoroti peran untuk pembangunan berkelanjutan dari kebebasan berekspresi, serta hak-hak atas pendidikan, budaya, dan pembangunan.

UNESCO juga telah menghimbau untuk penyebutan langsung akan hak atas kebebasan berekspresi di SDG. Pada bulan November 2014, sesi ke 29 Dewan antar-pemerintah dari Program Internasional untuk Pembangunan Komunikasi (IPDC) UNESCO mengungkapkan kekecewaan bahwa “tidak ada acuan yang khusus untuk hak kebebasan berekspresi dan informasi dan hasil alamiahnya, kebebasan media.”¹⁸ Dewan IPDC mendesak Negara Anggota UNESCO untuk menjamin bahwa kebebasan berekspresi, media bebas, independen, dan majemuk, dan pengembangan media diintegrasikan ke dalam Agenda Pembangunan Pasca Tahun 2015. Suatu laporan yang diberikan ke Dewan menjabarkan bagaimana kebebasan berekspresi adalah alat dan tujuan akhir terkait dengan pembangunan berkelanjutan.¹⁹

Deklarasi Paris akan Hari Kebebasan Pers Dunia pada tahun 2014²⁰ dan Bali Road Map (Pedoman Bali)²¹ juga merupakan hal yang signifikan. Diadopsi pada acara-acara yang diadakan oleh UNESCO, dokumen-dokumen ini meminta Direktur Jenderal Irina Bokova UNESCO untuk berbagi isinya dengan Sekretaris Jenderal Ban Ki-Moon.

Dalam pengakuan penerimaan pernyataan-pernyataan itu pada tahun 2015, Ban Ki-Moon mengkomunikasikan kembali kepada UNESCO bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan pers, media independen, dan hak atas akses terhadap informasi merupakan hal-hal yang sangat penting, dan seharusnya tidak dilupakan dalam pertimbangan-pertimbangan pasca tahun 2015 yang tengah berlangsung.

Pejabat tingkat tinggi PBB juga mengeluarkan sebuah laporan pada akhir tahun 2014, berjudul “*the Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet* (Jalan menuju Kewibawaan pada tahun 2030: Mengakhiri Kemiskinan, Mentransformasi Semua Kehidupan, dan Melindungi Planet Bumi)”. Laporan ini mengakui bahwa banyak makalah yang diserahkan untuk perdebatan pembangunan

¹⁸ http://www.unesco-ci.org/cmscore/aggregator/es/communication-and-information/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/IPDC/ipdc29_EN_Decision1_Post-2015.pdf

¹⁹ <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002300/230042E.pdf>

²⁰ http://www.unesco-ci.org/cmscore/aggregator/es/communication-and-information/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/WPFD/2014/wpfd_2014_statement_final.pdf

²¹ http://bali-gmf.com/wp-content/uploads/2014/09/BALI_ROAD_MAP_FINAL.pdf

pasca tahun 2015 “menghimbau untuk memperkuat pemerintahan yang efektif, akuntabel, partisipatif, dan inklusif; untuk kebebasan berekspresi, informasi dan asosiasi yang bebas; untuk sistem keadilan yang adil; dan untuk masyarakat yang damai dan keamanan pribadi untuk semua pihak.”

Selain UNESCO, banyak kelompok masyarakat sipil telah berkampanye agar PBB membuat hubungan yang eksplisit antara kebebasan berekspresi dan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, suatu koalisi internasional telah menghimbau untuk hal ini di dalam Deklarasi Nairobi pada Agenda Pembangunan Pasca Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh GFMD (*Global Forum for Media Development* = Forum Global untuk Pengembangan Media) untuk benua Afrika.²²

GFMD adalah badan internasional yang membawa bersama-sama lebih dari 200 aktor pengembangan media, dan organisasi ini telah mendukung UNESCO untuk mempin pemantauan atas indikator-indikator yang relevan dari kebebasan berekspresi dalam agenda pasca tahun 2015.²³

UNESCO siap untuk membantu dalam merekam jejak kemajuan kegiatan ini, dan memberitahukan Majelis Umum PBB akan kegiatan ini, selama 15 tahun ke depan. Organisasi ini telah mengumpulkan serangkaian informasi yang relevan, termasuk tentang keamanan jurnalis, yang secara langsung relevan dengan pemantauan dan pelaporan pada Tujuan 16 di SDG dan sub-tujuannya.

KESIMPULAN

Hubungan-hubungan antara pembangunan dan keamanan jurnalis mungkin bersifat kompleks, tetapi hubungan ini kuat. Hubungan ini saling terkait melalui isu pemerintahan, dan hubungan tersebut penting untuk SDG melalui Tujuan 16. Tetapi tidak semua orang dapat melihat koneksinya. Ada kebutuhan yang besar untuk lebih meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kebebasan berekspresi dan keamanan jurnalis untuk pembangunan. Apabila koneksi-koneksi ini tidak dapat dilihat oleh setiap orang, kita berisiko mengupayakan pembangunan dalam kegelapan. Siapa yang mau melakukan itu?

²² <http://gfmnd.info/en/site/news/721/The-Nairobi-Declaration-on-the-Post-2015-Development-Agenda.htm>

²³ <http://gfmnd.info/>

BAB 2

JURNALISME INVESTIGATIF MEMBERIKAN PENERANGAN DALAM TEMPAT-TEMPAT YANG GELAP

Gwen Lister

Gwen Lister merupakan editor pendiri dari surat kabar Namibia dan Kepala Namibia Media Trust.

Jurnalisme investigatif yang baik merupakan hal yang penting dalam meminta pertanggungjawaban pihak yang berkuasa. Banyak yang telah mengatakan hal ini sebelum saya, dan beberapa telah menyatakannya dengan lebih baik. Walter Lippman menyatakannya dengan baik, hampir sekitar seabad yang lalu, ketika dia menyamakan jurnalisme yang hebat dengan “sinar lampu sorot yang bergerak dengan kegelisahan, membawa satu episode dan kemudian membawa yang lainnya, keluar dari kegelapan dan menuju cahaya terang”.

Dan apabila kita menerima bahwa ini benar adanya, bagaimana keadaan jurnalisme investigatif di dunia sekarang ini dan apa yang kita dapat lakukan untuk memajukannya dalam kepentingan memfasilitasi pemerintahan yang baik dan efektif?

Beberapa sangat bersemangat. Sheila Coronel dari Pusat Jurnalisme Investigatif Filipina adalah salah satunya. Dia menulis dalam artikel terbaru pada the Nation bahwa kita hidup dalam era yang dia sebut “masa keemasan jurnalisme investigatif”.

Yang lainnya lebih bersikap ragu-ragu. “Kita kehilangan mata dan telinga kita di sekitar dunia tepatnya ketika kita sangat memerlukan mata dan telinga kita”, kata ICIJ (*International Consortium of Investigative Journalists* = Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional) yang mengacu pada fakta bahwa media semakin dipincangkan oleh jarak waktu perhatian yang pendek, kurangnya sumber daya, dan pembubaran atau kurangnya tim investigatif. Dan, saya menambahkan bahwa kekurangan dan bahaya sama-sama membahayakan praktik yang baik dari jurnalisme investigatif. ICIJ, yang menghubungkan lebih dari 100 jurnalis di negara-negara berbeda di seluruh dunia untuk melakukan penyelidikan mendalam, cukup akurat ketika organisasi ini menambahkan bahwa “kebutuhan

untuk jurnalisme investigatif tidak pernah lebih besar daripada masa sekarang ini dengan globalisasi dan pembangunan memberikan tekanan yang sangat besar pada masyarakat, menyebabkan ancaman-ancaman yang sangat besar dari korupsi, industri yang terpolusi, jaringan kejahatan transnasional, negara-negara bajangan, dan aksi-aksi pihak berkuasa dalam bisnis dan pemerintahan’.

Penting untuk dicatat bahwa jurnalisme investigatif bukan hanya mengenai kejahatan dan korupsi. Sebagai jurnalis investigatif veteran, David Kaplan telah menunjukkan bahwa jurnalisme investigatif yang hebat seharusnya juga memfokuskan pada pendidikan dan penyalahgunaan kekuasaan, di antaranya. Dan alasan apa yang lebih baik untuk jurnalisme investigatif daripada permintaan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkuasa dan dalam melakukan hal tersebut juga mempromosikan pemerintahan yang baik?

Namun, juga benar untuk mengatakan bahwa mempraktekkan jurnalisme investigatif lebih sulit dalam masyarakat yang tidak bebas dibandingkan dengan dimana pun juga. Oleh karena itu, penting untuk melihat pada cara-cara bagaimana para jurnalis investigatif di negara-negara yang tidak bebas itu dapat didukung dalam menjalankan tugas-tugas yang sering sangat berbahaya.

MENGAPA KORUPSI SANGAT PENTING UNTUK DIPERANGI DAN APAKAH EFEK-EFEKNYA?

Korupsi memberikan dampak terburuk pada orang miskin dan ada sedikit keraguan bahwa korupsi mempunyai konsekuensi yang sangat parah pada agenda pembangunan dengan merusak pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan dan juga menghalangi pemerintahan yang baik. Terutamanya yang paling parah terkena dampak korupsi ini adalah negara-negara yang sudah dianggap kurang berkembang, dan beberapa di antaranya berada di Afrika bagian selatan.

UNECA (*Union Advisory Board on Corruption document on the anti-corruption programme for Africa* = Badan Penasihat Perkumpulan tentang Dokumen Korupsi pada Program Anti-Korupsi untuk Afrika) mengakui bahwa keterlibatan media adalah sangat penting dalam memerangi pihak-pihak yang merugikan atau menyengsarakan orang lain. UNECA juga sepakat bahwa agensi-agensinya anti korupsi di benua Afrika dianggap

lemah, kebanyakan tidak independen, miskin dana, dan tidak menerima dukungan dari kepemimpinan politik.

Kita tidak dapat melupakan juga bahwa media merupakan cerminan dari masyarakat dimana mereka beroperasi, dan di beberapa negara Afrika, Malawi adalah salah satu contohnya, jurnalis disana kebanyakan mereka sendiri dicurigai melakukan korupsi atau mereka dikenal dengan 'amplop coklat', dan ini adalah suatu fenomena yang media harus perangi dari dalam. Namun, sudah bisa dipastikan mengenai pentingnya jurnalisisme investigatif dalam mempromosikan suatu lingkungan yang bebas korupsi.

APA YANG MEDIA DAPAT LAKUKAN MENGENAI KORUPSI?

Penyungkapan korupsi dapat lebih lanjut mencegah perilaku yang salah. Semakin terdidik dengan tepat para masyarakat sipil, pemilih, dan konsumen akan korupsi yang melibatkan uang rakyat, semakin kecil kemungkinan kekayaan publik diboroskan, yang pada akhirnya akan mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang positif.

Media independen terutama penting dalam perang melawan korupsi: Seberapa sering seseorang pernah mendengar bahwa media yang dimiliki atau dijalankan oleh negara menyingkapkan korupsi dalam pemerintahan tempat mereka bekerja? Tidak sering, bahkan tidak sama sekali.

Di Angola, seorang jurnalis dan aktivis hak-hak asasi manusia, Rafael Marques de Morais, pernah diadili dengan tuduhan pencemaran nama baik yang bersifat pidana, dan sering menghadapi risiko pribadi karena usahanya dalam mengungkapkan praktek-praktek korupsi, dalam wilayah-wilayah konflik berlian dan industri minyak serta kebrutalan pasukan bersenjata Angola. Melalui blognya, Maka Angola, Rafael telah menjadi suara yang penting pada topik korupsi dan dia telah memberikan inspirasi kepada lainnya disana untuk berkampanye agar ada lebih besar transparansi di negara itu.

APABILA MEDIA TIDAK AKAN MELAKUKAN, TIDAK MELAKUKAN, ATAU TIDAK DAPAT MELAKUKANNYA, SIAPA YANG AKAN MELAKUKANNYA?

Dana-dana yang dicuri mempunyai dampak yang sangat besar pada

masyarakat, terutama pada komunitas-komunitas miskin dan marjinal. Beberapa negara Afrika seperti Namibia mempunyai komisi anti-korupsi, tetapi komisi-komisi itu sering kekurangan sumber daya dan kurang dana dan hanya memfokuskan pada hal-hal yang kecil. Adalah sudah jelas di negara saya bahwa media hanya menyentuh ujung gunung es dalam menyingkapkan korupsi dan hal ini secara cepat menjadi masalah yang sering ditemukan di negara ini.

RINTANGAN-RINTANGAN PADA PELAPORAN KORUPSI

Masih ada banyak rintangan-rintangan pada pelaporan korupsi di berbagai bagian di dunia. Ada bahaya yang selalu menghadang para jurnalis dalam menjalankan hak mereka melaporkan korupsi. Angka kematian jurnalis yang tinggi, serta impunitas yang diberlakukan untuk para pelaku, merupakan penghalang yang sangat besar terhadap jurnalisme investigatif, dan banyak jurnalis takut untuk mempraktekkan jurnalisme investigatif karena alasan di atas.

Ada peningkatan anggaran ruang berita dan kurangnya sumber daya untuk melakukan penyelidikan. Beberapa dari semua ini meliputi: 1) kekurangan jumlah staf sehingga hanya sedikit pekerja di media; 2) miskinnya remunerasi untuk banyak jurnalis berarti mereka sering menyerah kepada kejahatan yang seharusnya diperangi oleh media; 3) adanya kurang kerjasama dengan pejabat-pejabat publik, yang bersembunyi di belakang rahasia dan undang-undang pencemaran nama baik yang bersifat pidana, dan; 4) akses terhadap pelatihan, yang perlu untuk meningkatkan kemandirian, kapasitas, dan profesionalisme dalam media, serta untuk memerangi penyensoran sendiri, juga terbatas di banyak negara.

JADI BAGAIMANA MEDIA DAPAT DIBERDAYAKAN UNTUK MENYINGKAPKAN KORUPSI?

Jurnalis investigatif baik dalam media warisan atau dalam media online secara terus menerus bertempur untuk dapat mengakses informasi, terutama dalam negara-negara dimana undang-undang mengenai Kebebasan Informasi tidak ada. Namun, para jurnalis ini berkontribusi pada dimungkinkannya para pihak yang berkuasa dimintai pertanggungjawaban mereka dan berkontribusi pada pemerintahan yang baik dengan menyingkapkan ketidakefisiensian, pencurian, dan penyalahgunaan

kekuasaan, serta dengan menyediakan informasi semacam ini kepada warga negara, hal ini membantu mereka menjadi lebih diberdayakan untuk membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik.

Kebebasan mengeluarkan pendapat dan media merupakan hal yang tidak dapat dinegosiasikan untuk suatu lingkungan dimana pelaporan investigatif dapat benar-benar berkembang. Dan kebebasan-kebebasan ini harus diterapkan secara merata pada baik jurnalis tradisional maupun jurnalis online serta warga negara secara umum agar dapat secara efektif meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Agar dapat melaporkan korupsi secara efektif, lingkungan yang memungkinkan perlu untuk mendukung kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, dan pers independen. Akses terhadap informasi merupakan kunci untuk transparansi dan akuntabilitas publik, dan pada tempat-tempat tanpa undang-undang kebebasan informasi, hal ini akan menjadi tugas yang menakutkan, bahkan menjadi tugas yang tidak mungkin dilakukan. Di Swaziland, para jurnalis secara terus menerus berperang dalam hal ini; dan berurusan dengan pemerintah yang tidak mempercayai media independen, secara lebih lanjut menghalangi kerja investigatif di wilayah-wilayah yang benar-benar bermasalah (sehingga menjadi penting untuk diberitakan).

Penyelidikan cenderung menjadi sangat giat di negara-negara dimana terdapat undang-undang tentang akses terhadap informasi. Di Afrika Selatan, media menggunakan undang-undang ini secara ekstensif untuk mendapatkan informasi dari negara dan sektor swasta. Hal ini telah menghasilkan banyak penyelidikan dan banyak kebijakan akibat kegiatan penyelidikan ini serta perubahan lainnya. Suatu penyelidikan yang terkenal adalah kasus Nkandla yang melibatkan Presiden Jacob Zuma dan pengeluaran negara yang tidak sah atas rumah pribadinya. Kasus ini tentunya telah membantu menempatkan pusat perhatian publik pada penyalahgunaan sumber daya publik.

Tanpa undang-undang mengenai akses, peraturan-peraturan penyiksaan yang kejam sering digunakan oleh pemerintah untuk mencegah penyelidikan yang terperinci, sehingga membatasi kapasitas media untuk menjalankan fungsi akuntabilitas publiknya. (Adalah signifikan untuk mengetahui bahwa Namibia, misalnya, yang dianggap oleh *Freedom House and Reporters sans Frontiers* (Rumah Kebebasan dan Wartawan tanpa Batas) sebagai negara yang 'paling bebas' dalam hal media di Afrika, berada pada urutan sangat rendah dalam hal akses terhadap informasi sebagaimana hasil survei yang

dilaksanakan oleh APAI [*African Platform on Access to Information* = Forum Afrika untuk Akses terhadap Informasi]).

Media itu sendiri perlu memiliki standar tertinggi untuk kinerjanya apabila media harus memberikan dampak dalam menjamin pemerintahan yang baik. Hal ini memerlukan pentingnya ketaatan pada kode etik, peraturan yang dibuat sendiri dan untuk diri sendiri, dan profesionalisme.

Undang-undang keamanan nasional, undang-undang pencemaran nama baik yang bersifat pidana, dan undang-undang fitnah tertulis semuanya memberikan dampak yang mengerikan dan membuat jurnalisme investigatif menjadi sangat mahal dalam hal proses pengadilan. Beberapa organisasi terus berkampanye tanpa henti untuk pertarungan mereka di benua Afrika dan lebih lanjut di wilayah lainnya.

Keamanan jurnalis merupakan prasyarat yang harus ada untuk kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan media dan ini perlu dilindungi. Impunitas harus dihapuskan ketika pekerja media dibunuh atau disakiti. Jurnalis tidak dapat melakukan kerja mereka secara profesional dan dengan kemampuan mereka yang terbaik apabila hidup dan keamanan mereka selalu berada dalam ancaman.

PENTINGNYA MEMFASILITASI JURNALISME INVESTIGATIF

Berdasarkan kepatuhan pada skenario yang disebutkan di atas untuk suatu lingkungan yang memungkinkan dimana jurnalisme investigatif dapat hidup dan berkembang, adalah penting juga untuk melihat pada cara-cara dan alat-alat dimana jurnalisme investigatif dapat dimajukan.

Di Afrika, telah ada pergerakan menuju pada penciptaan unit-unit penyelidikan spesialis. Walaupun saya secara pribadi percaya bahwa semua jurnalisme seharusnya bersifat investigatif, untuk memperdalam dan memajukan profesionalisme, keterampilan dan keahlian khusus sering diperlukan untuk 'menggali lebih mendalam', dan untuk pelaporan yang kompleks dan seringkali memakan banyak waktu.

Pengakuan akan kebutuhan ini telah menghasilkan penciptaan unit-unit yang dikhususkan pada surat-surat kabar di Afrika bagian selatan, serta niat untuk bekerja secara lebih kolaboratif daripada 'kerja sendirian' karena sedikitnya jumlah staf dan terbatasnya anggaran. Wartawan Sahara, orang

muda Nigeria yang berada dan bekerja di AS, serta AmaBhungane pada *Mail and Guardian* di Afrika Selatan merupakan contoh yang baik dari beberapa inisiatif ini, dan ada desakan yang lebih lanjut untuk mendirikan lebih banyak unit di berbagai negara Afrika bagian selatan. Suatu agensi yang baru terbentuk ANCIR (*African Network of Centres for Investigative Reporting* = Jaringan Pusat-Pusat Afrika untuk Pelaporan Investigatif) juga bertujuan untuk memfokuskan pada mekanisme untuk pelaporan investigatif yang berkelanjutan dan berkelas dunia pada benua Afrika.

Saya telah menyebutkan ICIJ lebih awal pada makalah ini dan kebutuhan yang telah teridentifikasi untuk penyelidikan silang perbatasan. ICIJ telah melakukan banyak penyelidikan dengan dampak global dan ini mencakup para jurnalis Afrika. Jenis jurnalisme ini mahal dan juga berisiko, dan ICIJ telah melaksanakan banyak penyelidikan besar ke dalam korupsi, penyingkapan lingkungan, isu-isu kemiskinan dan kesehatan dan akuntabilitas. Satu contoh, 'Makan Malam dan Transaksi Bisnis' menyoroiti sisi lain dari hak-hak asasi manusia dan pemerintahan yang baik pada Konferensi Tingkat Tinggi AS-Afrika tahun 2014 untuk kepentingan transaksi bisnis dan perusahaan, serta pengungkapan terkini, yakni 'Swiss Leaks' (Kebocoran di Switzerland) yang merupakan skema penghindaran pajak global yang sangat besar.

KEBUTUHAN AKAN DUKUNGAN PUBLIK

Adalah sangat penting untuk media mendapatkan dukungan publik dan memperoleh rasa percaya dari komunitas mereka sehingga masyarakat sipil juga secara penuh terlibat dalam memerangi korupsi dan menyadari pentingnya dan dampaknya pada komunitas mereka sendiri apabila korupsi tidak diselidiki.

Di Namibia, penyingkapan media atas suatu skandal melibatkan kerugian sekitar 30 juta dari Komisi Jaminan sosial dalam transaksi yang ceroboh, telah berlangsung lama selama bertahun-tahun dan beberapa dari semua pihak yang bertanggungjawab sekarang ini berurusan dengan pengadilan, walaupun ini terjadi pada banyak tahun setelahnya. Sekali lagi kasus ini dan kasus lainnya yang berupa kasus korupsi tingkat tinggi telah membantu menyadarkan masyarakat Namibia akan efek korupsi pada pembangunan.

Karena seringkali ada kekurangan keberlanjutan pada tindak lanjut media ketika korupsi telah diungkapkan, majalah bulanan Namibia, Insight, membawa Perekam Jejak Korupsi, yang mencatat korupsi yang dilaporkan dalam media dan mengikuti terus penyingkapan kasus-kasus ini sampai pada akhirnya kasus-kasus ini diselesaikan.

Adalah penting bahwa masyarakat sipil dibujuk secara global untuk mendukung kampanye untuk kebebasan informasi dan kebebasan akses agar dapat mempromosikan jurnalisisme investigatif untuk memerangi korupsi dan mempromosikan pemerintahan yang baik. Ini perlu ditekankan, dan perwujudannya harus dilaksanakan di negara sendiri dan bahwa hak-hak ini tidak hanya mengenai media, tetapi bahwa isu-isu pemerintahan mempengaruhi setiap orang, paling utamanya para warga negara, dan suara-suara masyarakat harus bebas didengarkan sehingga mereka dapat melaksanakan hak-hak mereka dan mempunyai pendapat dalam pembangunan mereka sendiri.

BAB 3

JURNALISME, TEKNOLOGI, DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Maria A. Ressa

Maria Ressa adalah CEO dari Rappler, penulis buku 'From Bin Laden to Facebook' (Dari Bin Laden ke Facebook), dan kepala jaringan televisi terbesar Filipina.

Kita hidup dalam dunia fiksi ilmiah, dan poin intinya adalah media sosial, yang memperkenalkan efek-efek jaringan teknologi kepada semua orang. Media sosial ini mengubah cara kita berpikir, cara kita berkomunikasi, dan cara kita bertindak.

Jika dimanfaatkan secara tepat, media sosial dapat memberikan para jurnalis kekuatan yang lebih besar dan mengizinkan kita untuk melakukan lebih dari sekedar memberitakan cerita, yaitu benar-benar menggerakkan para penonton/pendengar/pembaca untuk bertindak. Di dunia ini, media independen merupakan langkah pertama terhadap adanya pemerintahan yang baik karena dengan memanfaatkan aksi kolektif, kelompok berita dapat membawa makna baru bagi demokrasi partisipatif.

MEDIA SOSIAL DAN CROWDSOURCING (SUMBER DAYA KERUMUNAN)

Perubahan pertama adalah perubahan pribadi: media sosial mempunyai efek fisiologi yang khas dan dapat diukur pada orang-orang yang menggunakan media sosial ini. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat menyebabkan ketagihan ringan karena secara nyata media sosial dapat mengubah susunan zat kimia dalam tubuh seseorang, mempengaruhi emosi.

Penggunaan media sosial meningkatkan tingkat dopamin,²⁴ zat kimia yang

²⁴ "The Role of Dopamine in Social Media (Peran Dopamin dalam Media Sosial)," ComputerWeekly.Com, 26 November 2009. Tersedia pada <http://www.computerweekly.com/blogs/enterprise-social-software/2009/11/the-role-of-dopamine-in-social.html>

menyebabkan ketagihan, serta hormon-hormon lain seperti oksitosin, yang dijuluki “hormon cinta.”²⁵ Hal ini dapat diidentifikasi penelitian melalui scan otak atau fMRI (*Functional Magnetic Resonance Imaging* = Penggambaran Resonansi Magnet Fungsional). Emosi kita dipacu oleh zat kimia dan hormon dalam tubuh kita, dan menggunakan media sosial memutarbalikan emosi kita dengan mengubah tingkat zat kimia dalam otak kita. Karena emosi menjadi meningkat, tingkah laku dapat berubah.

Bagaimana hal ini mempengaruhi konsumsi berita? Teknologi yang kita gunakan telah membuat kita berada terus dalam tingkat emosi tinggi yang abadi dan mengubah susunan zat kimia dalam otak kita, memberikan alasan fisiologis mengapa jurnalisme tabloid telah menjadi norma secara global: interupsi-interupsi dalam kehidupan era modern membanjiri otak kita dengan zat-zat kimia seperti dopamin dan mengkondisikan kita untuk menyukai “sensasi” lebih daripada “objektifitas.”²⁶

Hal itu mengarah pada alat teknologi berikutnya yang memberikan kemungkinan: *crowdsourcing* (sumber daya kerumunan), ketika setiap peserta mengambil satu aksi kecil yang memungkinkan kolaborasi pada skala yang jauh lebih besar. Suatu contoh yang gampang adalah Wikipedia, yang merupakan ensiklopedia online yang memanfaatkan sumber daya kerumunan dan tidak membayar penulis, peneliti, atau editor. Semua orang, dimana saja di seluruh dunia, dapat menuliskan suatu entri, dan ketika seseorang memperhatikan adanya kesalahan, siapapun bisa memperbaikinya. Bandingkan itu dengan *Encyclopedia Britannica* (Britannica Ensiklopedia), yang mempekerjakan banyak orang untuk menciptakan dan memeriksa dengan teliti isinya, tetapi pada rata-ratanya suatu studi peninjauan sejawat tahun 2005 mengatakan bahwa ensiklopedia ini memiliki hampir sama jumlah kesalahannya dengan Wikipedia.²⁷

Dalam banyak cara, anda dapat memberikan argumen bahwa kelompok berita merupakan pemimpin yang sempurna dari upaya yang menggunakan sumber daya kerumunan untuk memberikan dampak pada masyarakat.

²⁵ “The ‘Love Hormone’ Drives Human Urge for Social Connection (Hormon Cinta Mendorong Keinginan Manusia untuk Koneksi Sosial),” *PsychologyToday.Com*, 12 September 2013. Tersedia pada <https://www.psychologytoday.com/blog/the-athletes-way/201309/the-love-hormone-drives-human-urge-social-connection>.

²⁶ Jack Fuller, “What is Happening to News: The Information Explosion and the Crisis in Journalism (Apa yang terjadi pada Berita: Ledakan Informasi dan Krisis dalam Jurnalisme),” (London: University of Chicago Press, 2010), hlm. 46.

²⁷ D. Terdiman, “Study: Wikipedia as Accurate as Britannica (Penelitian: Wikipedia seakurat Britannica),” *CNET News*, 15 Desember 2005. Tersedia pada http://news.cnet.com/Study-Wikipedia-as-accurate-as-Britannica/2100-1038_3-5997332.html

Untuk kelompok berita independen dengan nilai-nilai yang disampaikan dengan jelas, menggunakan media sosial untuk melibatkan diri dan berinteraksi mengarah pada penggunaan sumber daya kerumunan yang lebih cepat – dan pertumbuhan yang cepat.

Itulah pengalaman kami di Rappler, suatu situs berita, informasi, dan hiburan yang secara penuh digital dibangun pada era media sosial, yang kami ciptakan pada tahun 2012. Dipimpin oleh pasukan jurnalis yang dapat dipercaya dan yang dapat melakukan penyelidikan dengan giat²⁸ dengan rekam jejak yang sudah terbukti, kami membangun unit keterlibatan sipil secara terpisah yang bekerja dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasembada masyarakat untuk mendorong adanya aksi dunia nyata dan solusi-solusi untuk masalah-masalah yang para jurnalis telah lama berhadapan dengan. Rappler merupakan bagian dari Kemitraan Pemerintah yang Terbuka dan bekerja secara aktif dengan seksi-seksi berbeda dari pemerintahan Filipina untuk membantu membuat demokrasi kami lebih dapat diakses oleh masyarakat kami – semua ini sambil menjelaskan bahwa ada dinding China antara tim keterlibatan warga negara kami dan jurnalis kami.

Ironisnya, model jurnalisme yang sama adalah juga dasar dari model bisnis baru kami dengan empat tahap berbeda: penciptaan isi, keterlibatan media sosial, sumber daya kerumunan, dan data yang besar.

MODEL-MODEL BISNIS BARU

Model-model bisnis yang ada untuk jurnalisme tradisional mengeluarkan banyak biaya karena pendapatan berpindah dari cetak ke online. Namun, model-model penghasilan digital online berdasarkan CPC (*cost per click* = biaya per klik) dan CPM (*cost per web page impression* = biaya per kesan halaman situs) tidaklah cukup untuk kelangsungan suatu organisasi jurnalis secara penuh. Model bisnis Rappler menggabungkan teknologi, sumber daya kerumunan, dan data yang besar ke dalam gabungannya, sangat menyerupai perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi teknologi dan berhasil menginvasi pasar telah lakukan di bidang-bidang lainnya.

²⁸ "Rappler's Founding Board (Badan Pendiri Rappler)" tersedia pada <http://www.rappler.com/about-rappler/about-us/6677-the-people-behind-rappler>.

Selama berabad-abad, kita hidup dalam dunia produksi linear dimana bisnis merupakan produsen yang menjual kepada konsumen. Namun, sekarang ini konsumen menciptakan nilai dan menjadi produsen, melahirkan perusahaan-perusahaan yang baru, dalam bidang teknologi, dan berdasarkan data, seperti Waze, Uber, dan Airbnb.

Seperti jurnalisme, prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis kami, cara kami membangun perusahaan-perusahaan, merupakan suatu kehebohan yang masif. Pada tahun 2011, Sekolah Bisnis Program Pascasarjana Babson's Olin memprediksikan bahwa dalam 10 tahun, 40% dari 500 Perusahaan yang Berhasil tidak akan lagi terus bertahan. Richard Foster dari Yale University memperkirakan bahwa jarak waktu kehidupan rata-rata dari perusahaan S & P (standar dan miskin) dengan indeks 50 telah menurun dari 67 tahun pada tahun 1920an sampai pada 15 tahun sekarang ini.

Kita hidup melalui masa penghancuran kreatif.²⁹ Teknologi memberikan para jurnalis kekuatan baru, yang ketika dimanfaatkan dapat menyediakan cara-cara baru untuk memecahkan masalah-masalah yang lama.

INISIATIF SUMBER DAYA KERUMUNAN RAPPLER

Kita ingin menciptakan suatu model jurnalisme yang pertama dan dapat diukur dengan skala di negara-negara seperti Filipina, dimana lembaga-lembaga dan pemerintahan tetap lemah, mengarah pada kurangnya akuntabilitas. Mereka haruslah masyarakat dimana tingkat pemakaian internet dan telepon genggam cukup tinggi untuk menciptakan forum distribusi alternatif yang dapat memberdayakan dasar piramida, dan harus ada tingkat pengadopsian tinggi atas teknologi baru dan media sosial.

Rappler berada pada pusat dari tiga lingkaran yang saling berpotongan: jurnalisme profesional, teknologi, dan sumber daya kerumunan, atau apa yang James Surowiecki sebut, 'kebijakan kerumunan' – ketika kelompok-kelompok besar orang-orang mengambil langkah-langkah kecil untuk menciptakan sesuatu yang khusus dan unik. Berdasarkan pada latar belakang pendiri dalam media cetak investigatif dan televisi, kami menggabungkan pendapat dan analisa para ahli dengan para kerumunan.

²⁹ M.Ressa, "Journalism's Creative Destruction (Penghancuran Kreatif Jurnalisme)," Rappler.com, 1 Desember 2012. Tersedia pada <http://www.rappler.com/thought-leaders/17097-journalism-s-creative-destruction>.

Pada pusatnya adalah model yang melibatkan pengguna dan yang dipatenkan, yang merupakan pendekatan hati dan pikiran terhadap berita. Setiap cerita mempunyai ukuran suasana hati yang unik. Ilmuwan saraf mengatakan tindakan yang mendefinisikan apa yang anda rasakan dapat membuat anda cenderung untuk mendengarkan pada suatu alasan. Jadi setelah menonton atau membaca suatu cerita, anda dapat mengklik apa yang anda rasakan. Setelah mengklik pada suasana hati anda, kemudian anda terpacu untuk menuliskan mengapa anda merasa demikian dan berbagi baik cerita anda maupun komentar anda pada jaringan sosial anda.

Ketika anda melakukan itu, data dari setiap ukuran suasana hati dikumpulkan ke dalam situs pengnavigasi suasana hati, yang menampilkan 10 cerita paling terkenal (dengan jumlah pemilih paling banyak) dan suasana hati sumber daya kerumunan pada hari itu. Mengamati semua data itu bersama-sama, anda dapat melihat tren-tren dalam hitungan bulan dan tahun – hanya satu bagian-bagian data besar yang kita pantau, memberikan lebih banyak pandangan kepada publik yang kami layani.

Sebagaimana disebutkan di atas, media sosial secara nyata mengubah cara otak kita berpikir dan mengelisahkan emosi kita. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial menyebabkan peningkatan tingkat dopamin dan oksitosin, yang menjadi alasan akan kebutuhan untuk terkoneksi, yang merupakan kebutuhan ketiga dalam hierarki kebutuhan Maslow. Ide terakhir yang melatarbelakangi ukuran suasana hati Rappler adalah temuan-temuan bahwa sampai pada 80% cara orang-orang membuat keputusan dalam hidup mereka bukanlah karena pemikiran rasional tetapi karena emosi mereka.³⁰

Ketika anda meletakkan ide-ide ini bersama-sama, anda mulai melihat pergantian yang mendasar dalam cara pikiran kita mengkonsumsi media dan bagaimana teknologi meninggikan emosi kita. Dengan melabuhkan emosi-emosi ini pada cerita-cerita, Rappler menstimulasikan keterlibatan komunitas dan menciptakan aksi-aksi yang menggunakan sumber daya kerumunan yang khusus yang dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial.

³⁰ De Martino, et al, "Frames, Biases, and Rational Decision-Making in the Human Brain (Kerangka, Bias, dan Pembuatan Keputusan yang Rasional dalam Otak Manusia)," *Science*, 2006. Tersedia pada http://www.cof.orst.edu/cof/teach/agbio2010/Other%20Readings/Frames_Biases_Rational_Decision-Making_Human_Brain-Scienc2006.pdf serta A. Bechara, H. Damasio, AR Damasio, "Emotion, decision-making and the orbitofrontal cortex (Emosi, pembuatan keputusan, dan korteks orbitofrontal)," *Cerebral cortex*, 2000. Tersedia pada <http://cercor.oxfordjournals.org/content/10/3/295.full>

Rappler mempunyai empat inisiatif utama yang mengubah sumber daya kerumunan media sosial menjadi keterlibatan warga negara yang bekerja secara kolaboratif dengan mitra-mitra kami:³¹

1. #BudgetWatch³²: Bagaimana kita dapat menghentikan korupsi? Tunjukkan pada saya uangnya. Inilah tepatnya apa yang situs mikro tampilkan, dengan Kemitraan Pemerintah yang Terbuka, Departemen Manajemen Anggaran, dan sekitar 19 lembaga swasembada masyarakat.

Kami menampilkan data anggaran dan konsep-konsep yang mudah dipahami dan secara visual dapat melibatkan penonton seperti permainan *Slides & Ladders*³³ untuk menunjukkan proses persetujuan anggaran atau permainan interaktif lainnya³⁴ yang memungkinkan publik untuk menyerahkan prioritas anggaran mereka sendiri dan melihat bagaimana proposal mereka berdampak pada sektor-sektor yang berbeda.

Bergerak dengan mudah antara forum-forum dunia nyata dengan pembuat berita, interaksi sosial media, dan aksi-aksi nyata,³⁵ ini adalah kegiatan pertama dari upaya anti-korupsi Rappler.

2. #ProjectAgos³⁶: Kami mengarahkan arus kerja yang telah sama diuji untuk menangani adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dalam suatu negara yang mempunyai rata-rata 20 angin topan setiap tahun dan mencakup 8 dari 10 kota-kota yang cenderung mengalami bencana paling banyak di dunia.³⁷ Berdasarkan Laporan Bencana Dunia tahun 2012, Filipina merupakan negara yang cenderung mengalami bencana ketiga secara global.³⁸

³¹ Daftar 4 inisiatif sumber daya kerumunan Rappler pertama muncul dalam makalah saya, "Journalism's new power lies in technology (Kekuatan baru jurnalisme terdapat pada teknologi)," 30 November 2014. Tersedia pada <http://www.rappler.com/thought-leaders/76459-journalism-new-power-technology>.

³² #BudgetWatch tersedia pada <http://www.rappler.com/move-ph/issues/budget-watch>.

³³ Permainan anggaran Slides & Ladders tersedia pada <http://www.rappler.com/move-ph/issues/budget-watch/27897-slides-ladders-philippine-budget-process>.

³⁴ Permainan anggaran nasional interaktif tersedia pada <http://www.rappler.com/move-ph/issues/budget-watch/33857-national-budget-game>.

³⁵ Forum langsung, livestream, blog langsung dengan pejabat pemerintah tingkat tinggi tersedia pada <http://www.rappler.com/move-ph/issues/budget-watch/45025-live-blog-beyond-napoles-public-funds>.

³⁶ Peta-peta waspada yang dibuat dengan sumber daya kerumunan dalam Proyek Agos yang Bersejarah tersedia pada <http://www.rappler.com/move-ph/issues/disasters/73580-agos-alert-relief-maps-list>.

³⁷ "8 of 10 most disaster-prone cities in the world in PH (8 dari 10 kota-kota yang cenderung mengalami bencana paling banyak di Filipina)," Rappler.com, 6 Maret 2015. Tersedia pada <http://www.rappler.com/move-ph/issues/disasters/85933-disaster-prone-cities-ph>.

³⁸ World Disaster Report 2012 (Laporan Bencana Dunia tahun 2012) tersedia pada <http://www.ifrcmedia.org/assets/pages/wdr2012/resources/1216800-WDR-2012-EN-FULL.pdf>

Dalam kolaborasi dengan Komisi Perubahan Iklim Filipina, OCD (*Office of Civil Defense* = Kantor Pembelaan Sipil), NDRRMC (*National Disaster Risk Reduction & Management Council* = Dewan Pengurangan & Manajemen Risiko Bencana Nasional), DSWD (*Department of Social Welfare & Development* = Departemen Kesejahteraan Sosial & Pembangunan), DILG (*Department of Interior & Local Government* = Departemen Pemerintahan Dalam Negeri & Lokal), PNP (*Philippine National Police* = Polisi Nasional Filipina), AFP (*Armed Forces of the Philippines* = Angkatan Bersenjata Filipina), unit-unit pemerintahan nasional dan lokal lainnya serta kedutaan Australia di Filipina, UNDP (*United Nations Development Programme* = Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa), dan mitra-mitra sektor swasta, Rappler menciptakan forum online satu perhentian yang menggabungkan aksi pemerintah dari tingkat atas ke tingkat bawah dengan keterlibatan warga negara dari kelas bawah ke kelas atas pada media sosial. Kami juga merupakan bagian dari *Patrick Meier's Digital Humanitarians* (Badan Kemanusiaan Digital Patrick Meier), suatu jaringan sukarelawan global yang bekerja selama terjadinya bencana.

Proyek Agos mencakup database pengetahuan berisiko dan alat-alat interaktif seperti peta-peta yang menunjukkan bahaya dan alat pemburu badai yang membantu para pejabat dalam persiapan menghadapi badai. Situs mikro kami meliputi informasi yang luas sebelum, selama, dan sesudah adanya segala gangguan cuaca.

Selama terjadinya badai topan, peta wilayah banjir yang dibuat dengan sumber daya kerumunan, informasi terkait, dan himbuan untuk membantu menyediakan pelaporan yang nyata di lapangan, dan responden pertama (yang langsung mengalami bencana) melihat dan menjawab, memberikan orang lainnya yang ingin membantu suatu pandangan yang lebih luas. Kami sekarang ini berada dalam proses menambahkan pembelajaran mesin, suatu algoritma dimana kerumunan dapat secara efektif “mengajarkan” dan yang kemudian secara otomatis memetakan masukan media sosial yang membangun kerja QCRI (*Qatar Computing Research Institution* = Lembaga Riset Penghitungan Qatar).

3. #HungerProject³⁹: Bencana kelaparan di Filipina terus meningkat walaupun Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini tetap tumbuh, bahkan menjadi di antara yang tertinggi di Asia dan di dunia pada tahun-

³⁹ #HungerProject microsite tersedia pada <http://www.rappler.com/move-ph/issues/hunger>.

tahun terakhir ini. Bekerja dengan Program Makanan Dunia dan DSWD Filipina, kami memberitakan cerita yang menunjukkan bagaimana hal ini dapat memberikan dampak pada masa depan kita.

Adanya banyak manusia kerdil merupakan masalah yang serius: negara kami berada pada urutan nomor 9 secara global dari daftar 14 negara dimana 80% populasi manusia kerdil hidup. Anak-anak kerdil tidak hanya secara fisik lebih kecil, tetapi juga mereka tumbuh dengan perkembangan kognitif yang lemah dan menderita kondisi kesehatan lainnya.

4. #WhipIt⁴⁰: Kemitraan komersial ini dengan Pantene memfokuskan pada bias gender dan hak-hak perempuan dengan mempertanyakan label-label dalam masyarakat. Rappler mengorganisasikan suatu forum perempuan⁴¹ untuk meluncurkan suatu kampanye iklan yang inovatif dan menyebarkan suatu survei⁴² yang melihat pada bagaimana bagian masyarakat yang lebih progresif melihat perempuan sekarang ini di Filipina. Suatu gebrakan online ini mengema di seluruh dunia.

Kampanye ini mencapai puncaknya ketika COO (*Chief Operating Officer* = Pejabat Kepala Pengoperasian) Facebook, Sheryl Sandberg, memposkan kampanye ini, membuat P&G (*Procter & Gamble*) memberikan pengumuman bahwa perusahaan ini akan membawa kampanye yang lahir di Filipina ini ke negara-negara Barat.⁴³

Ijinkan saya mengakhiri makalah ini dengan analisa data yang besar dan jaringan sosial. Pada akhirnya, teknologi memberikan pemberdayaan dengan menghapus halangan-halangan pada entri dan keterlibatan. Data yang besar secara publik tersedia – mulai dari apa yang kita keluarkan disana secara sukarela pada jaringan sosial, dan memahami bahwa dan cara pesan-pesan memberikan gebrakan melalui jaringan sosial memberikan kita tambahan pandangan ke dalam jenis isi yang kita ciptakan untuk penonton/pendengar/pembaca kita.

⁴⁰ #WhipIt microsite tersedia pada <http://www.rappler.com/brandrap/whipit>.

⁴¹ Rincian mengenai #WhipIt forum perempuan tersedia pada <http://www.rappler.com/brandrap/44663-whip-it-ncr-survey-women-issues>.

⁴² "#WhipIt: NCR survey show stereotypes persist (Survei *National Capital Region* – Wilayah Ibukota Nasional menunjukkan bahwa stereotipe tetap bertahan)," *Rappler.com*, 27 November 2013. Tersedia pada <http://www.rappler.com/video/reports/44742-whipit-ncr-survey-gender-stereotypes-persist>.

⁴³ "#WhipIt A Filipino campaign goes global and viral (Kampanye Filipina menjadi global dan viral)," *Rappler.com*, 18 Desember 2013. Tersedia pada <http://www.rappler.com/brandrap/whipit/46129-whipit-gets-international-mileage>.

Ijinkan saya mengakhiri makalah ini dengan dua contoh akan bagaimana Rappler menggunakan data yang besar untuk memperkuat demokrasi partisipatif:

1. Dalam pemilihan umum pertengahan waktu di negara ini pada tahun 2013, Rappler menandatangani perjanjian dengan Komisi Filipina mengenai Pemilihan Umum, memberikan kami akses terhadap serangkaian data penuh dari hasil-hasil dari pemilihan secara otomatis. Dengan data itu, kami menciptakan templat pelaporan yang nyata pada saat terjadinya suatu peristiwa, dan templat ini membagi hasil-hasil ke dalam rincian kecil-kecil. Sekarang, anda tidak perlu lagi untuk menunggu pembaca berita televisi untuk mengumumkan hasil-hasil yang mempengaruhi anda. Sekarang, anda dapat mencari – dan kembali pada waktunya – secara instan. Hal ini membuat pelaporan menjadi transparan dan menghapuskan pernyataan-pernyataan bias lama atau menjadi “*trending*” ketika melaporkan hasil-hasil pemilihan. Adalah pertama kalinya secara global rincian dengan poin-poin kecil dari hasil pemilihan tersedia dalam waktu yang dekat dengan peristiwa pemilihan.⁴⁴
2. Pada bulan Agustus 2013, suatu pos di Facebook melawan korupsi yang terinstitusi – suatu skandal yang dilaporkan oleh Rappler secara ekstensif – memakan waktu tujuh hari untuk menggerakkan suatu protes yang terdiri dari 100.000 orang di jalan-jalan dengan menggunakan #MillionPeopleMarch.⁴⁵ Meskipun kerumunan berjumlah kurang dari satu juta, protes ini cukup mendesak Presiden Benigno Aquino untuk mengubah kembali kebijakannya pada sesuatu yang secara terkenal disebut dengan “*the pork barrel*” (tong babi). Kemarahan ini berlanjut memanas di bawah permukaan, menuntut akuntabilitas baik dari sektor publik maupun dari sektor swasta.

Ini adalah dunia baru yang berani dengan kemungkinan tanpa akhir – yang semuanya memberikan kekuatan baru pada jurnalis dan warga negara, yang – disenjatai dengan informasi – dapat bekerja secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menemukan teknologi yang memungkinkan adanya solusi untuk masalah-masalah lama dan memperkuat proses demokrasi.

⁴⁴ Hasil-hasil pemilihan dari Rappler pada tahun 2013 tersedia pada <http://election-results.rappler.com/2013/live/senatorial-race-results>.

⁴⁵ D. Go, “#MillionPeopleMarch: Keberhasilan online dan offline,” Rappler.com, 26 Agustus 2013. Tersedia pada <http://www.rappler.com/nation/37360-million-people-march-social-media-protest-success>.

BAB 4

BUDAYA IMPUNITAS DI FILIPINA

Prima Jesusa Quinsayas

Prima Jesusa Quinsayas adalah penuntut swasta dan pengacara bekerja untuk Freedom Fund for Filipino Journalists (Dana Kebebasan untuk Jurnalis Filipina).

Budaya impunitas secara mendalam dilestarikan di Filipina. Sejak pengusiran pendiktatoran Marcos pada bulan Februari 1986 dan perbaikan demokrasi, telah terdapat 146 pembunuhan terkait dengan kerja media.⁴⁶ Dari semua ini, telah ada sekitar hanya 15 penghukuman atau sekitar 10% (sepuluh persen). Walaupun jumlah ini lebih tinggi daripada angka di seluruh dunia, yakni 1% (satu persen) penghukuman dalam kasus-kasus pembunuhan pekerja media, tidak ada satupun dari 15 penghukuman ini melibatkan tokoh yang mendalangi pembunuhan tersebut. Melainkan, mereka yang dihukum biasanya adalah pembunuh bayaran yang disewa, para mata-mata, dan para antek.

Lima tiang penopang dari sistem keadilan pidana Filipina, yakni Lembaga Penegakan Hukum, Lembaga Penuntutan, Lembaga Pengadilan, Lembaga Pengkoreksian dan Lembaga Kemasyarakatan, semuanya rentan terhadap korupsi, permainan kekuasaan politik, dan masalah abadi akan kurangnya dana dan logistik.

Unit-unit polisi dipolitisasikan dengan orang-orang yang berada pada jabatan tingkat tinggi yang ditugaskan oleh pejabat-pejabat publik yang terpilih dan yang mendapatkan pengawasan sangat sedikit dari lembaga-lembaga lainnya. Dalam kasus-kasus dimana organisasi *Freedom Fund for Filipino Journalists* (Dana Kebebasan untuk Jurnalis Filipina) telah menyediakan pengacara pro-bono (tanpa bayaran) untuk keluarga korban media, dua dari kasus-kasus ini melibatkan petugas polisi yang dituduh sebagai penembak bayaran,⁴⁷ satu orang adalah prajurit dituduh sebagai

⁴⁶ Database Pusat untuk Kebebasan Media & Tanggungjawab pada www.cmfr-phil.org.

⁴⁷ Masyarakat Filipina melawan Petugas Polisi 1 Dennis Jess Esteban Lumikid (pembunuhan pekerja media Desiderio Camangyan) dan Masyarakat Filipina melawan Petugas Polisi 2 Darwin Quimoyog (pembunuhan pekerja media Crispin Perez).

penembak bayaran,⁴⁸ sementara lainnya melibatkan anggota-anggota kepolisian dan militer.⁴⁹

Penuntut pemerintah lebih sering harus menerima penyelidikan kepolisian yang buruk, dan sering mempunyai beban kerja yang berlebihan karena tidak adanya cukup orang untuk pelayanan penuntutan nasional. Biaya pengadilan tidak lebih baik karena pengadilan sangat banyak dibebani oleh daftar kasus yang harus diselesaikan oleh pengadilan.

Pemerintah telah mencoba mengalamatkan pembunuhan pekerja media dengan menciptakan satuan tugas militer seperti TF 211 dari Departemen Keadilan dan TF Usig dari Kepolisian Nasional Filipina. Kedua satuan tugas militer itu diciptakan untuk memfokuskan pada pembunuhan jurnalis, aktivis, hakim, dan semacamnya yang tidak diatur oleh hukum.

Satuan tugas militer paling terbaru diciptakan melalui *Administrative Order* (Perintah Administratif) No. 35 lebih dari dua tahun yang lalu. Satuan tugas militer baru ini menggantikan TF 211 dan terdiri atas Departemen Keadilan, Kepolisian Nasional Filipina, dan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia. Media telah menyarankan bahwa pengacara swasta dimasukkan ke dalam satuan tugas militer ini, tetapi pemerintah belum menerima proposal ini.

Lembaga pengadilan Filipina telah juga mencoba untuk mengalamatkan masalah prosiding pidana yang mengulur-ulur waktu dengan Mahkamah Agung yang memerintahkan pentransferan tempat-tempat pengadilan dari kasus-kasus pembunuhan pekerja media, dan mengeluarkan pedoman khusus untuk kasus Pembantaian Masal Ampatuan agar pengadilannya dipercepat.

Berlawanan dengan upaya-upaya positif ini, Kongres Filipina belum meloloskan undang-undang mengenai Kebebasan Informasi. Yang bergerak lebih cepat adalah undang-undang mengenai Hak untuk Menjawab yang menghukum kegagalan penerbit, editor dan/atau

⁴⁸ *Masyarakat Filipina melawan Korpral Alvaro Obregon dan Ronilo Quiñones* (kasus pembunuhan yang gagal Alberto Martinez) [Catatan: Alberto Martinez meninggal pada tanggal 15 Januari 2015, pada akhirnya menyerah pada komplikasi yang disebabkan oleh luka jaringan syaraf tulang belakang karena pada tanggal 10 April 2005 ada yang mencoba membunuh dia; Alberto menghabiskan waktunya selama 10 tahun terakhir di kursi roda karena luka itu membuat dia cacat dari pinggang ke bawah].

⁴⁹ *Masyarakat Filipina melawan Andal Ampatuan, Jr. alias "Unsay", dkk.* (kasus Pembantaian Masal Ampatuan, Maguindanao, pada tanggal 23 November 2009 dimana 70 dari 196 yang tertuduh adalah anggota kepolisian dan militer).

wartawan untuk mempublikasikan atau menyiarkan jawaban suatu pihak atas tuduhan melakukan kesalahan.

Cabang lembaga eksekutif tampaknya bahkan lebih pasif daripada lembaga legislatif. Penciptaan komite khusus atau satuan tugas militer melalui Perintah Administratif No. 35 belum secara luas dipublikasikan atau dipresentasikan sebagai suatu tanda kepedulian yang kuat. Pada bulan Desember 2012, Presiden dikutip karena mengatakan bahwa pembunuhan pekerja media di Filipina “bukanlah bencana nasional.”

Bahkan publik tampaknya tidak menyadari bahwa serangan-serangan ini terhadap jurnalis mempengaruhi hak dan akses terhadap informasi mereka, dan kemampuan mereka untuk terlibat dalam ruang publik. Tidak ada kemarahan pada banyaknya terjadi pembunuhan pekerja media.

Dengan kata lain, ini dapat dipahami karena negara ini mempunyai tantangan-tantangan yang jauh lebih mendesak pada banyak hal yang menghadang. Negara ini belum lagi memulai implementasi penuh dari rehabilitasi setelah adanya badai topan *Yolanda*⁵⁰ yang sangat dasyat dan kemudian negara ini sudah harus berhadapan dengan bencana alam lainnya.

Namun, pembunuhan pekerja jurnalis yang merefleksikan budaya impunitas sebagaimana diterapkan secara mendalam dalam masyarakat, membuat semua warga negara menjadi rentan. Kampanye melawan pembunuhan pekerja media merupakan advokasi yang paling nyata, tetapi banyak lainnya – pengacara, hakim, dan aktivis hak-hak asasi manusia – juga dibunuh.

⁵⁰ Nama internasional: *Haiyan*.



BAGIAN III

BAGAIMANA MEDIA BERKONTRIBUSI PADA PERDAMAIAN DAN DIALOG?

PENDAHULUAN

Peran media dalam perdamaian dan dialog adalah hal yang kontroversial. Apakah media dapat 'mengusahakan perdamaian' atau tidak, hal ini dapat diperdebatkan, tetapi media pastinya dapat menjamin bahwa melalui kepatuhannya sendiri pada standar etika dan profesionalisme yang tinggi, media tidak sendirinya menjadi katalisator untuk konflik lebih lanjut dan/atau kekerasan dalam masyarakat. Kebebasan mengeluarkan pendapat dapat disalahgunakan oleh mereka dengan pandangan ekstrim mengenai ras, gender, dan agama, di antaranya, dan peran media adalah untuk menjamin bahwa pendapat yang penuh kebencian, dan/atau hasutan terhadap kekerasan atau diskriminasi, misalnya, dicegah untuk tidak menyebar dengan mematuhi kode-kode yang menjaga terhadap penyebaran sikap tidak bertoleransi, apakah secara online atau dalam media tradisional.

Dalam bagian ini, **Ulla Carlsson**, Direktur Rumah Kliring Internasional untuk Anak-Anak, Pemuda, dan Media pada NORDICOM di Swedia, mengarisbawahi pentingnya literasi informasi media sebagai elemen yang krusial untuk pembangunan demokrasi. Dia menekankan pentingnya menggabungkan literasi-literasi yang mendasar dengan kebaikan bersama.

Endy Bayuni, editor senior pada *the Jakarta Post*, dan sendirinya juga seorang kolumnis pada isu-isu agama, mempertimbangkan dengan sangat hati-hati dan dengan pemikiran yang memakan waktu yang lama tentang apakah jurnalisme ‘perdamaian’ dapat berkelanjutan. Dia juga menyatakan agar kebutuhan akan lebih banyak pelatihan dan sumber daya diterapkan pada pelaporan agama. Karena hal ini merupakan salah satu isu paling kontroversial di dunia sekarang ini.

Bill Orme, yang mengambil pesan dari GFMD (*Global Forum for Media Development* = Forum Global untuk Pengembangan Media) ke dalam diskusi-diskusi PBB mengenai Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menghadapi ‘Perdebatan yang Hebat’, yaitu mengenai peran kunci kebebasan informasi dan media dalam tujuan-tujuan pembangunan global baru PBB yang akan diadopsi pada konferensi tingkat tinggi PBB pada bulan September 2015. Meskipun secara pribadi Bill Orme tidak hadir pada acara Forum Media Global, pandangan-pandangan ini direfleksikan disana oleh Leon Willems, ketua GFMD.

Eksekutif Direktur Agenda Hak-Hak Media di Nigeria, **Edetaen Ojo**, memberikan argumen bahwa tidak hanya media dapat berkontribusi pada perdamaian dan rekonsiliasi, tetapi media juga dapat membantu menyelesaikan konflik dengan menyebarkan informasi, dengan menciptakan kesadaran, pengetahuan dan mempromosikan akuntabilitas dan transparansi serta pemerintahan partisipatif.

Melihat pada pentingnya jurnalisme warga negara, dan bagaimana jurnalisme ini dapat memberdayakan komunitas dan menjadi sumber sangat berharga baik untuk media warisan maupun untuk media online, **Harry Surjadi**, seorang ahli dalam jurnalisme lingkungan dan komunikasi di Indonesia, mendiskusikan model ‘perantara informasi’ –nya dan bagaimana model ini dapat memberdayakan komunikasi masyarakat biasa.

Dalam kesimpulannya, para penulis bersama **Guy Berger, Charaf Ahmimed, dan Mikel Aguirre Idiaquez**, melihat pada pengaruh positif di masa depan untuk *Bali Road Map* (Pedoman Bali), terutama terhadap

latar belakang negara yang menjadi tuan rumah, Indonesia, yang telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan acara Forum Media Global. Bagaimana melanjutkan momentum acara Forum Media Global, mungkin dengan pertemuan tindak lanjut, dan bagaimana menjamin *Bali Road Map* berfungsi sebagai dokumen yang tetap relevan ke waktu yang akan mendatang, merupakan dua dari pertanyaan kunci untuk media dalam pencarian pembangunan berkelanjutan dan budaya damai di masa depan.

BAB 1

LITERASI MEDIA DAN INFORMATION: SUATU ELEMEN KRUSIAL DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI

Ulla Carlsson

Dr Profesor Ulla Carlsson adalah Direktur NORDICOM/Rumah Kliring Internasional untuk Anak-Anak, Pemuda, dan Media pada at the University of Gothenburg, Swedia.

Masyarakat berubah, tetapi beberapa landasan dalam masyarakat tidak berubah. Di antara landasan ini adalah kebebasan intelektual – kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide kita, kebebasan berpikir, membaca, mendengarkan, menuliskan, dan berkomunikasi dengan lainnya – yang disebut sebagai literasi-literasi yang mendasar.

Akan tetapi, banyak orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan tidak mampu menjalankan hak-hak mereka. Dalam banyak kasus, situasi mereka disebabkan oleh ketidakadilan sosial, miskinnya pendidikan, diskriminasi gender, pengangguran, atau kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan – dan kurangnya akses terhadap informasi dan pengetahuan. Orang-orang di zona-zona perang dan wilayah-wilayah yang bergejolak adalah orang-orang yang paling rentan. Jutaan orang-orang sekarang ini telah terusir dari rumah mereka sendiri dan tidak mempunyai hak-hak sipil sedikit pun.

Jadi, literasi-literasi yang mendasar, menurut Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dengan Pasal 19 nya, harus digabungkan dengan kebaikan bersama.

Situasi yang harus dipertimbangkan secara terus menerus dan paling tidak ketika membahas Agenda Pembangunan Pasca tahun 2015 mengakui bahwa kekuasaan, keadilan, kesetaraan, dan identitas masih merupakan konsep-konsep yang relevan dalam keputusan.

Banyak peneliti dan organisasi internasional – Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan beberapa program dan badan-badannya, terutama UNESCO, bersama-sama dengan Bank Dunia, OECD, dan beberapa LSM menekankan hubungan-hubungan antara hak-hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan pengurangan kemiskinan.

Akses terhadap berbagai media dan pelayanan online merupakan faktor yang sangat penting untuk pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya; peran media dan komunikasi telah dirumuskan dalam istilah-istilah ini selama beberapa dekade. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah dan memulai diskusi publik akan masalah-masalah itu, media dapat meningkatkan kesadaran dan memungkinkan warga negara untuk mengetahui hak-haknya. Penyelidikan yang kritis, informasi, dan pendidikan publik melalui media dapat memperbaiki kesehatan, meningkatkan tingkat pendidikan formal, mengurangi korupsi dan lebih banyak lagi yang semuanya adalah langkah-langkah penting menuju pengurangan kemiskinan.

Media bersifat sangat penting untuk kebebasan berekspresi. Kehadiran kemajemukan dan kemandirian media adalah penting untuk aturan demokrasi, baik apakah penerbitan dilakukan secara offline atau online.

KEBEBASAN BEREKSPRESI MERUPAKAN HAL YANG NETRAL DENGAN TEKNOLOGI

Media telah lama berfungsi sebagai sumber-sumber pembagian informasi yang utama, sebagai ‘pengawas’, dan sebagai forum diskusi; kesimpulannya, media telah menyediakan ruang publik.

Digitalisasi, dengan peningkatan komersialisasi dan konvergensi media yang besar pengaruhnya, mengubah sistem komunikasi kita – dalam hal waktu dan ruang, serta modus-modus tingkah laku sosial.

Proses yang sedang berlangsung telah mengubah tidak hanya fungsi media, tetapi juga struktur pemerintahan dan karakteristik pasar, dengan jenis-jenis baru perusahaan transnasional. Beberapa dari perusahaan ini tidak menjalankan tanggungjawab sedikit pun yang berkaitan dengan masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi. Perusahaan ini secara keseluruhan bertanggungjawab pada pemegang kekuasaan politik atau pasar.

Perubahan-perubahan ini mentransformasikan ruang publik, yang mempunyai dampak pada demokrasi dan kebebasan berekspresi. Dan ruang publik terkait pada hubungan antara media, demokrasi, dan keterlibatan warga negara.

Masyarakat komunikasi sekarang ini mempunyai potensi yang sangat besar – bagi mereka yang mempunyai akses. Media dan komunikasi mewakili

sumber daya sosial dan budaya yang dapat memberdayakan orang-orang, baik dalam pengembangan pribadi mereka maupun dalam pengembangan mereka sebagai warga negara dari perspektif demokrasi. Sekarang ini kita mempunyai akses terhadap pengetahuan dan kesadaran akan peristiwa-peristiwa yang hanya 'kemarin' berada jauh dari wawasan kita.

Dan, kita dapat membuat suara-suara kita didengarkan dalam banyak cara-cara yang berbeda. Masing-masing kita dapat menjadi penulis, editor, atau direktur bagi diri sendiri. Kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi berbeda dari sebelumnya – melintasi banyak perbatasan yang berbeda.

Tidak pernah lebih mudah untuk menemukan informasi yang berkualitas daripada sekarang ini. Tetapi juga tidak pernah lebih mudah untuk menghindari jenis informasi itu, atau mendapatkan informasi yang salah – yang menyiratkan adanya risiko pelebaran kesenjangan informasi dan peningkatan ketidaksetaraan antara kelas-kelas sosial. Kita harus menanyakan apakah ada implikasinya untuk demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Demokrasi tidak akan berjalan tanpa warga negara yang terdidik dengan pandangan yang kritis, dan warga negara yang terdidik tidak akan ada tanpa media dan jurnalisme yang dapat diandalkan yang melatih pandangan yang kritis pada mereka yang mempunyai kekuasaan, yang disebut dengan ruang publik. Hal ini telah lama dianggap aksiomatik. Tetapi apakah hal ini masih berlaku?

Setiap hari kita melihat ancaman-ancaman pada kebebasan berekspresi – bahkan pembunuhan para jurnalis; bentuk-bentuk baru penyensoran negara dan penekanan, penyensoran sendiri, pengawasan, pemantauan dan kendali, *gatekeeping* (pengendalian berita), propaganda, - salah informasi, kejahatan terorganisir, tindakan-tindakan teror, undang-undang anti-teror, ditambah lagi dengan berbagai halangan komersial.

Pada situs ada pertempuran yang sedang berlangsung untuk Internet yang gratis yang dialamatkan baik pada pemerintahan yang digerakkan oleh ideologi maupun pada pemain yang digerakkan oleh komersial.

Pengguna media sekarang ini juga perlu dapat mengatasi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh masyarakat komunikasi baru. Ada kebutuhan yang jelas untuk kesadaran yang sangat ditingkatkan atas aspek-aspek, seperti keamanan, integritas, perlindungan kehidupan pribadi seseorang – hal-hal yang terkait dengan menjadi bagian dari ruang publik. Ekspresi kebencian

dan penghinaan, misalnya, merupakan tema-tema yang berulang dalam diskusi-diskusi publik sekarang ini.

Partisipasi, privasi, dan keamanan secara dekat saling terkait dengan kebebasan berekspresi.

Tantangan yang besar adalah untuk memikirkan kebijakan-kebijakan yang memberikan keseimbangan yang baik antara dua tujuan: untuk memaksimalkan kesempatan-kesempatan, dan untuk meminimaliskan risiko-risiko yang terasosiasikan dengan budaya media digital.

Kondisi ini bersama-sama menekankan bahwa warga negara yang melek media dan informasi adalah penting untuk pembangunan demokrasi dalam setiap negara di dunia. Kemampuan untuk menggunakan, memilih, mengevaluasi, dan memahami isi, pesan, dan arus, untuk mengkomunikasikan dan untuk mengekspresikan diri melalui media dan saluran komunikasi lainnya melibatkan banyak jenis pengetahuan dan ketrampilan yang berbeda – bahwa literasi media dan informasi merupakan aspek yang krusial dari kebebasan berekspresi. Literasi ini adalah mengenai perlindungan media sebagai ruang publik.

Literasi media dan informasi tidak diragukan lagi merupakan kompetensi kunci sekarang ini – tidaklah cukup menjadi orang yang menguasai teknologi. Masyarakat demokratis memerlukan warga negara yang menguasai media – dan yang kritis terhadap media. Dan ada hubungannya dengan literasi lainnya, tidak hanya dengan literasi yang mendasar, tetapi juga dengan literasi warga negara dan literasi budaya.

Banyak kelompok aktor yang berbeda menghadapi tantangan-tantangan ini: politisi dan pembuat kebijakan, industri media, pekerja media profesional, penyedia konten, sekolah dan guru, dan organisasi masyarakat sipil; anak-anak, pemuda, orangtua, dan orang dewasa lainnya. Dan tantangan ini menghimbau adanya kemajuan pengetahuan dan pembelajaran.

Kita tahu dengan sangat baik bahwa pendidikan, sekolah-sekolah yang baik untuk semua orang, anak gadis dan anak laki-laki, dan pembelajaran orang dewasa, untuk perempuan dan laki-laki, adalah suatu prasyarat yang sangat penting untuk demokrasi dan kebebasan. Dan kita juga perlu mengingat pentingnya literasi-literasi yang mendasar – dan literasi media dan informasi.

UNESCO telah melakukan kerja yang sangat baik dalam arena internasional – setidaknya terkait dengan literasi media dan informasi. Namun, keberhasilan pada hal ini akan tergantung pada formulasi oleh badan-badan regional dan nasional agar mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dan untuk menjamin hasil-hasil yang positif. Dan suatu prasyarat adalah dialog – dialog nasional dan regional yang berguna merupakan anugerah yang besar dalam pertukaran internasional dan sebaliknya. Hal ini dapat mengenai kebijakan serta penilaian.

Adanya demokrasi tidak mungkin tanpa warga negara yang terdidik dengan pandangan yang kritis, dan sebagai peneliti dan ahli kita harus menghimbau perhatian orang-orang pada pentingnya menjamin literasi media sebagai elemen krusial dalam pembangunan demokrasi – aspek krusial dari kebebasan berekspresi – satu sisi dari koin yang sama – dan literasi-literasi yang mendasar lainnya: landasan pembelajaran demokrasi.

Masyarakat global dan multi budaya kontemporer kita meningkatkan isu-isu yang lebih kompleks daripada sebelumnya. Dan ini juga kemungkinan lebih mendesak daripada sebelumnya untuk komunitas riset untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik dari masalah-masalah dan krisis-krisis terkini yang memberikan masalah pada masyarakat kita sekarang ini. Tantangan ini tidak hanya untuk memformulasikan dan menerangkan masalah yang ada, tetapi juga mengusulkan solusi.

Literasi media dan informasi dapat menjadi solusinya – dalam perspektif kebebasan berekspresi, yakni jenis solusi terhadap masalah yang meningkat dalam proses-proses perubahan, dalam hal ini terkait dengan sistem komunikasi. Solusi semacam ini harus berdasarkan pada pengetahuan yang terbukti relevansinya.

Isu-isu di sekitar kebebasan berekspresi dan kebebasan pers merupakan wilayah yang paling secara politik ‘diperbincangkan’ pada arena internasional. Namun, kita seharusnya tidak membiarkan diri kita sendiri menjauhkan diri dari tugas ini karena takut akan tindakan pembalasan.

Dalam masyarakat yang kompleks pada era digital, ada kebutuhan untuk memperluas konteks dimana kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, kebebasan pers, dan pengembangan media dikonseptkan.

Dalam konteks seperti itu, literasi media dan informasi merupakan kompetensi kunci, dan dialog antarbudaya adalah kewajiban.

Internalisasi dapat memperkaya dan juga diperlukan dalam dunia antarbudaya dan global sekarang ini sebagaimana hal ini terkait dengan minat bersama kita dalam paradigma yang lebih luas dan lebih inklusif semuanya. Ini menyiratkan proses pembelajaran.

Cukup secara pasti, kita memerlukan kolaborasi lebih besar – dengan masyarakat di sekitar kita dan kolaborasi yang melintasi batas-batas nasional – setidaknya diluar habitat intelektual yang kita kenali. Ada kebutuhan yang mendesak akan perspektif dunia dengan berbagai sudut pandang. Kita perlu belajar lebih banyak dari lainnya, untuk berbagi pengetahuan dan konteks. Dialog tidak boleh berhenti.

Forum-forum internasional, regional, dan nasional yang telah mapan dengan adanya sejarah pada bidangnya lebih penting daripada sebelumnya. Sebagai peneliti kita memerlukan forum-forum dimana kita mempertimbangkan relevansi pertanyaan-pertanyaan yang kita formulasikan, dimana kita bersifat lebih bijaksana dalam pilihan kita dari perspektif teori, konteks dan metode, dan dimana kita mengevaluasikan validitas temuan-temuan kita dan kesimpulan yang kita ambil dari temuan itu.

Kita perlu ingat bahwa akses terhadap media dan masyarakat jaringan dan kesempatan-kesempatan yang ditampilkan tidaklah merata untuk semua pihak. Jutaan orang di dunia sekarang ini hidup dalam kemiskinan – terutama orang-orang muda. Dalam negara-negara yang paling tidak berkembang, jumlah orang muda merupakan 70% dari populasi, sedangkan dalam wilayah-wlayah yang telah terindustrialisasikan di dunia angka orang muda kurang dari 25 persen. Banyak dari mereka kekurangan akses terhadap media, informasi, dan pengetahuan.

Maka itulah, Agenda Pembangunan Pasca Tahun 2015 sangatlah penting – untuk menjadi sadar akan fakta bahwa kebebasan berekspresi dan pembangunan media merupakan hal yang krusial untuk masyarakat demokratis yang berkelanjutan.

BAB 2

MEDIA DAPAT MEMBANTU MEMPROMOSIKAN PERDAMAIAN. TETAPI APAKAH MEDIA HARUS MELAKUKAN ITU?

Endy M. Bayuni

Endy Bayuni adalah Editor Senior pada the Jakarta Post, penulis opini, dan anggota pendiri IARJ (International Association of Religious Journalists = Asosiasi Internasional Jurnalis Agama).

Apabila media dapat menyebabkan terjadinya perang, kebalikannya juga pasti benar. Meskipun media tidak akan dapat menghentikan perang yang media bantu memulai atau membakar semangat untuk perang, media tentunya dapat menciptakan lingkungan yang diperlukan untuk mengembalikan perdamaian dan ketertiban. Namun, pertanyaan yang lebih besar adalah apakah media mempunyai kewajiban untuk berkontribusi pada perdamaian dan dialog.

Opini dalam industri media berita dan profesi jurnalisme terbagi pada isu ini.

Ada mereka yang merasa bahwa media dan jurnalis mempunyai kewajiban kepada masyarakat atau komunitas yang mereka layani. Berasumsi bahwa masyarakat secara umumnya menginginkan perdamaian, maka media dan jurnalis seharusnya membantu mempromosikan keselarasan.

Yang lainnya berpendapat bahwa membangun perdamaian bukanlah pekerjaan media atau jurnalis. Jurnalis seharusnya menjadi pengamat yang objektif. Pekerjaan mereka adalah melaporkan fakta-fakta. Mereka tidak seharusnya dalam keadaan apapun juga campur tangan dengan pembangunan dalam masyarakat.

Interpretasi kedua tampaknya merupakan konvensi yang lebih secara luas diterima dimana-mana sekarang ini. Jurnalis yang terlibat dalam pembangunan perdamaian dianggap oleh rekan sejawat mereka sebagai aktivis. Mereka kehilangan segala pengakuan kenetralan mereka dan tidak lagi diakui sebagai jurnalis.

Jurnalis, berdasarkan definisi bidang kegiatan mereka, dapat terus bertahan hidup pada keadaan adanya konflik, perang, ketegangan, dan

tragedi. Jadi mengapa para jurnalis ingin melihat atau berkontribusi pada adanya perdamaian?

Berita masih secara garis besarnya digerakkan oleh berita buruk. Itulah sifat dari profesi kami. Pepatah “berita buruk adalah berita yang bagus, dan berita yang baik bukanlah berita” masih secara luas diyakini oleh profesi ini dan industri media. Pepatah ini adalah mantra bisnis industri berita yang lebih peduli pada peredaran, rating, dan sekarang juga jumlah yang mengklik atau kunjungan.

Di dalam profesi ini, wartawan perang dianggap sebagai kategori tersendiri, suatu kelas di atas kita semua. Banyak yang terbunuh ketika bertugas, dan yang lainnya terluka. Banyak yang selamat yang kemudian melaporkan perang berikutnya. Sekarang ini, dunia tidak pernah kekurangan konflik berdarah untuk dilaporkan. Para jurnalis ini sering disebut sebagai “veteran”. Kita masih menemukan beberapa veteran dari perang Vietnam, tetapi ada banyak yang selamat dari Perang Teluk pertama, dan banyak veteran dari konflik di Rwanda, Afghanistan, dan Irak. Kita akan segera bertemu dengan para veteran dari perang Syria.

Disebut sebagai ‘veteran’ membawa lencana kehormatan tertinggi dalam profesi ini. Dan mereka benar-benar pantas menerimanya. Para jurnalis ini membahayakan hidup dan tubuh mereka sendiri demi melaporkan kebenaran. Kebenaran tidak perlu menjadi korban pertama perang, berkat kerja dan dedikasi para jurnalis ini.

Sebaliknya, ‘jurnalis perdamaian’ hampir tidak pernah terdengar.

Ide jurnalis bekerja menuju perdamaian pertama dibicarakan oleh ilmuwan jurnalisisme dari Norwegia, Johan Galtung, pada tahun 1970an. Dia berpendapat bahwa jurnalis yang meliputi perang dan konflik dapat membantu mengembalikan perdamaian dan dialog dengan melakukan lebih dari sekedar melaporkan kebenaran, dan dengan mengurangi fokus pada kekerasan, jumlah korban, dan mesin pembunuh. Melainkan mereka seharusnya memfokuskan lebih pada dampak perang pada kehidupan orang-orang.

Jurnalisisme ‘perdamaian’ tidak pernah mendapatkan penerimaan yang luas dari dalam profesi ini yang terjebak pada cara-cara konvensional. Jurnalis tidak ada urusan dengan pembangunan perdamaian. Biar orang lain yang mengkhawatirkan hal itu. Kita hanya melaporkan pada perkembangan, apapun yang akan terjadi dan ke arah mana hal itu akan berkembang.

Indonesia telah mempunyai banyak konflik di negara yang berada pada urutan keempat sebagai negara dengan paling banyak populasi di dunia. Kita telah mengalami pemberontakan bersenjata di Aceh, Papua, dan Timor Timur (dinamakan Timor Leste setelah kemerdekaannya pada tahun 2001), dan di Indonesia pernah ada konflik komunitas berdarah, terutama antara mayoritas Muslim dan orang Kristen, komunitas agama minoritas terbesar.

Dengan pengecualian di Papua, semua pemberontakan dan konflik komunitas ini telah diselesaikan melalui proses-proses demokrasi. Media memainkan peran yang kecil atau tidak sama sekali dalam proses perdamaian. Media melaporkan semua konflik ini dalam cara yang konvensional.

Kecuali di Maluku pada awal milenium, satu-satunya masa ketika jurnalisme 'perdamaian' Galtung diujikan adalah ketika mencoba membantu mengakhiri konflik antara orang Kristen dan Muslim pada pulau Ambon di kepulauan Maluku. Hasilnya seperti sihir. Jurnalisme 'perdamaian' tidak dengan sendirinya mengakhiri konflik, tetapi media membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dan merefleksikan tekanan publik agar para pihak yang berperang duduk bersama dan bernegosiasi untuk mengakhiri konflik, yang telah membunuh lebih dari 1.000 orang dan membuat lebih dari setengah juta orang lainnya terusir dari rumahnya antara tahun 1999 dan tahun 2002.

Ketika konflik komunitas pecah pada tahun 1999, media secara cepat terbagi berdasarkan perbedaan agama, sebagaimana terjadi di kota Ambon, kota utama di pulau itu dimana terjadi pembunuhan yang terburuk. Sebuah surat kabar di wilayah penduduk Kristen di Ambon melaporkan pada konflik dari perspektifnya, dan demikian juga yang dilakukan oleh surat kabar di wilayah penduduk Muslim. Kedua surat kabar ini melakukan peran mereka terlibat dalam pelaporan konvensional, tetapi dalam melakukan hal itu keduanya membakar ketegangan dengan memberikan berita-berita apa yang terjadi pada perang itu dan jumlah korban dari pandangan mereka yang berbeda.

Pada tahun 2001, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dalam kolaborasinya dengan Dewan Pers Indonesia dan British Council memberikan kesempatan pada jurnalisme perdamaian yang disarankan oleh Galtung. Jurnalis dari kedua surat kabar dibawa keluar dari wilayah konflik dan ditempatkan di Bogor, dekat Jakarta, di pulau Jawa, dimana mereka menerima pelatihan dalam melaporkan tanpa membakar konflik dan menyebabkan ketegangan.

Pada akhir lokakarya pada bulan April 2001, jurnalis Maluku mengeluarkan sebuah deklarasi bahwa mereka akan membantu memulai proses perdamaian. Mereka mempunyai ide untuk mendirikan sebuah rumah kliring bersama, yang kemudian dinamakan Pusat Media Maluku, dimana mereka akan berbagi berita dan informasi yang tidak akan mungkin tersedia apabila tidak ada pusat ini. Tidaklah jelas seberapa besar efek inisiatif ini dalam menghentikan permusuhan ini, tetapi perubahan dalam pelaporan media tentunya membantu menciptakan lingkungan dan tekanan publik yang diperlukan untuk para pemimpin komunitas untuk duduk bersama, bernegosiasi, dan akhirnya menandatangani perjanjian perdamaian pada bulan Maret 2002.

Sayangnya, ketegangan-ketegangan baru telah muncul antara komunitas beragama yang berbeda dalam kantong-kantong wilayah berbeda di kepulauan Indonesia, mengadu domba Muslim mayoritas melawan salah satu kaum agama minoritas. Di dalam kalangan kaum Muslim mereka sendiri, juga ada ketegangan-ketegangan antara pengikut Sunni yang dominan di Indonesia melawan pengikut sekte keagamaan dengan jumlahnya lebih kecil, seperti Syiah dan Ahmadiyah.

Secara garis besar – dan saya membesar-besarkan bahwa ini adalah kasus yang terjadi di seluruh dunia dan tidak hanya di Indonesia – media telah gagal dalam tugas jurnalisme ‘perdamaian’. Dengan kata lain, kita meliputi konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan antara komunitas beragama yang berbeda, dan kita lebih sering telah menjadi bagian dari masalah. Sebagian dari kebencian, ketegangan, dan sikap tidak toleransi, di antara komunitas beragama yang sedang meningkat di banyak bagian di dunia, terjadi karena cara media melaporkan bagaimana suatu agama dan komunitasnya.

Media menstereotipekan mereka dan menabur bibit prasangka melawan lainnya, kadang-kadang dengan tidak sengaja, tetapi ada kalanya disengaja. Ketika konflik pecah, kita (media) cenderung memperpanjang konflik.

Agama merupakan isu yang paling sulit dan sensitif untuk dilaporkan dalam jurnalisme. Dalam banyak masyarakat, ini merupakan isu yang emosional. Isu ini merupakan topik yang perlu ditangani dengan sangat hati-hati. Namun, ini adalah salah satu wilayah dimana media dan jurnalis telah gagal paling besar.

Biasanya, dalam semua ruang berita, pelaporan tentang agama tidak membawa keistimewaan yang sama seperti pelaporan mengenai isu-isu

lainnya, seperti politik, kejahatan, olahraga, bisnis, dan hiburan. Pelaporan mengenai komunitas beragama – dan berkat migrasi hampir di seluruh bagian di dunia sekarang telah menjadi multi suku dan multi keyakinan – menderita kekurangan perhatian dan tidak mendapatkan sumber daya yang mereka berhak dapatkan. Tugas melaporkan tentang agama biasanya diberikan kepada wartawan junior, yang tidak sabar untuk menyelesaikan tugas itu dan berpindah ke tugas pelaporan di wilayah-wilayah lain yang lebih bereputasi dan menarik.

Sampai pada baru-baru ini, pelaporan minimalis ini berjalan dengan baik karena media telah dapat menarik aspek agama keluar dari sorotan berita tanpa adanya konsekuensi yang nyata. Kita telah membuat berita menjadi sekular secara efektif, bahkan dalam masyarakat seperti di Indonesia dimana agama memainkan peranan yang penting dalam kehidupan rakyat. Sekarang kita melihat dampak kegagalan kita dalam memperhatikan lebih serius pada pelaporan mengenai agama dan mengenai berbagai komunitas yang membentuk masyarakat, dengan konsekuensi yang serius terhadap hubungan antar-keyakinan.

Adanya kekurangan pemahaman yang sangat besar antara komunitas-komunitas beragama yang berbeda yang harus hidup bersama dalam damai. Media sebagian atau bahkan secara luas bertanggungjawab untuk hal ini karena kecenderungan kita melaporkan berita secara sekular.

Banyak ketegangan yang kita lihat sekarang ini antara komunitas beragama – tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, di Myanmar, India, dan Pakistan, di beberapa negara di Timur Tengah, tetapi juga di Eropa, Amerika Latin, di AS dan Australia – terjadi karena kegagalan media untuk melaporkan mengenai agama, komunitas beragama, dan hubungan antar-keyakinan.

Kesadaran ini menyebabkan lebih dari 20 jurnalis yang peduli dari negara-negara pada lima benua dan mewakili semua keyakinan besar di dunia meluncurkan IARJ (*International Association of Religion Journalists* = Asosiasi Internasional Jurnalis Agama) pada bulan Maret 2012 pada suatu pertemuan di Italia. Mereka berbagi kepedulian pada kebutuhan untuk jurnalis untuk melakukan pelaporan yang lebih baik mengenai agama dan mengenai komunitas beragama dalam masyarakat mereka masing-masing.

Bukanlah tugas jurnalis menyebarkan pesan yang baik. Kami bukanlah pengkhotbah yang membawakan kabar yang menyenangkan. Kami hanyalah jurnalis yang mempunyai tugas kepada penonton/pendengar/

pembaca kami dan masyarakat kami untuk melakukan pekerjaan yang baik dalam pelaporan mengenai agama, dan kami berharap membangun pemahaman yang lebih baik antara komunitas beragama. Kami perlu mengubah pemikiran yang berlaku dalam ruang berita mengenai pelaporan agama, dan mulai memberikan perhatian yang lebih serius pada pelaporan ini, memfokuskan pada lebih banyak sumber daya dan pelatihan pada pelaporan bidang ini.

Kurang dari tiga tahun sejak pendiriannya, lebih dari 500 jurnalis telah bergabung dengan IARJ, suatu bukti yang jelas terhadap relevansi misi organisasi ini. Asosiasi ini sekarang menjalankan suatu situs mengenai praktek-praktek terbaik dalam pelaporan agama di seluruh dunia. Asosiasi ini juga telah menyelenggarakan pelatihan dan konferensi tentang pelaporan agama.

Dalam pelaporan agama, lebih daripada pelaporan di bidang lainnya, jurnalis harus menerapkan standar profesional dan etika yang tertinggi dalam kegiatan profesi mereka – tidak kurang dari ‘standar emas’ jurnalisisme.

Jurnalis, dan media tempat kami bekerja, bukanlah pencipta perdamaian. Tetapi pastinya kami mempunyai andil dalam masa depan masyarakat dan komunitas kami sendiri. Apabila kami melakukan pekerjaan kami secara profesional, kami akan dapat mempunyai pengaruh yang besar dalam menjawab pertanyaan akan bagaimana media dapat berkontribusi pada perdamaian dan dialog dan bahkan mencegah konflik dengan tetap memainkan peranan kami sebagai jurnalis sejati.

BAB 3

BAGAIMANA MEDIA DAPAT BERKONTRIBUSI PADA PERDAMAIAN DAN DIALOG

Edetaen Ojo

Edetaen Ojo adalah Eksekutif Direktur dari Media Rights Agenda (Agenda Hak-Hak Media), Nigeria.

Pengaruh potensial dari media dalam situasi-situasi ketidakstabilan politik dan konflik telah lama diakui dan secara umum diterima, sehingga sudah ada banyak kesepakatan bahwa media dapat berkontribusi pada perdamaian dan rekonsiliasi.

Media, sebagai suatu komunitas, dapat mencegah dan membantu menyelesaikan konflik dengan menyebarkan informasi, menciptakan kesadaran dan pengetahuan, mempromosikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Media juga dapat mengalamatkan penderitaan yang dirasakan oleh semua pihak dalam suatu konflik dan menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan semua pihak dalam suatu konflik untuk memilih berdialog.

Media tidak hanya berkontribusi pada perdamaian dan dialog dalam cara-cara ini, tetapi juga sering menyediakan forum dimana dialog yang diperlukan dapat terjadi. Dengan melalui forum media, pertukaran awal pandangan-pandangan dan penyampaian penderitaan dapat berlangsung ketika pertemuan tatap muka tidaklah mungkin atau tidaklah tepat.

Namun, tampaknya ada beberapa ketidaksetujuan dalam hal prasyarat yang perlu bagi media untuk memainkan peran-perannya secara efektif dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin agar prasyarat tersebut terpenuhi.

Untuk media menjadi efektif dalam peranannya membangun perdamaian dan menyelesaikan konflik, media perlu menjadi bebas, independen, profesional, dan dapat dipercaya.

Apabila kondisi-kondisi ini tidak terwujud dan tidak ada standar dan pedoman profesional yang dasar, ada risiko bahwa media akan menggunakan jenis

pelaporan dengan perasaan, yang akan lebih lanjut membakar konflik-konflik secara negatif. Ini sering terlihat dalam pelaporan yang tanpa sengaja tidak seimbang atau dalam pelaporan yang sangat bersifat propaganda atau bias. Pelaporan yang negatif seperti yang disebutkan berdasarkan bias suku, politik, agama, atau bias lainnya dapat memperparah ketegangan dan konflik.

Hal ini juga dapat secara cepat memburuk ke dalam lingkaran setan, karena konflik-konflik, dengan adanya ketidakpercayaan politik dan keuangan yang diciptakan oleh konflik ini, juga sering mempunyai efek yang merusak kekuatan individu dan bersama komunitas media.

Ketika jurnalis individu dan saluran media dimanfaatkan, sebagaimana sering terjadi dalam situasi konflik, media menjadi tidak berdaya karena media berjuang untuk bertahan hidup baik dengan mulai memfokuskan pada penyensoran sendiri maupun dengan menjadi bagian dari mesin propaganda dari pemerintah atau kelompok-kelompok bersenjata atau pihak-pihak lain dalam konflik.

Pentingnya kebebasan media untuk resolusi konflik dapat juga dilihat melalui dampak-dampak negatif yang membatasi perdebatan publik, dan/ atau informasi yang bersifat propaganda dapat membakar ketegangan dan memprovokasi kekerasan. Selanjutnya, dalam keadaan-keadaan dimana pemerintah, pihak-pihak yang berkonflik, atau kelompok yang berkuasa dan berkepentingan lainnya bercampur tangan dalam atau menyalahgunakan media, serta ketika media kekurangan akses terhadap sumber daya dan kesempatan untuk mengembangkan profesionalismenya, perannya sebagai 'penengah' dapat secara serius dirusak dengan konsekuensi bahwa masyarakat atau komunitas tidak terdidik, keadaan tidak aman memburuk, dan pidato yang berapi-api (yang dapat menyurut kemarahan) tidak diperiksa.

Oleh karena itu, sudah jelas apabila media tidaklah dapat diandalkan atau dipercaya, media tidak dapat membawa nilai berharga pada tugas membangun perdamaian dan menyelesaikan konflik. Selain itu, apabila media tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya, media tidak dapat membantu membangun perdamaian atau menyelesaikan konflik.

Pengalaman telah menunjukkan bahwa dalam sebagian besar wilayah konflik, media lokal bersifat lemah, mempunyai sumber daya yang sedikit, dan kekurangan keterampilan profesional. Media ini sering berpihak pada

pemerintah, lembaga agama, partai politik, atau kelompok suku serta kelompok yang berkepentingan lainnya. Sebagai hasilnya, media dalam wilayah-wilayah konflik sering tidak memiliki kredibilitas yang dibutuhkan, kemandirian, dan profesionalisme untuk membuat perbedaan yang positif.

Sebaliknya, pelaporan yang profesional dan seimbang oleh media yang bebas dan independen dapat mengurangi ketegangan dan membantu menyelesaikan situasi konflik.

Pada pertemuan meja bundar internasional mengenai 'Bantuan untuk Media dalam Wilayah-Wilayah yang Terjadi Ketegangan dan Situasi Konflik' yang diselenggarakan di Swedia pada bulan Mei 2003, para peserta mengamati di dokumen akhir bahwa:

'Media menopang pembangunan dan pendemokrasian dan merupakan elemen yang sangat penting dari resolusi konflik dan pembangunan perdamaian... Media independen adalah landasan dari demokrasi dan lebih sering sebagai satu-satunya jaminan untuk transparansi dan pemerintahan yang baik dalam manajemen konflik dan upaya-upaya pembangunan pasca terjadinya konflik.'⁵¹

Ada beberapa kontroversi di sekitar isu menggunakan media untuk membangun perdamaian. Beberapa argumen memusatkan pada kepedulian bahwa dalam mengejar agenda perdamaian secara aktif, ada risiko media berpihak dan kehilangan kredibilitas dengan penonton/pendengar/pembacanya. Pihak yang tidak setuju dengan pandangan ini mengatakan bahwa tugas media seharusnya hanya mengamati dan melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara objektif, tanpa memperkenalkan agenda advokasi apapun. Namun, pihak lainnya memberikan argumen bahwa sebuah kasus yang kuat dapat terjadi untuk tanggungjawab moral bagi para jurnalis untuk tidak hanya mengamati tetapi juga mencoba dan menggunakan kekuatan media yang belum ditetapkan untuk membantu membangun perdamaian.

Saya secara pribadi percaya bahwa media mempunyai tanggungjawab sosial untuk menggunakan kekuatannya membantu membangun perdamaian dan bahwa media memiliki kepentingan tersendiri yang menguntungkannya untuk membangun perdamaian karena dalam situasi

⁵¹ Seminar mengenai Bantuan untuk Media dalam Wilayah-Wilayah Terjadinya Ketegangan dan Situasi Konflik: Kesimpulan Diskusi Seminar dan Rekomendasi yang Diusulkan (SIDA/UNESCO, Vaxholm 25-27 Mei 2003).

ketidakstabilan politik dan konflik di seluruh dunia, media itu sendiri sering menjadi korban kebrutalan. Dalam situasi seperti itu, tanda-tanda pertama biasanya berupa pembatasan pada kebebasan media. Pembatasan-pembatasan ini mungkin bersifat keras dan ketat atau pembatasan itu bisa dalam bentuk kendali yang lebih halus, penekanan kebebasan berekspresi atau pengembangan saluran media yang menghasut terjadinya konflik.

Dalam mengusulkan suatu kerangka untuk media perdamaian, saya percaya bahwa pedoman dan kesimpulan dari konferensi *Strengthening Lifeline Media in Regions of Conflict* (Penguatan Media yang Dapat Dipercaya dalam Wilayah-Wilayah Konflik) tetap relevan dan meyakinkan. Diselenggarakan di Cape Town, Africa Selatan, pada bulan Desember 1998, konferensi ini diorganisir oleh Kemitraan Radio dari Pusat Internasional berlokasi di Geneva untuk Pelaporan Kemanusiaan yang berhubungan dengan MPC (*Media Peace Centre* = Pusat Perdamaian Media) Afrika Selatan. Konferensi ini telah membawa bersama-sama para pekerja media profesional, ahli-ahli dan organisasi terkemuka dalam bidang resolusi konflik dari bagian-bagian dunia yang berbeda untuk memeriksa bagaimana media dapat memberikan dampak pada pembangunan media dalam situasi-situasi konflik.

Pedoman mengenai proyek-proyek media yang berkembang dalam situasi konflik dihasilkan dari konferensi ini dengan dukungan dari ECHO (*European Commission Humanitarian Aid Office* = Kantor Bantuan Kemanusiaan Komisi Eropa), berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan dari konferensi.

Konferensi ini menyimpulkan bahwa media dapat memberikan dampak pada pembangunan perdamaian apabila media mematuhi sejumlah pedoman yang disampaikan dalam dokumen konferensi.

Pedoman ini mencakup kebutuhan untuk media memperoleh pemahaman terperinci atas konflik serta membangun kemitraan dengan organisasi/ahli resolusi konflik dan LSM lainnya yang bekerja di bidang resolusi konflik. Para pekerja media profesional seharusnya dilatih dalam resolusi konflik, dan intervensi seharusnya bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Media seharusnya tidak terlalu ambisius tetapi seharusnya dapat melakukan apa yang media dapat lakukan; dan seharusnya mengadopsi suatu pendekatan partisipatif, yang harus membuat masyarakat setempat terlibat dalam intervensi media.

Juga diusulkan bahwa mereka yang menggunakan media untuk membangun perdamaian seharusnya memilih saluran media yang terpercaya dan, jika

memungkinkan, bahwa pendekatan multi media seharusnya digunakan; sementara itu para praktisi seharusnya mendorong pencarian akan keluaran yang positif.

Telah direkomendasikan bahwa media seharusnya menghindari penstereotipean dan representasi yang simplistik atau 'sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk'; bahwa media seharusnya bertujuan untuk mengimbangi situasi yang adil untuk semua orang dengan memberikan suara kepada mereka yang tidak berkuasa; pemangku kepentingan seharusnya mendorong pengembangan lebih banyak solusi; dan bahwa dalam meliputi negosiasi, media seharusnya tidak memfokuskan pada kerugian-kerugian dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh para pihak-pihak yang terlibat karena ini akan menghasilkan kesulitan tambahan dalam menjual solusi yang diusulkan kepada kelompok garis keras pada kedua belah pihak.

Agar dapat menjamin keefektifan intervensi media dan penggunaan pemrograman radio dan video pro-aktif untuk pembangunan perdamaian, serangkaian 'praktek-praktek yang baik' juga dikembangkan. Hal ini mencakup diperlukannya media untuk membantu:

- Menjamin bahwa publik mempunyai harapan yang realistis mengenai apa yang dapat dicapai, dan mengenai lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil jangka panjang yang positif.
- Memberikan semua pihak kesempatan untuk berbicara dan melihat posisi masing-masing secara jelas dan tanpa bias. Membantu memahami dengan memfasilitasi komunikasi agar dapat menghindari kesalahpahaman.
- Memberitahukan penduduk di wilayah konflik mengenai kemungkinan untuk aksi, meskipun pada skala yang sangat kecil, menuju pada resolusi konflik tingkat komunitas. Komunitas memerlukan keyakinan mengetahui bahwa tindakan-tindakan telah diupayakan, dengan keberhasilan di tempat-tempat lain, dan bahwa upaya-upaya mereka akan didukung dan dipublikasikan oleh media.
- Membantu mencegah peredaran dan penyiaran propaganda, materi menghasut yang berapi-api, pidato berisi kebencian, atau kabar burung yang merusak komunitas dan mencegah pembangunan kepercayaan.
- Memberikan representasi yang akurat atas sebab-sebab suatu konflik,

dan atas situasi dalam wilayah konflik yang juga akan membantu menjamin bahwa tipe bantuan kemanusiaan yang tepat dan paling berguna disediakan oleh komunitas internasional. Sensitivitas terhadap syarat-syarat agama dan budaya, bahkan dalam masa krisis, adalah penting, dan membantu menetralkan penggambaran hal-hal itu dalam wilayah-wilayah konflik sebagai korban-korban pasif.

- Membentuk jaringan-jaringan informasi dan memfasilitasi perawatan 'memori kolektif' – tindakan-tindakan yang berhasil pada satu wilayah atau situasi dapat berhasil juga di tempat lainnya.
- Menghindari penstereotipean kelompok-kelompok, penduduk, pemimpin, dan lainnya.
- Berpartisipasi dalam proses rekonstruksi sosial dan pendemokrasian dalam situasi sesudah konflik dengan menyediakan forum yang positif dan partisipatif untuk pertukaran ide-ide, demokrasi, dan pembangunan bangsa.

Oleh karena itu, perlu dinyatakan kembali bahwa media yang bebas, independen, dan profesional secara kritis bersifat penting untuk mengasuh perdamaian dan dialog dan bahwa upaya dan sumber daya seharusnya didedikasikan untuk mencapai lingkungan media yang diharapkan itu.

Dalam segala peristiwa, bahkan dalam tidak adanya konflik, tidaklah dapat dibantah bahwa semua masyarakat memerlukan media yang bebas, independen, dan profesional yang dapat berkontribusi pada pembangunan.

Maka itu, ada kebutuhan yang besar untuk mengembangkan keterampilan praktisi media untuk menggunakan keahlian mereka memfasilitasi dialog dan pembangunan perdamaian.

Perlu juga disebutkan bahwa ada tantangan-tantangan keamanan yang media hadapi dalam mencoba memainkan peranan mereka dalam banyak wilayah dan bahwa isu-isu keamanan ini tetap secara besar belum dialamatkan.

Sebagai contohnya, sangatlah menantang bagi media Nigeria untuk melaporkan tentang pemberontakan di bagian timur laut Nigeria, tepatnya karena tidak adanya beberapa dari prasyarat yang dibutuhkan oleh media untuk secara aktif terlibat.

Yang paling mengkhawatirkan adalah fakta bahwa segala upaya dalam bentuk pelaporan 'yang benar' oleh media telah menghasilkan konsekuensi yang sangat parah baik dari pemberontak Boko Haram maupun dari kekuatan militer keamanan pemerintah.

Beberapa jurnalis telah dibunuh dan kantor-kantor surat kabar dibom oleh Boko Haram karena mereka dibuat marah oleh gaya pelaporan media tersebut.

Akan tetapi, pada bulan Juni 2014, media di Nigeria dikepung dan dijadikan markas operasi militer. Hal ini mencapai puncaknya dalam penangkapan pekerja surat kabar, penyitaan kendaraan dan ribuan kopi surat kabar serta bentuk pelecehan lainnya di daerah lainnya di negara itu sebagai hasil pencakupan yang menyarankan bahwa pihak militer tidak secara memadai diperlengkapi atau dipersiapkan untuk menghadapi situasi yang membahayakan keamanan.

Apabila kita mengharapkan media menjadi efektif dalam situasi seperti ini, kita harus mampu mempersiapkan mereka untuk tantangan yang ada dan untuk mendukung mereka ketika tantangan seperti itu muncul.

KESIMPULAN

Tulisan di atas berisi elemen-elemen dari suatu kerangka untuk media berkontribusi pada perdamaian dan dialog, yang dapat diterapkan di dalam banyak konteks berbeda, tergantung pada kebutuhan-kebutuhan khusus.

Tidak diragukan bahwa banyak kelompok masyarakat sipil, lembaga donor, dan pemerintah di masa lalu telah berusaha menggunakan beberapa dari elemen ini dalam suatu upaya untuk mengalamatkan tantangan yang dimunculkan oleh konflik. Namun, intervensi seperti ini tidaklah selalu sangat efektif, setidaknya sampai pada hal dimana masalah terus muncul. Alasan utama untuk kurangnya keefektifan ini, dalam pandangan saya, adalah tidak adanya strategi yang komprehensif dan berjangka panjang.

Kita harus mengakui bahwa sebagian besar masalah yang merusak keefektifan media telah mengkristal selama periode waktu yang lama dan bahwa menyelesaikan masalah ini secara efektif dan secara meyakinkan juga memerlukan waktu yang lama dan upaya yang dilakukan bersama-sama.

BAB 4

PERDEBATAN YANG HEBAT: KEBEBASAN INFORMASI DAN MEDIA DALAM TUJUAN-TUJUAN PEMBANGUNAN GLOBAL BARU PBB

Bill Orme

Bill Orme mewakili GFMD (Global Forum for Media Development = Forum Global untuk Pengembangan Media) dalam perdebatan PBB tentang pembangunan berkelanjutan.

Pada bulan Januari 2015, Majelis Umum PBB memulai negosiasi akhir pada pembahasan serangkaian tujuan pembangunan global PBB berikutnya, yang meneruskan Tujuan Pembangunan Milenium yang telah berakhir dan membantu membina bantuan internasional dan prioritas kebijakan untuk masa waktu 15 tahun ke depan. SDG atau “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” yang baru akan diadopsikan pada pertemuan konferensi tingkat tinggi pada bulan September akhir.

Dalam kemenangan yang tidak diharapkan tetapi masih sementara untuk masyarakat sipil dan aktivis media, tujuan-tujuan baru ini kemungkinan meliputi komitmen untuk membuka akses publik terhadap apa yang seharusnya menjadi informasi publik, di semua negara. Tetapi SDG masih harus difinalisasikan dan diadopsikan, dan sebagian besar akan tergantung pada ‘indikator-indikator’ faktual yang kemudian dipilih setelah itu untuk memantau kemajuan dan kepatuhan pada ketentuan ini, yang sekarang dimasukkan dalam draf Tujuan 16.

SDG berbeda dari MDG dalam hal SDG lebih dimaksudkan bersifat universal, diterapkan pada negara-negara maju di Utara dan Selatan, dengan tujuan-tujuan yang berkisar dari pemberantasan kemiskinan dan pencegahan penyakit sampai pada keadilan gender dan perlindungan lingkungan. SDG juga berbeda khususnya karena tujuan-tujuan ini meliputi beberapa kewajiban yang cukup khusus untuk mempromosikan pemerintahan yang adil dan efektif, suatu area yang tidak dicantumkan dalam MDG.

Di antara tujuan-tujuan dalam SDG, yang membuat banyak pengamat PBB terkejut, adalah komitmen pada akses publik terhadap informasi, sebagai salah satu dari 169 ‘target’ SDG yang diusulkan. Indikator-indikator untuk target itu dapat dan seharusnya meliputi jaminan hukum dan pelaksanaan

nyata dari hak untuk “mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide-ide, melalui semua media dan tidak mengindahkan perbatasan” – mengutip bahasa yang penuh pengetahuan tetapi tidak mengikat dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Pemimpin dunia dan ahli-ahli pembangunan yang memberikan nasihat pada tujuan-tujuan pasca tahun 2015 PBB telah menekankan pada kebutuhan untuk kebebasan berekspresi dan media independen dan pada akhirnya mencapai tujuan-tujuan ini. Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon, dalam rekomendasi resminya kepada Majelis Umum mengenai agenda pasca tahun 2015, menunjukkan pada “kebebasan pers, akses terhadap informasi dan kebebasan berekspresi” sebagai “sesuatu yang memungkinkan pembangunan berkelanjutan” yang diperlukan. Akan tetapi, dalam negosiasi yang menghasilkan SDG yang diusulkan, Majelis Umum sekarang ini mempertimbangkan untuk mengadopsi, tetapi referensi draf mengenai “media independen” dan “kebebasan berekspresi” dihapuskan dalam tanggapan pada keberatan dari beberapa anggota PBB yang berpengaruh.

Namun, yang bertahan sampai pada teks akhir, sebagaimana kesepuluh dari 10 ‘target’ dalam ke 16 dari 17 tujuan yang direkomendasikan, merupakan syarat untuk semua negara untuk “menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan yang mendasar, sesuai dengan legislasi nasional dan perjanjian internasional.”

Sebagaimana para diplomat berkumpul bersama dalam balai-balai Majelis Umum PBB untuk negosiasi akhir agenda pasca tahun 2015, ada perlawanan mendalam terhadap segala penulisan draf kembali atau pengurangan dari proposal yang secara susah payah dicapai melalui kompromi untuk 17 tujuan. Hal ini terjadi karena adanya kepedulian bersama bahwa segala keuntungan yang mungkin dalam ketepatan atau hal yang bersifat praktis akan kalah atas kerugian dalam substansi dan dampak. Tetapi beberapa dari 169 yang secara tepat disebut ‘target’ tetap dipertimbangkan, tapi rentan terhadap pelemahan atau eliminasi yang efektif melalui penugasan indikator statistik resmi atau indikator faktual lainnya.

Indikator akhir ini akan ditentukan pada bulan Maret 2016 oleh negara anggota PBB, melalui Komisi Statistik PBB, dengan seleksi mereka didorong oleh pertimbangan politik dan praktikal. Ada kepedulian yang pantas mengenai kapasitas banyak negara, dan kemudian sistem PBB secara keseluruhan, untuk mengukur dan memantau tujuan-tujuan baru yang kompleks ini. Seperti dicatat seorang diplomat selama perdebatan

agenda pasca tahun 2015, SDG yang diusulkan secara keseluruhan jika diberlakukan akan mewajibkan lembaga-lembaga PBB untuk memantau 32.617 rangkaian data yang berbeda dari 193 pemerintah pada 169 target setiap tahunnya – suatu tugas yang ditakutkan oleh banyak pihak akan menyusahkan secara politik dan teknis, dan bahkan tidak mungkin. Dan banyak target yang diusulkan akan memerlukan dua indikator atau lebih.

Namun, ahli-ahli PBB mengakui bahwa kemajuan pada akses terhadap informasi tidaklah susah direkam jejaknya. Banyak pemerintah dan aktivis masyarakat sipil dari Utara dan Selatan secara kuat mendukung target tentang akses terhadap informasi, memperbaiki kesempatan dari pemantauan yang bermakna. Kelompok hak-hak asasi manusia internasional, dalam pesan bersama ke PBB sebagai perwakilan masyarakat sipil yang bertemu dengan pejabat PBB di New York pada permulaan tahun penyampaian agenda pasca tahun 2015, menekankan pada kebutuhan untuk “pemantauan yang transparan dan mekanisme akuntabilitas pada tingkat nasional yang didukung oleh lingkungan yang aman dan bebas bagi masyarakat sipil, dan akses terhadap informasi.”

Pada bulan Januari, ahli-ahli dalam Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB mengusulkan bahwa UNESCO memantau adopsi dan implementasi undang-undang akses terhadap informasi, serta kasus-kasus pembunuhan atau penculikan jurnalis ketika mereka bertugas. Pada bulan Maret, Komisi Statistik PBB mengeluarkan penilaian awal dari indikator PBB lainnya yang diusulkan untuk SDG 16.10. Yang pertama akan mengukur akses terhadap informasi dengan metrik statistik ini: *“Persentase dari anggaran, pemerolehan, pendapatan, dan konsesi sumber daya alam pemerintah yang secara publik tersedia dan dapat diakses dengan mudah.”*

Proposal terakhir itu, dari proses konsultasi PBB, digambarkan secara buruk pada beberapa tingkat. Pertama, proposal ini membatasi ruang lingkup dari ‘informasi yang dapat diakses’ menjadi data fiskal dan kontraktual pemerintah – penting, iya, tetapi hanya potongan kecil dari informasi publik yang diperlukan untuk menilai kemajuan terhadap semua 17 tujuan, dan bahkan fraksi yang lebih kecil lagi dari informasi universal yang sangat luas yang kita perlukan untuk memberikan pilihan terdidik mengenai masa depan kita. Kedua, proposal ini mengadopsi ukuran kepatuhan dari ‘pihak pemasok’ yang sempit – dari rahasia apa yang pemerintah pilih untuk diberitahukan kepada masyarakat umum – dan bukan berdasarkan pendekatan atas hak-hak, berakar pada prinsip akses publik yang secara hukum dijamin terhadap apa yang seharusnya menjadi informasi publik,

apakah dari pemerintah atau dari pihak lainnya. Pada akhirnya, bahkan tanpa memperhatikan dua keberatan pertama, indikator ini akan beroperasi pada perkiraan yang aneh bahwa ada cara yang objektif untuk mengetahui dan secara aritmatika mengukur kirasannya penuh dari informasi anggaran dan kontraktual yang disimpan oleh lembaga-lembaga publik di semua negara-negara, apakah secara publik diungkapkan atau tidak, dan kemudian memperhitungkan berapa persen dari data merupakan rahasia – sebagai angka statistik resmi!

Proposal yang lebih sederhana dan jauh lebih baik adalah proposal alternatif yang diusulkan oleh SDSN (*Sustainable Development Solutions Network* = Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan) PBB: “Keberadaan dan implementasi undang-undang nasional dan/atau jaminan konstitusional pada hak terhadap informasi.” Indikator ini tidak hanya berdasarkan hak-hak, tetapi juga meliputi tes faktual yang tidak dapat dibantah: Apakah ada undang-undang resmi atau ketentuan konstitusional mengenai akses terhadap informasi, atau tidak? Mayoritas negara anggota PBB telah mengadopsi jaminan hukum seperti ini, kebanyakan dalam satu dekade terakhir. Suatu tujuan kepatuhan nasional secara universal dengan komitmen SDG yang diusulkan ini akan menjadi secara praktis dapat diperoleh dan secara mudah diukur.

Perjalanan menuju adanya undang-undang akses terhadap informasi hanyalah langkah pertama. Memantau ‘implementasi’ undang-undang A21 secara politik menantang, karena undang-undang ini selalu mencakup analisa realitas kebebasan pers, pertimbangan kebebasan berekspresi yang lebih luas, dan akses warga negara terhadap informasi ini, terutama secara digital. Namun, adopsi dan penegakan jaminan hukum adalah kuncinya. Hanya merekam jejak penyingkapan pemerintah secara sukarela akan informasi resmi tidaklah cukup untuk diterima.

Segala analisa ‘implementasi’ SDG 16.10 akan perlu menjadi faktor dalam kebebasan pers. Tanpa pers independen yang secara bebas memperoleh dan secara terbuka menganalisa serta secara luas menyebarkan informasi yang relevan dengan SDG, suatu janji formalitas dari ‘akses terhadap informasi’ menjadi tidak bermakna atau sia-sia. Prinsip ini sudah secara implisit berada dalam draf SDG 16.10: ‘kebebasan mendasar’ yang dicantulkannya meliputi kebebasan berekspresi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB dan Perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang mengikat secara hukum, yang menyatakan bahwa semua orang di semua negara

seharusnya bebas untuk ‘mencari, menerima, dan menyebarkan informasi, melalui segala media, dan tanpa memperhatikan perbatasan.’

Dengan penuh harapan, kedua perangkat indikator SDG yang diusulkan menerima pernyataan dasar itu, dan mengusulkan indikator akses terhadap informasi kedua pada kebebasan pers. Namun, keduanya difokuskan secara statistik dan secara terlalu sempit pada pembunuhan dan penculikan para jurnalis, tanpa adanya konteks analitis yang lebih luas:

Komisi Statistik PBB: *Jumlah jurnalis, personel media yang terkait, dan para advokat hak-hak asasi manusia yang terbunuh, diculik, menghilang, ditahan, atau disiksa selama masa 12 bulan.*

SDSN: *Jumlah para jurnalis dan personel media yang terkait yang secara fisik diserang, tidak secara sah ditahan, atau dibunuh sebagai hasil dari upaya melakukan kegiatan mereka yang sah.*

Ini harus dipuji, secara konseptual. Hal ini menunjukkan bahwa para ahli statistik dan ahli lainnya PBB yang dikonsultasikan untuk tujuan ini menerima prinsip bahwa kebebasan pers merupakan prasyarat untuk akses publik yang sesungguhnya terhadap informasi, sebagaimana dihimbau dalam target draf SDG 16.10. Namun sebagai indikator yang berdiri sendiri tidaklah mungkin diterima oleh negara anggota PBB, baik secara politik atau secara statistik, karena Komisi Statistik telah memberikan tanda-tandanya. Kebanyakan lembaga-lembaga statistik nasional yang dikonsultasikan oleh Komisi Statistik pada draf indikator-indikator beranggapan bahwa pengukuran yang diusulkan ini tidaklah layak ataupun tepat untuk negara-negara anggota, atau sebagai tambahan dari sistem PBB.

Perlawanan yang terjadi terhadap proposal ini tidaklah mengejutkan. Namun, pendekatan statistik yang sempit ini tidaklah diperlukan, atau disarankan, karena penilaian kebebasan pers yang lebih baik dan lebih konseptual telah digunakan oleh PBB. Negara anggota PBB seharusnya memberdayakan UNESCO, yang mempunyai mandat untuk mempromosikan kebebasan pers, untuk menyediakan apa yang disebut oleh Komisi Statistik ‘peninjauan ahli’ – laporan-laporan analitis yang melengkapi indikator-indikator yang berdasarkan data.

Penelitian UNESCO mengenai pengembangan media independen telah menyampaikan laporan dan penghargaan Hari Kebebasan Pers Dunia setiap tahun serta pernyataan-pernyataan oleh Direktur Jenderal yang

mengutuk pembunuhan para jurnalis. Laporan-laporannya lebih dari sekedar perhitungan tahunan yang menyeramkan atas ancaman-ancaman dan kekerasan untuk mempertimbangkan konteks-konteks hukum, politik, budaya, dan ekonomi nasional secara keseluruhan dimana media beroperasi. UNESCO meneliti “Rencana Aksi PBB mengenai Keamanan Jurnalis dan Isu Impunitas” pada tahun 2012, berdasarkan pada resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum yang mendukung “lingkungan yang bebas dan aman untuk jurnalis dan pekerja media, baik dalam situasi konflik maupun dalam situasi tidak adanya konflik, dengan pandangan untuk memperkuat perdamaian, demokrasi, dan pembangunan di seluruh dunia.” Rencana Aksi ini menghimbau pada lembaga-lembaga PBB untuk berkoordinasi dan melaporkan pada dukungan untuk negara-negara untuk meloloskan legislasi “yang menguntungkan kebebasan berekspresi dan informasi.” Laporan-laporan pada kemajuan Rencana Aksi ini sudah siap dapat dimasukkan ke dalam proses pengukuran untuk Target 16.10.

“Indikator pengembangan media” dari UNESCO itu sendiri: “suatu kerangka untuk menilai pengembangan media” – yang sangat didukung oleh negara-negara anggota PBB yang meneliti Program Internasional UNESCO untuk Pembangunan Komunikasi – telah digunakan untuk melakukan penilaian kemandirian dan keefektifan media berita di 28 negara. Kerangka UNESCO ini menganalisa lima kategori dari faktor-faktor yang terkait, mulai dari pembuatan peraturan dan lingkungan ekonomi sampai pada akses publik terhadap informasi resmi akan kasus-kasus ancaman dan serangan terhadap jurnalis. Hal yang sama juga terjadi pada dua ranking kebebasan pers independen yang paling terkenal – indeks tahunan yang dipublikasikan oleh RSF (*Reporters sans Frontieres* = Wartawan tanpa Batas) di Perancis dan Rumah Kebebasan Amerika Serikat – yang menggunakan kriteria yang banyak dan beragam, termasuk tetapi tidak terbatas pada kematian, penculikan, dan serangan lainnya terhadap jurnalis. (Penyalahgunaan seperti yang disebutkan merupakan salah satu dari tujuh kategori dalam indeks RSF, selain kemajemukan, kemandirian, lingkungan politik, kerangka legislatif, transparansi, dan infrastruktur nasional untuk operasi media berita).

Tanpa diragukan, penculikan dan pembunuhan para jurnalis yang bekerja merupakan pelanggaran yang serius terhadap hak-hak asasi manusia – tidak hanya atas hak-hak para korban itu sendiri, tetapi juga hak-hak semua orang, karena semua ini merupakan tindakan yang disengaja dalam melakukan penyensoran dan intimidasi yang ditujukan utamanya pada hak publik untuk mengetahui sesuatu. Semua kasus-kasus ini seharusnya

secara terperinci didokumentasikan, secara publik dibatalkan dan secara agresif dituntut oleh pihak berwenang yang tepat. Lebih banyak hal seharusnya dilakukan untuk menjaga kemampuan para jurnalis untuk bekerja secara bebas dan aman, tanpa takut akan tindakan balasan dengan kekerasan. Namun, jumlah kematian atau penculikan terkait pekerjaan dalam setiap negara seharusnya tidak digunakan sebagai 'perwakilan' statistik untuk kebebasan pers yang lebih luas – karena hal tersebut bukanlah sebuah perwakilan. Negara-negara dimana sedikit atau tidak ada jurnalis independen diijinkan untuk beroperasi mempunyai secara definisi sedikit kasus mengenai para jurnalis yang dibunuh, atau diculik, atau dipenjara. Melihat pada angka-angka itu secara terpisah dan tersendiri dapat sangat menyedihkan.

Dalam zona-zona konflik, seperti di Syria dan Irak dan Mali, para jurnalis dibunuh dan diculik oleh dan pada saat meliputi pemberontakan yang menimbulkan perang melawan pihak berkuasa setempat. Banyak jurnalis telah juga dibunuh selama tahun-tahun terakhir di negara-negara seperti Meksiko dan Filipina yang dalam banyak cara secara meningkat menjadi terbuka dan demokratis, dengan lebih banyak organisasi berita melaporkan pada kelompok-kelompok penjahat dan korupsi politik – dan dengan lebih banyak wartawan diancam dan dibunuh sebagai tindakan balasan karena menjadi target dalam pelaporan mereka. Negara dengan jumlah jurnalis terbanyak yang dibunuh dalam seperempat waktu pertama tahun 2015 adalah di Perancis, karena pembantaian masal Charlie Hebdo yang tragis. Apakah Perancis harus ditempatkan pada urutan pertama pada daftar kebebasan pers?

Pemerintah seharusnya dimintai pertanggungjawabannya untuk membawa para pembunuh ini ke pengadilan. Kejadian tidak dihukumnya para pembunuh jurnalis merupakan indikator kebebasan pers yang terkait lebih baik secara kebalikan daripada jumlah kematian itu sendiri, tetapi hal itu dapat diukur secara terpercaya hanya setelah waktu yang lama, oleh ahli-ahli independen, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapasitas pemerintah dan konflik bersenjata serta tingkat pembunuhan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Komite untuk Perlindungan Jurnalis menghasilkan 'indeks impunitas' selain dari dokumen tahun yang resmi yang berisi tentang para jurnalis yang dibunuh dan dipenjara. Namun, suatu lembaga PBB atau institusi antar-pemerintahan lainnya akan tidak dilengkapi dengan baik secara praktis dan politis untuk menjalankan tugas seperti itu.

Penculikan para jurnalis – suatu masalah yang terkait dan sedang berkembang – adalah sesuatu yang sulit untuk diikuti perkembangannya dalam segala cara sistematis. Kebanyakan kasus-kasus bahkan tidak dilaporkan ketika sedang terjadi, karena penjahatnya mengancam agar kejadian ini tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, karena kejamnya para pelaku, dan karena ada kepedulian bahwa publisitas dapat mengganggu upaya mengamankan pembebasan para sandera. Dan pemerintah jarang terlibat dalam kasus-kasus ini.

Penuntutan dan mempenjarakan para jurnalis merupakan pengukuran yang lebih baik dari tingkah lalu para petugas terhadap pers, tetapi hal ini bersifat problematik, setidaknya untuk lembaga PBB seperti UNESCO, atau lembaga antarpemerintahan yang serupa, untuk menantang aksi pengadilan hukum atau berdasarkan bukti oleh negara anggota mereka.

Kebebasan pers merupakan prasyarat untuk akses terhadap informasi, dimana indikator SDG harus terefleksikan. Tanpa penyebaran, perdebatan, dan analisa media independen, informasi dari pemerintah dan lainnya – termasuk data secara langsung terkait dengan semua tujuan dan target yang diusulkan – tidak akan mungkin mencapai sebagian besar masyarakat di dunia, apalagi dipertimbangkan sebagai sesuatu yang signifikan atau terpercaya. Tetapi untuk memantau kebebasan pers secara adil dan ketat, dengan tujuan mengembangkan akses publik dimana pun sebagai bagian dari tujuan-tujuan pembangunan baru universal PBB, hal ini harus dinilai secara analitis, sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari “kebebasan yang mendasar” kita, daripada hanya sekedar statistik atau angka-angka.

Diplomat dan profesional staf di PBB yang sangat mendukung target SDG 16.10 yang diusulkan telah menekankan kepada aktivis masyarakat sipil bahwa transparansi yang bermakna dan ketentuan dan indikator akuntabilitas dalam SDG memerlukan keterlibatan publik yang berkelanjutan pada isu ini – dan peliputan aktif perdebatan oleh jurnalis yang kepentingannya pada komitmen mengenai akses terhadap informasi pasca tahun 2015 akan terbantu untuk dilindungi.

Masyarakat sipil telah bergerak dalam dukungan inklusi dari suatu komitmen pada akses publik terhadap informasi dan media independen dalam Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan baru PBB.

Inklusi dari komitmen yang jelas pada ‘akses terhadap informasi’ dalam SDG telah secara konsisten didukung oleh partisipasi masyarakat sipil dalam konsultasi pasca tahun 2015 serta oleh penasihat ahli PBB pada tujuan-tujuan global baru, termasuk dalam laporan-laporan Panel Tingkat Tinggi Orang-Orang dengan Jabatan Penting dan Kelompok Penasihat Ahli Sekretaris Jenderal mengenai “Revolusi Data untuk Pembangunan Berkelanjutan.” Pada bulan Februari 2014, suatu koalisi atas lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil nasional, regional, dan internasional yang mendedikasikan pada kebebasan berekspresi dan dukungan untuk media independen mengirimkan pernyataan bersama yang meringkaskan posisi mereka bersama pada isu kritis ini kepada Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum pada agenda pembangunan global pasca tahun 2015. Pernyataannya menyatakan:

Agenda Pasca Tahun 2015: Akses terhadap informasi dan media independen adalah penting untuk pembangunan.

Pembangunan manusia pada dekade-dekade di masa mendatang akan tergantung pada akses orang-orang terhadap informasi. Inovasi dalam media dan teknologi baru memungkinkan perluasan kemajuan ekonomi, sosial, dan politik secara besar-besaran. Kami percaya bahwa kebebasan berekspresi dan akses terhadap media independen merupakan hal yang penting bagi pembangunan demokrasi dan ekonomi. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan media merupakan alat untuk memajukan pembangunan manusia dan merupakan tujuan akhir dengan sendirinya. Kami, yang menandatangani pernyataan ini, dengan demikian menghimbau pada Kelompok Kerja Terbuka untuk secara penuh mengintegrasikan rekomendasi pemerintahan dari Laporan Panel Tingkat Tinggi Orang-Orang dengan Jabatan Penting PBB (Kemitraan Global Baru: Memberantas Kemiskinan dan Mentransformasikan Ekonomi melalui Pembangunan Berkelanjutan) ke dalam Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasca Tahun 2015 yang diusulkan, secara khusus dalam kaitannya dengan rekomendasinya untuk:

- *Membentuk suatu tujuan yang khusus untuk “menjamin pemerintahan yang baik dan institusi yang efektif”.*

- *Meliputi komponen-komponen dari tujuan ini dalam suatu klausa untuk ‘menjamin orang-orang menikmati kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan melakukan protes damai, dan akses terhadap media independen dan informasi’ dan untuk “menjamin hak publik terhadap informasi dan akses terhadap data pemerintahan”.*

Pada bulan Agustus 2014, Kelompok Kerja Terbuka mengusulkan 17 SDG kepada Majelis Umum, dimana Target 10 dari draf SDG 16 akan memerlukan negara anggota PBB untuk **“menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan-kebebasan yang mendasar, sesuai dengan legislasi nasional dan perjanjian internasional.”** Pada bulan November 2014, GFMD (Global Forum on Media Development = Forum Global tentang Pengembangan Media) mempresentasikan makalah kepada kelompok ‘Teman-Teman Pemerintahan’ Majelis Umum yang mengidentifikasi indikator-indikator faktual yang tersedia untuk PBB memantau target ini dalam SDG. (<http://gfmd.info/en/site/news/?ls-art15=10>).

Pada bulan Desember 2014, GFMD mengeluarkan pernyataan yang mendukung Sekretaris Jenderal Ban Ki-Moon dalam dukungannya menjamin kebebasan informasi dalam laporan sintesanya pada agenda pembangunan pasca tahun 2015 PBB, dimana dia menyatakan bahwa “kebebasan pers, akses terhadap informasi dan kebebasan berekspresi” adalah hal-hal yang penting yang memungkinkan terjadinya pembangunan berkelanjutan.” (<http://gfmd.info/en/site/news/730/UN-Secretary-General-Freedom-of-Information-and-Media-Needed-For-New-UN-Global-Development-Goals.htm>).

Majelis Umum sekarang ini melakukan pembahasan pada seperangkat akhir SDG yang akan dipresentasikan kepada pemimpin-pemimpin dunia untuk persetujuan mereka pada Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan PBB pada bulan September 2015, berdasarkan pada rekomendasi Kelompok Kerja Terbuka pasca tahun 2015. **GFMD sangat mendukung Target 16.10 yang diusulkan, suatu ketentuan tersendiri dalam tujuan-tujuan baru yang diusulkan yang secara eksplisit memerlukan negara-negara anggota untuk menyediakan publik dengan informasi yang diperlukan untuk ditunjukkan apabila segala tujuan global baru yang disepakati ternyata tercapai.**

BAB 5

JURNALISME WARGA NEGARA: PEMBERDAYAAN KOMUNITAS

Harry Surjadi

Harry Surjadi adalah ahli dalam jurnalisme lingkungan dan komunikasi di Indonesia.

Dalam 10 tahun terakhir – didorong oleh pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) – hampir semua media utama di Indonesia, termasuk media cetak, radio, TV, dan media online mempunyai seksi atau program jurnalisme warga negara. Model jurnalisme warga negara yang paling populer sebagai media utama adalah Kompasiana. Kompasiana merupakan bagian dari dan dikelola oleh Kompas Online dari Harian Kompas.

Di Asia model jurnalisme warga negara yang paling menjanjikan adalah Citizen Journalists Malaysia (Jurnalis Warga Negara Malaysia) dengan situsnya: <http://cj.my/>. Malaysiakini, suatu portal online alternatif, yang memulai cj.my.

Ada contoh-contoh praktek-praktek jurnalisme warga negara dari pandangan media-media utama. Oleh karena itu media-media utama menikmati berita konten bebas tanpa biaya.

Pada tahun 2011, saya (sebagai Fellow Jurnalisme Internasional Ksatria dari Pusat Internasional untuk Jurnalis) mengembangkan praktek jurnalisme warga negara yang berbeda di Kalimantan Barat dengan RuaiTV, suatu stasiun televisi lokal. Ada beberapa pertimbangan dan alasan mengapa saya melakukan hal ini.

1. Saya menemukan definisi yang sempurna dari jurnalisme warga negara di *Encyclopedia of American Journalism* (Ensiklopedia dari Jurnalisme Amerika), yang bunyinya: “Jurnalisme warga negara dilakukan oleh warga negara yang sering dimarjinalkan dan tidak dikaitkan dengan media berita utama...” (Vaughn, 2008: him. 101).
2. Media utama Indonesia hanya melayani 20-30% dari masyarakat yang berada pada tingkat atas piramida populasi. Mereka adalah masyarakat tingkat menengah dan tingkat atas.

3. Perusahaan-perusahaan besar memiliki sebagian besar dari media utama di Indonesia dan beberapa pemilik adalah ketua partai politik.
4. Media utama Indonesia cenderung untuk melupakan peran-peran utama mereka sebagai pengawas, memberikan suara kepada mereka yang tidak bersuara, hanya memberitakan kebenaran, dan menjadi tiang penopang demokrasi keempat.
5. Sebagaimana dijelaskan oleh Banda (2010), praktek-praktek jurnalisme warga negara diharapkan dapat memajukan aspek-aspek kewarganegaraan demokratis. Ada tujuh aspek kewarganegaraan demokratis yang digarisbawahi, yakni: kepemilikan saluran komunikasi; partisipasi warga negara; akses dan aksesibilitas; diskusi atau perdebatan yang penuh perhatian di antara warga negara; pembuatan keputusan atau aksi oleh warga negara; kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat publik agar ada transparansi dan akuntabilitas; dan terjadinya interaksi.

PARA PERANTARA INFORMASI

Ketika mereka memutuskan untuk bergabung dengan lokakarya pelatihan jurnalisme warga negara yang difasilitasi oleh RuaiTV pada tahun 2011-2012, para petani, masyarakat pribumi, dan masyarakat setempat di Kalimantan Barat tidak dapat membayangkan bagaimana mengirimkan pesan-pesan sms dengan menggunakan telepon genggam mereka dapat membantu menyelesaikan masalah mereka. Namun, sejak lokakarya itu, mereka telah membuat telepon genggam mereka menjadi senjata yang penuh kekuatan untuk membela hak-hak mereka atas tanah/hutan, untuk memantau dan melaporkan kesalahan pegawai negeri serta penjualan kayu yang dilarang hukum dan menyoroti masalah-masalah sosial lainnya.

Tiga konflik antara masyarakat setempat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah diselesaikan karena pesan sms yang menjadi berita yang dilaporkan oleh jurnalis warga negara yang terlatih. Jembatan yang rusak diperbaiki beberapa hari setelah RuaiSMS mengungkapkan bahwa jembatan itu rusak.

RuaiSMS merupakan saluran komunikasi yang menggunakan telepon genggam dan FrontlineSMS untuk memberdayakan para masyarakat setempat dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri, dan sekitar 200

orang di Kalimantan Barat dan 250 orang di Kalimantan Tengah telah terlatih sebagai jurnalis warga negara.

Ketika saya melakukan hal ini, saya mencoba berpikir di luar pemikiran jurnalisisme dan saya menyebut ini sebagai model komunikasi rakyat biasa, suatu ‘perantara informasi’.

Para perantara informasi ini adalah para jurnalis warga negara yang ditugaskan dengan peran khusus untuk menjadi perantara informasi yang penting bagi anggota komunitas dan bagi publik umum serta media utama. Pada saatnya nanti kerja dan keterampilan mereka akan dapat ditingkatkan dengan belajar menggunakan perekam jejak GPS, dan juga melakukan pelaporan dengan video dengan telepon genggam canggih atau kamera digital.

Ada empat komponen dari model komunikasi perantara informasi.

1. Perantara informasi adalah anggota komunitas terpercaya.
2. Mereka telah mengikuti lokakarya pelatihan selama dua hari.
3. Saluran komunikasi dengan menggunakan SMS juga menghubungkan mereka dengan media utama.
4. Mereka menyediakan informasi, untuk anggota komunitas dan mereka di tempat-tempat lainnya.

Saya terus mengembangkan model komunikasi ini di Sumatera dan provinsi-provinsi lainnya dengan dukungan dari BP REDD+ dan World Wildlife Fund (WWF). Sekarang ini, semua perantara informasi yang terlatih dapat mengirimkan sms berita mereka ke Tempo.co untuk media utama nasional dan Pers Daerah – jaringan surat kabar lokal milik Kompas Gramedia.

KESIMPULAN

PENILAIAN YANG MASUK AKAL: *BALI ROAD MAP* (PEDOMAN BALI) UNTUK PERAN-PERAN MEDIA DALAM MEWUJUDKAN MASA DEPAN YANG KITA INGIN UNTUK SEMUA PIHAK.

Guy Berger, Charaf Ahmimed, dan Mikel Aguirre Idiaquez.

Para penulis bab ini adalah anggota dari Sekretariat UNESCO.

Bukanlah suatu kebetulan bahwa Forum Media Global pada tahun 2014 menghasilkan suatu “Pedoman”, daripada sebuah “pernyataan” akhir atau suatu “deklarasi”.

Hal ini terjadi karena pertemuan ini mempunyai suatu maksud yang lebih dari sekedar simbolisme murni. Dari permulaan, niatnya adalah untuk mengumpulkan dan menyatukan pandangan-pandangan ke dalam suatu dokumen berguna secara praktis – suatu pedoman. Suatu pedoman yang merefleksikan agenda pembahasan, dan berfungsi sebagai rekaman poin-poin kunci yang telah dibuat. Suatu pedoman yang juga sebagai panduan yang menunjukkan jalan ke depan untuk kegiatan tindak lanjut.

Bali Road Map (Pedoman Bali)⁵² lainnya telah dihasilkan tujuh tahun sebelum yang baru ini. Pada saat itu, fokusnya adalah merencanakan bagaimana pemerintah dapat menghadapi perubahan iklim, dan pedoman itu dimasukkan ke dalam konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2009 di Copenhagen.

Pedoman Bali tahun 2007 telah dipertanyakan sebagai dokumen yang terlalu optimis dan meremehkan kompleksitas⁵³, tetapi dokumen ini meskipun begitu benar-benar membantu membentuk pemahaman global bahwa pembangunan harus berkelanjutan. Sekarang ini, momentum tentang lingkungan terus berlanjut dan pada bulan Desember 2015, Paris

⁵² http://unfccc.int/key_documents/bali_road_map/items/6447.php

⁵³ http://unfccc.int/key_steps/bali_road_map/items/6072.php

akan menjadi tuan rumah menyelenggarakan Konferensi ke 21 dari Pihak-Pihak dalam Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.⁵⁴

Pedoman Bali tahun 2014 ditujukan untuk maksud yang berbeda. Pedoman ini menunjukkan cara bagi dunia untuk memperbaiki pembangunan dengan memahami bahwa peran-peran media adalah penting untuk alasan ini. Pedoman tahun 2014 ini merupakan himbauan yang konkrit untuk melakukan aksi untuk mengikutsertakan media pada agenda pembangunan global. Pedoman ini mencakup banyaknya aksi untuk dilakukan oleh pemerintah, media, masyarakat sipil, dan komunitas internasional.

Semua arahan yang diusulkan dalam Pedoman ini bertujuan untuk memperkuat media secara keseluruhan, menjabarkan peran-peran potensialnya, dan menghubungkan semua itu pada pembangunan.

Ini bukanlah tempat untuk mengulangi isi penuh dari Pedoman ini, yang disajikan sebagai Lampiran pada buku ini. Namun, untuk memberikan sedikit gambaran akan Pedoman ini, ada suatu contoh dari Pedoman ini yang mendesak media untuk menyediakan masyarakat dengan informasi yang terkait pembangunan, dan untuk jurnalis melaporkan pada perdebatan-perdebatan mengenai isu-isu pembangunan.

Contoh lainnya adalah Pedoman ini mendorong pemerintah untuk bekerja menuju “akses universal terhadap Internet dan TIK lainnya sebagai alat-alat untuk mewujudkan keuniversalan kebebasan berekspresi, dan dalam cara yang menjamin akses yang setara dan partisipasi untuk laki-laki dan perempuan.”

Contoh ketiga dalam Pedoman adalah rekomendasi bahwa program-program bantuan internasional seharusnya mempertimbangkan pentingnya isu-isu kebebasan berekspresi dalam semua upaya-upaya pembangunan.

Dengan cara ini, Pedoman Bali tahun 2014 menyoroti dimana harta kekayaan disembunyikan. Ini adalah hasil dari pengumpulan kebijaksanaan dari banyak pikiran pada acara Forum Media Global.

⁵⁴ <http://www.cop21paris.org/>

PEMBUATAN PEDOMAN

Pedoman Bali muncul dari proses yang bersifat transparan dan konsultatif. Sebuah draf didistribusikan pada permulaan acara Forum Media Global. Kontennya kemudian diperkaya dengan poin-poin yang dibuat oleh para peserta selama prosidingnya. Penulisan pesan pada Twitter pada #media4future juga dijadikan pertimbangan. Beberapa peserta memberikan komentar-komentar tertulis yang terperinci.

Suatu panitia ahli bekerja berulang kali pada versi-versi yang berkembang, menyimpulkan dengan edisi akhir yang secara satu pikiran diadopsi oleh konferensi ini.

Anggota-anggota dari kelompok ahli ini adalah Chelsia Chan (Dewan Pers Indonesia), Toby Mendel (Pusat untuk Hukum dan Demokrasi), Lisa French (Wakil Dekan, Sekolah Media & Komunikasi, RMIT University), Ermiel Thabrani, Gati Gayatri, dan Ides Lustarini (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia), serta Andrea Cairola dan Charaf Ahmimed (UNESCO). Kerja mereka memfinalisasikan Pedoman ini telah memberikan kita suatu panduan yang membantu semua orang untuk memahami potensi media dalam pembangunan berkelanjutan. Ini berarti bahwa pada meja sekarang ini ada suatu grafik yang membantu menggabungkan dan menentukan pemikiran kita mengenai media dan masa depan. Apakah anda berada di pemerintahan, media (pekerja profesional, atau pengguna media sosial), dalam komunitas atau bisnis internasional, ada saran-saran yang relevan buat anda.

Pedoman Bali tidaklah wajib atau mengikat. Isinya jauh dari berupa perintah, melainkan menawarkan petunjuk. Pedoman ini merupakan sumber daya pengetahuan untuk semua aktor atau lembaga yang ingin menggunakannya untuk pembuatan keputusan mereka.

Yang paling penting adalah Pedoman menggarisbawahi pentingnya kebebasan berekspresi serta media independen pada atlas pembangunan yang lebih luas.

Kunci dari hal ini adalah himbauan dalam Pedoman ini agar dibawa dan diakui ke dalam SDG (*Sustainable Development Goals* = Tujuan-Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan) yang sedang dibahas.

Direncanakan difinalisasi pada bulan September 2015, SDG akan mengabarkan bagaimana lembaga-lembaga PBB dan pemerintah bekerja bersama-sama dalam Kerangka Bantuan Pembangunan PBB tingkat nasional. Meskipun SDG dikembangkan di dalam PBB dan akan memberikan dampak pada PBB dan kemitraan pemerintah pada tingkat negara, SDG juga mempunyai gema (baca: pengaruh) yang jauh lebih luas.

Dampak yang lebih luas ini pada masyarakat akan berpengaruh pada peran-peran pembangunan dan prioritas-prioritas dari lembaga donor internasional, bank, bisnis, masyarakat sipil, akademika, dan media, misalnya. Secara keseluruhan, SDG akan menyediakan koordinasi yang lebih baik dan lebih fokus di dalam negara-negara dan di seluruh dunia – dan Pedoman ini menunjukkan pentingnya isu-isu media dalam semua ini.

UNESCO merasa senang tidak hanya bersama-sama menjadi tuan rumah dengan Indonesia menyelenggarakan acara Forum Media Global yang menghasilkan Pedoman Bali tetapi juga telah berkontribusi pada pemikiran dibalik keduanya. Masukan-masukan yang berharga untuk membentuk Pedoman ini adalah makalah-makalah riset oleh sektor Komunikasi-Informasi UNESCO⁵⁵, serta Deklarasi Paris yang berasal dari konferensi pada tanggal 3 Mei 2014 pada Hari Kebebasan Pers Dunia⁵⁶.

Pejabat pada Organisasi ini telah memainkan peranan dalam kegiatan tindak lanjut. Mereka berbicara mengenai Forum Media Global kepada Sekretaris Jenderal PBB selama pertemuan dia dengan Tim Negara PBB di Bali pada bulan Agustus akhir, dan peranya lebih lanjut disampaikan kepada peserta konferensi Aliansi Peradaban Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bali, yang berlangsung tepat setelah acara Forum Media Global.

Juga patut disebutkan bahwa Direktur Jenderal UNESCO yang bertindak berdasarkan permintaan Pedoman Bali ini menyatakan bahwa dokumen ini disediakan untuk pada aktor-aktor kunci. Dalam surat kepada beliau, mengakui bahwa telah menerima Pedoman Bali, Ban Ki Moon mengekspesikan penghargaan untuk apa yang beliau jelaskan sebagai saran-saran konstruktif dalam Pedoman Bali menuju suatu agenda pembangunan yang transformatif. Beliau selanjutnya menyatakan bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan pers, media independen, dan hak atas akses terhadap informasi merupakan hal yang sangat penting. Semua itu

⁵⁵ <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002300/230042E.pdf>

⁵⁶ http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/WPFD/2014/wpfd_2014_statement_final.pdf

tidak seharusnya diabaikan dalam pembahasan agenda pasca tahun 2015 yang sedang berlangsung.

Tetap berpedoman pada hal di atas, pada bulan Desember 2014 Sekretaris Jenderal mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul “Jalan menuju Kewibawaan pada tahun 2030: Mengakhiri Kemiskinan, Mentransformasikan Semua Kehidupan, dan Melindungi Planet Bumi”. Dokumen ini secara jelas menyatakan: “Kebebasan Pers dan akses terhadap informasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan bergabung bersama merupakan hal-hal yang memungkinkan terjadinya pembangunan berkelanjutan.”

JALAN MENUJU PEMBANGUNAN

Batas sampai mana dokumen SDG akhir akan mengikuti arahan ini tetap belum bisa dilihat. Namun, apapun yang terjadi, pandangan yang bertahan lama dari Pedoman Bali adalah: bagaimana masyarakat mendefinisikan dan menyampaikan pada penghubung pembangunan berdasarkan pada kebebasan berekspresi dan hasil-hasilnya seperti kebebasan pers dan akses terhadap informasi.

Ini sangat penting untuk keberhasilan SDG, apakah secara penuh diacu pada hal itu atau tidak. Anda dapat melihat nilai dari pandangan ini dalam kaitan dengan fakta bahwa tidak ada satu formula yang muat untuk semua untuk pembangunan yang ada di setiap negara. Melainkan, dalam setiap kasus nasional, ada kebutuhan untuk menanggapi pada masalah-masalah dan potensi-potensi khusus.

Sebagai contohnya, kita ambil SDG yang diusulkan untuk mengembangkan energi yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi untuk semua pihak. Ada banyak jalan berbeda untuk mencapai poin ini. Metode terbaik untuk suatu negara mengidentifikasi apa yang sesuai untuk masyarakatnya yang terbaik adalah bersifat terbuka dalam perdebatan ide-ide dan kepentingan-kepentingan yang beragam dalam isu-isu ini. Semua ini kemudian perlu dipertimbangkan, dikompromikan, dan dileburkan ke dalam proyek nasional untuk energi yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, bagaimana kita menginterpretasikan SDG, memprioritaskan SDG untuk suatu negara dan anggaran nasional dan memantau serta mengevaluasi kemajuannya, tergantung pada arus bebas informasi. Agar ini dapat terjadi, kebebasan berekspresi merupakan

landasannya, bersama dengan komponen-komponennya seperti kebebasan media, kemajemukan, dan kemandirian – serta keamanan jurnalis.

Pedoman Bali menegaskan bahwa “peran potensial media dalam menopang bagaimana suatu negara membentuk pembangunan, berbagi ide dan inovasi, dan meminta pertanggungjawaban para pihak yang berkuasa”, sambil menekankan bahwa “hal ini hanya dapat diwujudkan apabila media itu bebas, majemuk, dan independen dan apabila ada keamanan bagi pihak-pihak yang menghasilkan jurnalisme.”

Pemerintah dapat menerima peran-peran media dalam pembangunan dengan mempromosikan dan menghormati kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers dan hak untuk mencari dan menerima informasi. Mereka dapat mengakui dalam aksi-aksi bahwa hak-hak yang mendasar ini merupakan hal-hal yang juga memungkinkan terjadinya pembangunan.

Ada juga potensi pembangunan yang utama untuk saluran media, pekerja profesional media, dan pengguna media sosial. Jurnalisme profesional dan independen, bersama dengan penggunaan media sosial yang beretika, dapat memberikan kontribusi yang sangat besar pada bagaimana masyarakat membentuk jalan-jalan nasional menuju pembangunan. Keberhasilan media sosial yang dihasilkan oleh ruang berita pemuda selama Forum Media Global merupakan satu indikasi akan apa yang orang muda dapat kontribusikan. Apakah media dapat memajukan pembangunan berkelanjutan selama jangka waktu yang lama tergantung pada keterlibatan pemuda. Mengakui hal ini, Forum Media Global melibatkan lebih dari 70 pemuda dari sekitar Asia-Pasifik yang menambahkan elemen yang menghidupkan diskusi forum, menyediakan pencakupan hasil-hasil forum, dan membantu menggerakkan perdebatan yang sehat mengenai media sosial. Pedoman Bali merefleksikan pengaruh dari para pemuda.

SOROTAN PADA RUTE

Suatu pedoman merupakan grafik yang membantu mengarahkan para pemangku kepentingan mengenai peran-peran media yang optimal dan masa depan. Pedoman ini memainkan peranannya dengan mengindikasikan karakteristik-karakteristik kunci dari pandangan-pandangan yang seharusnya dipertimbangkan dalam perjalanan.

Acara Forum Media Global memainkan peranan ini untuk Pedoman Bali dengan mengidentifikasi sejumlah petunjuk-petunjuk kunci. Hal-hal ini meliputi:

- Konteks global sebagaimana diringkaskan dalam *World Trends in Freedom of Expression and Media Development (Tren-Tren Dunia dalam Kebebasan Bereksresi dan Pengembangan Media)* UNESCO,⁵⁷ yang diluncurkan di wilayah Asia selama acara Forum Media Global.
- Pentingnya Internet untuk pembangunan, yang telah dibahas berkali-kali, termasuk dalam konteks studi konsultatif UNESCO mengenai akses online, kebebasan bereksresi, privasi, dan etika.
- Pentingnya memberdayakan masyarakat melalui program literasi media dan informasi, dan peluncuran GAPMIL (*Global Alliance for Partnerships in MIL* = Aliansi Global untuk Kemitraan dalam Literasi Media dan Informasi) untuk wilayah Asia.
- Nilai kritis kesetaraan gender untuk pembangunan, dan penelitian yang terkait untuk bidang ini dalam susunan kepegawaian dan konten media. Partisipasi GAMAG (*Global Alliance for Media and Gender* = Aliansi Global untuk Media dan Gender) berdasarkan inisiatif dari UNESCO di Bali merupakan suatu petunjuk untuk poin kunci yang menentukan ini.

Juga relevan sebagai poin yang menentukan untuk Pedoman ini, sebagaimana dibahas pada acara Forum Media Global, adalah per tanggal 2 November. Ini merupakan Hari Internasional baru PBB untuk Mengakhiri Impunitas untuk Kejahatan melawan Jurnalis – suatu peristiwa tahunan untuk menyoroti bagaimana isu kebebasan bereksresi ini memberikan dampak pada pembangunan.

Pedoman Bali merupakan suatu ciptaan yang dikembangkan terkait secara langsung dengan latar belakang ini.

⁵⁷ <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/world-trends-in-freedom-of-expression-and-media-development/>

MEMBANGUN JALAN

Kehadiran Irina Bokova pada acara Forum Media Global menunjukkan dukungan untuk acara ini dari tingkat tertinggi. Direktur Jenderal UNESCO berbicara mewakili 195 negara anggota dari Organisasi ini. Beliau menegaskan dalam pidato penutupannya bahwa “kebebasan berekspresi dan pengembangan media adalah penting untuk menyusun pendekatan pada pembangunan yang baru dan benar-benar berpusat pada manusia.”

Dalam menerangkan, beliau menambahkan: “Kebebasan berekspresi adalah penting untuk kewibawaan, demokrasi, pembangunan berkelanjutan, dialog, perdamaian, dan toleransi. Informasi dan pengetahuan merupakan kunci dalam menyusun masa depan yang kita inginkan untuk semua pihak.”

“Konstitusi UNESCO... menghimbau adanya ‘arus bebas ide-ide dengan kata-kata dan gambar’ – sebagaimana kita membentuk agenda baru untuk mengikuti tahun 2015, mandat ini tidak pernah menjadi sangat penting sebelumnya untuk perdamaian internasional dan untuk kesejahteraan bersama semua masyarakat, untuk masa depan yang kita inginkan untuk semua pihak.”

Selain itu, Irina Bokova mengingatkan bahwa Negara Anggota UNESCO telah menekankan kebutuhan akan kebebasan berekspresi dan akses universal terhadap pengetahuan dan pemeliharaan akses ini yang terefleksikan dalam agenda pembangunan pasca tahun 2015.⁵⁸

“Ide-ide ini, yang merupakan ide-ide yang mempunyai kekuatan, sekarang ini sedang dibahas oleh para Negara Anggota dan saya menyerukan untuk agenda ambisius dengan hak-hak asasi manusia pada intinya. Ini adalah benar-benar semangat Pedoman Bali yang kalian semua telah sepakati,” beliau katakan.

Dengan Pedoman Bali, suatu kontribusi unik telah disampaikan untuk kemajuan. Sekarang jalannya perlu dibangun lebih lanjut, dan kendaraan media yang akan membantu kita mengambil rute ini perlu menjadi ramah lingkungan, diberi kekuatan dengan TIK, dan dirancang dalam cara yang peka gender.

⁵⁸ <http://www.unesco.org/new/en/general-conference-37th/>

DAN MASA DEPAN?

Perjalanan ke depan mempunyai banyak tahapan – mulai dari finalisasi SDG pada bulan September 2015, dan kemudian diperpanjang waktunya sampai dengan tahun 2030 paling tidak. Dalam skenario ini, Pedoman ini:

- Dapat berkontribusi pada jalan pembangunan global bahkan melebihi dari yang disusun pada Majelis Umum.
- Dapat menjadi berharga untuk masing-masing negara dan daerah.

Secara khusus, kantor-kantor UNESCO di Jakarta dan di kantor Jakarta dan wilayah Asia-Pasifik mempunyai Pedoman yang memungkinkan mereka menyusun “perencanaan perjalanan” untuk kerja pembangunan mereka. Ada kebutuhan untuk setiap orang untuk meningkatkan kesadaran mengenai Pedoman Bali, dan untuk memantau, mengevaluasi, dan meninjau dampaknya.

Jelas bahwa Pedoman ini telah diciptakan dalam geolokasi Bali, meskipun relevansinya sangat jauh lebih luas. Suatu Forum Media Global, yang diselenggarakan oleh negara yang maju di Selatan, merupakan sesuatu yang unik. Indonesia diberikan selamat karena memungkinkan terjadinya acara ini.

Telah mengambil inisiatif dan kepemimpinan untuk memulai momentum ini, Indonesia sekarang dapat mempertimbangkan bagaimana melanjutkannya. Misalnya, Pedoman ini dapat secara menguntungkan dibahas kembali pada acara Forum Media Global kedua. Akan ada kebutuhan yang berlangsung untuk memperbaharui rincian, untuk memperluas, dan menggiatkan para pemangku kepentingan.

Karena peran-peran media sangatlah penting untuk pembangunan, Pedoman Bali harus berlanjut sebagai dokumen yang terus relevan di masa depan.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN BALI: PERAN-PERAN MEDIA DALAM MEWUJUDKAN MASA DEPAN YANG KITA INGINKAN UNTUK SEMUA PIHAK.

PEMBUKAAN

Mengingat konvensi-konvensi, deklarasi-deklarasi, dan pernyataan-pernyataan yang menjamin dan menegaskan perlunya hak manusia atas kebebasan berekspresi;

Menegaskan bahwa hak ini meliputi hak atas kebebasan pers dan hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi;

Mengakui bahwa perdamaian dan pembangunan berkelanjutan secara meningkat tergantung pada partisipasi masyarakat terdidik yang memerlukan arus bebas informasi dan pengetahuan, dan bahwa ini pada akhirnya tergantung pada kebebasan berekspresi pada semua bentuk media;

Menegaskan peran potensial media dalam menopang bagaimana suatu negara membentuk pembangunan, berbagi ide-ide dan inovasi, meminta pertanggungjawaban pihak-pihak berkuasa, tetapi menekankan bahwa hal ini hanya dapat diwujudkan dimana media itu bebas, majemuk, dan independen, dan dimana adanya keamanan untuk para pihak yang menghasilkan jurnalisme;

Kesadaran akan pentingnya masyarakat sipil dan publik sebagai pemangku kepentingan kunci dalam baik media maupun pembangunan berkelanjutan, dan kebutuhan untuk menjamin keterlibatan mereka dalam media dan proses-proses pembangunan;

Mempercaya bahwa aktor-aktor media yang cakap dan giat dapat menyediakan forum yang sehat untuk perdebatan publik, serta mengasuh partisipasi orang-orang marjinal dan mereka yang hidup dalam kemiskinan yang kekurangan akses yang setara terhadap komunikasi;

Mengakui bahwa kemampuan aktor-aktor media untuk memenuhi potensi mereka dalam pembangunan juga tergantung pada akses publik terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan terhadap informasi dan pengetahuan;

Mencatat bahwa dunia mempunyai kesempatan baru untuk menyampaikan tujuan-tujuan dan target-target yang jelas dalam bentuk Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca tahun 2015, yang akan menggantikan Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium;

Menekankan pentingnya memasukkan suatu tujuan tentang kebebasan berekspresi dan media independen ke dalam Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca tahun 2015, dan memasukkan pengakuan ini dalam praktek pembangunan yang lebih luas.

DENGAN DEMIKIAN

Acara *Forum Media Global* (Bali, 25-28 Agustus 2014) mengadopsi Pedoman ini untuk mewujudkan potensi-potensi media untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, dan untuk mempromosikan inklusi suatu tujuan yang mengakui pentingnya kebebasan berekspresi dan media independen dalam Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca tahun 2015.

Kami mengusulkan aksi-aksi berikut ini untuk menjadi pertimbangan oleh kelompok-kelompok pemangku kepentingan kunci:

PEMERINTAH

- untuk menghormati kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers dan hak untuk mencari dan menerima informasi, sebagai hak-hak yang mendasar serta hal-hal yang memungkinkan dari tujuan-tujuan agenda pembangunan pasca tahun 2015;
- untuk meninjau pembatasan-pembatasan hukum termasuk undang-undang pencemaran nama baik yang bersifat pidana dan pembatasan lainnya pada konten dan struktur media, agar dapat mempromosikan arus bebas informasi;
- untuk mempertimbangkan kembali kasus-kasus jurnalis yang

dipenjarakan agar sesuai dengan standar-standar internasional dan hak-hak asasi manusia;

- untuk menghindari penggunaan pemaksaan ekonomi negara untuk merusak kebebasan media, kemandirian, dan keragaman;
- untuk bekerja menuju akses universal terhadap Internet dan TIK lainnya sebagai alat mewujudkan universalitas kebebasan berekspresi, dan dalam cara yang menjamin akses dan partisipasi yang setara untuk laki-laki dan perempuan;
- untuk mempromosikan keragaman dalam media, termasuk dengan menciptakan lingkungan ekonomi positif dengan insentif yang pantas, mengasuh akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam kepemilikan dan pembuatan keputusan media, dan mendukung pencakupan isu-isu kesetaraan gender sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan;
- untuk memerangi diskriminasi yang sudah bertahan lama dalam sejarah, serta prasangka-prasangka dan/atau bias-bias yang mencegah para individu dan kelompok tertentu untuk secara setara menikmati hak atas kebebasan berekspresi;
- untuk secara sistematis mengumpulkan dan membuka akses bagi publik, termasuk dengan alat-alat digital, informasi yang terkait dengan isu-isu pembangunan, sambil melindungi privasi;
- untuk mempromosikan program-program untuk kompetensi-kompetensi literasi media dan informasi di antara semua warga negara, termasuk juga anak-anak dan pemuda, sehingga mereka dipersiapkan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi, dan menciptakan serta mengekspresikan informasi dan opini mereka sendiri, termasuk semua yang terkait dengan perdebatan-perdebatan pembangunan;
- untuk membuat upaya-upaya bersama untuk menjamin bahwa mereka yang terlibat dalam produksi jurnalisme dapat bekerja tanpa rasa takut atau risiko akan diserang, dan untuk mempromosikan dan mengimplementasikan Rencana Aksi PBB mengenai Keamanan Jurnalis dan Isu Impunitas;

- untuk menciptakan lingkungan hukum dimana penyiar publik, komersial, dan komunitas diberdayakan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan informasi dan komunikasi individu-individu dan kelompok-kelompok berbeda di dalam masyarakat;
- untuk memungkinkan media milik publik menjadi secara redaksi independen, terlindungi dari campur tangan politik dan secara memadai didanai agar dapat menyediakan konten berkualitas sesuai dengan kepentingan publik;
- untuk mendukung ketentuan pelatihan dan pendidikan berkualitas untuk jurnalis dan pekerja media profesional, termasuk mengenai perdebatan pembangunan;
- untuk menempatkan dengan tepat sistem-sistem untuk mempromosikan transparansi yang besar atas kepemilikan media;
- untuk mempromosikan inklusi suatu tujuan yang mengakui pentingnya kebebasan berekspresi dan media independen dalam Agenda Pembangunan pasca tahun 2015 PBB.

SALURAN MEDIA, PEKERJA MEDIA PROFESIONAL, DAN PENGGUNA MEDIA SOSIAL

- untuk mempromosikan penghormatan atas standar-standar profesional dan beretika tertinggi dalam jurnalisme;
- untuk menyediakan masyarakat dengan informasi yang relevan dengan pembangunan;
- meningkatkan kesadaran mengenai, dan secara aktif berpartisipasi dalam, perdebatan-perdebatan mengenai isu-isu pembangunan termasuk hubungan antara kebebasan berekspresi dan pembangunan, dan menyediakan kesempatan untuk publik berpartisipasi dalam diskusi-diskusi ini;
- untuk merefleksikan keragaman pandangan sehingga dapat memuaskan hak publik atas informasi dan ide-ide yang luas;
- untuk mempromosikan kebijakan dan strategi yang peka gender untuk

mengasuh partisipasi para perempuan dan kelompok marjinal dalam semua tingkat media, termasuk sumber-sumber berita;

- untuk mengambil langkah-langkah yang konkrit dan efektif untuk menghapuskan stereotipe gender dan stereotipe lainnya, prasangka dan praktek-prakteknya, termasuk nilai-nilai tradisional atau adat atau praktek-prakteknya, yang merusak kemampuan para individu untuk menikmati hak atas kebebasan berekspresi;
- untuk memperjuangkan waktu dan sumber daya yang tepat agar dapat dialokasikan untuk pelaporan investigatif, dengan pandangan untuk menjamin bahwa jurnalisisme dapat memainkan peranannya dalam meminta pertanggungjawaban para pihak yang berkuasa, baik di sektor publik maupun di sektor swasta;
- untuk memberdayakan para produsen jurnalisisme melalui pelatihan dan dukungan untuk profesionalisme;
- untuk mendukung keamanan jurnalis, terlibat dengan Rencana PBB tentang Keamanan Jurnalis dan Isu Impunitas, dan memajukan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya.

UNESCO DAN KOMUNITAS INTERNASIONAL

- untuk mendukung inklusi dalam Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan akan kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers dan hak untuk mencari dan menerima informasi, karena hal-hal ini tidak hanya merupakan hak-hak penting tetapi juga merupakan hal-hal yang memungkinkan dalam Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan agenda pembangunan yang lebih luas;
- untuk mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kebebasan berekspresi dan media yang bebas, independen, dan majemuk, termasuk nilai-nilai media itu sebagai penopang pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan aturan hukum;
- untuk memberikan saran pada institusi media di semua sektor publik, swasta, komunitas, dan sosial sebagai landasan untuk media yang bebas, majemuk, dan independen untuk memainkan peranan penuh mereka dalam pembangunan berkelanjutan;

- untuk terus memberikan saran terhadap kesetaraan gender dalam dan melalui media dengan mengembangkan program-program dan sumber daya melalui Aliansi Global pada Media dan Gender dan untuk menjamin tindak lanjut sistematis pada area kepedulian kritis media dan gender dari Deklarasi Beijing dan Forum untuk Aksi;
- untuk terus bekerja mendukung profesionalisme jurnalistik serta literasi media dan informasi, termasuk Aliansi Global untuk Kemitraan dalam literasi media dan informasi;
- untuk mempromosikan dan memantau keamanan jurnalis dan perang melawan impunitas, dan mengembangkan implementasi Rencana Aksi PBB;
- untuk mempersiapkan perayaan pertama dari Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas untuk Kejahatan Melawan Jurnalis pada tanggal 2 November 2014, setelah acara pendeklarasian hari ini oleh Majelis Umum PBB dalam 2013;
- untuk menjamin bahwa program-program bantuan mempertimbangkan pentingnya isu-isu kebebasan berekspresi dalam semua upaya-upaya pembangunan, dan bahwa mereka mempromosikan kebebasan pers, hak untuk mencari dan menerima informasi, dan keamanan jurnalis;
- untuk menindaklanjuti pada Pedoman Bali untuk Media dan Pembangunan, dan membuat dokumen ini tersedia bagi Negara Anggota, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kelompok Kerja Terbuka, dan untuk organisasi internasional dan regional lainnya.

LAMPIRAN II

FORUM MEDIA GLOBAL

The Role of Media in Realizing the Future We Want For All (Peran Media dalam Mewujudkan Masa Depan yang Kita Inginkan untuk Semua Pihak).

25-28 AGUSTUS 2014, BALI – INDONESIA

25 – 28 AGUSTUS 2014, PUSAT KONVENSI BALI NUSA DUA (BNDCC = BALI NUSA DUA CONVENTION CENTER), BALI

PROGRAM

► 25 AGUSTUS

19.00 – 21.00

Makan Malam Penyambutan
Tempat: Taman Jepun

Pidato Penyambutan:

- Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia
- Hubert Gijzen, Direktur dan Perwakilan, Kantor Jakarta UNESCO

Acara makan malam diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia

► 26 AGUSTUS

8.00 – 9.00	Pendaftaran untuk semua peserta
9.00 – 9.20	Acara Pembukaan Tempat: Nusa Dua Hall 4 Pidato Pembukaan <ul style="list-style-type: none">• Hubert Gijzen, Direktur dan Perwakilan, Kantor Jakarta UNESCO• Arief Rachman, Kepala Eksekutif, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (TBC) Pidato Penyambutan <ul style="list-style-type: none">• Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia
9.20 – 9.25	Tarian Tradisional Bali
9.25 – 9.30	Sesi foto grup
9:30 – 11.00	Sesi pleno 1: Bagaimana Media dapat Berkontribusi dalam Pembangunan Manusia dan Sosial? Tempat: Nusa Dua Hall 4 <ul style="list-style-type: none">• Pembicara utama: Hubert Gijzen, Direktur dan Perwakilan, Kantor Jakarta UNESCO• Pembicara utama: Femi Oke, Jurnalis dan Pembaca Berita The Stream, Al Jazeera berbahasa Inggris, Britania Raya Pembicara: <ul style="list-style-type: none">• Yanuar Nugroho, Direktur dan Penasihat Khusus untuk Kepala Menteri Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP – PPP),

	<p>Republik Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gwen Lister, <i>Kepala Namibian Media Trust</i> dan Perwakilan Institut Media Afrika Selatan, Namibia • Leon Willems, <i>Kepala Global Forum for Media Development</i> (Forum Global untuk Pengembangan Media), Belanda <p>Moderator: Guy Berger, Direktur Divisi Kebebasan Berekspresi dan Pengembangan Media, UNESCO</p>	
<p>11.00 – 11.30</p>	<p>Rehat dengan makanan dan minuman</p>	
<p>11.30 - 12.30</p>	<p>Sesi paralel 1: Media Baru & Teknologi Informasi dan Komunikasi: Tantangan dan Kesempatan melalui Studi Komprehensif UNESCO mengenai Isu-Isu terkait Internet Tempat: Nusa Dua Hall 1 & 2</p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guy Berger, Direktur Divisi Kebebasan Berekspresi dan Pengembangan Media, UNESCO • Agung Hardjono, Deputi III Bidang Pemanfaatan Teknologi dan Analisa Informasi, Unit Kerja Presiden, Indonesia. Pendiri 	<p>Sesi paralel 2: Memberikan Suara kepada mereka yang tidak bersuara. Pemberdayaan kelompok-kelompok marjinal melalui Media Tempat: Nusa Dua Hall 3</p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harry Surjadi, Ahli dalam Jurnalisme dan Komunikasi Lingkungan, Indonesia • Naranjargal Khaskuu, Kepala <i>Globe International</i>, Mongolia • Ana Catalina Montenegro, Koordinator Onda-UNED, Costa Rica • Francisco da Silva

	<p>LAPOR, Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gayathry Venkiteswaran, Eksekutif Direktur <i>Southeast Asian Pers Alliance</i> (Aliansi Pers Asia Tenggara), Malaysia • Giulio Quaggiotto, Manajer UN Pulse, Jakarta Lab, Italia • Ang Peng Hwa, Direktur <i>Singapore Internet Research Centre</i> (Pusat Penelitian Internet Singapura), Singapura <p>Moderator: Moez Chakchouk, Direktur <i>Tunisian Internet Agency</i> (Agensi Internet Tunisia), Tunisia</p>	<p>Gary, Direktur <i>Timor-Leste Media Development</i> (Pengembangan Media Timor-Leste), Timor-Leste</p> <p>Moderator: Charaf Ahmimed, Spesialis Program, Kantor Jakarta UNESCO</p>
<p>12.30 – 13.30</p>	<p>Makan siang di Jimbaran Cafe</p>	
<p>13.30 - 15.00</p>	<p>Sesi pleno 2: Pemberdayaan masyarakat melalui Media (Akses terhadap informasi dan partisipasi warga negara) Tempat: Nusa Dua Hall 4</p> <p>Pembicara utama: Luis Esquivel, Program Akses terhadap Informasi, World Bank (Bank Dunia), Meksiko</p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naranjargal Khaskuu, Kepala <i>Globe International</i>, Mongolia 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Judhariksawan – Kepala Komisi Penyiaran Indonesia, Indonesia • Toby Mendel, Eksekutif Direktur <i>the Centre for Law and Democracy</i> (Pusat Hukum dan Demokrasi), Kanada <p>Moderator: Mogens Schmidt, Penasihat Media Senior untuk <i>Global Media Forum</i> (Forum Media Global), Denmark</p>	
<p>15.00 - 15.30</p>	<p>Rehat dengan makanan dan minuman</p>	
<p>15.30 - 17.00</p>	<p>Sesi Paralel 3: Partisipasi pemuda melalui media sosial Tempat: Nusa Dua Hall 1 & 2</p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ulla Carlsson, Direktur <i>The International Clearinghouse on Children, Youth, and Media</i> (Rumah Kliring Internasional untuk Anak-Anak, Pemuda, dan Media) di NORDICOM, Swedia • Moez Chakchouk, Direktur <i>Tunisian Internet Agency</i> (Agensi Internet Tunisia), Tunisia • Jeffrey K Hall, Pimpinan Lab Inovasi UNICEF 	<p>Sesi Paralel 4: Kesetaraan gender dalam dan melalui media: Suatu keharusan untuk semua tujuan pembangunan lainnya (Aliansi Global dalam Media dan Gender) Tempat: Nusa Dua Hall 3</p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rachael Nakitare, Asosiasi Perempuan Internasional dalam Radio dan Televisi, Kenya • Usha Bahsin, Penasihat Gender, Serikat Penyiaran Asia-Pasifik • Varun Jhaveri, Konsorsium Pimpinan Muda dan Pemuda, India

<p>11.30 - 12.30</p>	<p>Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maudi Ayunda, artis dan penyanyi muda Indonesia <p>Moderator: Iman Usman, Duta Pemuda Indonesia untuk ASEAN dan Pendiri Bersama Pemimpin Masa Depan Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uni Zulfiani Lubis, Kepala Editor ANTV, VIVA Group • Lisa French, Wakil Dekan, Sekolah Media jurusan Media & Komunikasi, RMIT University dan anggota Guru-Guru Media Australia, Australia <p>Moderator: Andrea Cairola, Kantor Beijing UNESCO</p>
<p>17.15 - 18.00</p>	<p>ACARA SAMPINGAN: Peluncuran Tren-Tren Dunia UNESCO Asia Pasifik dalam Kebebasan Berekspresi dan Pengembangan Media Tempat: Nusa Dua Hall 4</p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cherian George, <i>Associate Professor</i> dari Nanyang Technological University, Singapura • Ammu Joseph, jurnalis independen, India • Yuenying (Ying) Chan, Direktur Pusat Jurnalisme dan Kajian Media, University of Hong Kong, Hong Kong • Ulla Carlsson, Direktur <i>The International Clearinghouse on Children, Youth, and Media</i> (Rumah Kliring Internasional untuk Anak-Anak, Pemuda, dan Media) di NORDICOM, Swedia <p>Moderator: Guy Berger, Direktur Divisi Kebebasan Berekspresi dan Pengembangan Media, UNESCO</p>
<p>19.00</p>	<p>Makam Malam untuk Para Pembicara (hanya dengan undangan) Tempat: Hotel Courtyard Marriot</p>

► 27 AGUSTUS

9.00 - 10.30	<p>Sesi pleno 3: Bagaimana Media dapat berkontribusi untuk Perdamaian dan Dialog? Tempat: Nusa Dua Hall 4</p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none">• Endi Bayuni – <i>The Jakarta Post</i>, Indonesia• Edetaen Ojo, Eksekutif Direktur Agenda Hak-Hak Media, Nigeria• Kavi Chongkittavorn, Mantan Kepala Aliansi Pers Asia Tenggara, Thailand• Leon Willems, Kepala <i>Global Forum for Media Development</i> (Forum Global untuk Pengembangan Media), Belanda <p>Moderator: Jesper Højberg, Direktur Penunjang Media Internasional, Denmark</p>	
10.30 - 10.45	Rehat dengan makanan dan minuman	
10.45 - 12.00	<p>Sesi paralel 5: Etika dan Standar Profesional dalam Media Tempat: Nusa Dua Hall 1 & 2</p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none">• Yadi Hendriana, Ketua Asosiasi Jurnalis TV Indonesia/UTI, Indonesia• Toby Mendel, Eksekutif Direktur <i>the Centre for Law and Democracy</i> (Pusat Hukum dan	<p>Sesi paralel 6: Dalam Upaya Literasi Media dan Informasi untuk Semua Pihak (Aliansi Global untuk Kemitraan dalam Literasi Media dan Informasi) Tempat: Nusa Dua Hall 3</p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ulla Carlsson, Direktur <i>The International Clearinghouse on Children, Youth, and Media</i> (Rumah

	<p>Demokrasi), Kanada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kavi Chongkittavorn, Mantan Kepala Aliansi Pers Asia Tenggara, Thailand • Aidan White, Direktur, Jaringan Jurnalisme Beretika, Britania Raya <p>Moderator: Chelsia Chan, Kelompok Kerja untuk Peraturan dan Perundang-undangan Dewan Pers Indonesia, Indonesia</p>	<p>Kliring Internasional untuk Anak-Anak, Pemuda, dan Media) di NORDICOM, Swedia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kyoko Murakami, Pusat Literasi Media & Informasi Asia-Pasifik, Japan • Adama Lee, Proyek Media Pemuda Gambia, Gambia <p>Moderator: Alton Grizzle, Spesialis Program, UNESCO</p>
<p>12.00 - 13.00</p>	<p>Makan siang di Jimbaran Cafe</p>	
<p>13.00 - 14.15</p>	<p>Sesi pleno 4: Bagaimana Media dapat memfasilitasi Pemerintahan yang Baik dan Efektif? Tempat: Nusa Dua Hall 4</p> <p>Pembicara Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maria Ressa, CEO dan Eksekutif Direktur Rappler.com, Filipina <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ye Min Oo, Sekretaris Asosiasi Jurnalis Myanmar dan anggota Dewan Pers Myanmar, Myanmar • Stefan Hall, Senior Associate, Dewan Agenda Global pada Forum Ekonomi Dunia, Britania Raya <p>Moderator: Kavi Chongkittavorn, Mantan Kepala Aliansi Pers Asia Tenggara, Thailand</p>	

14.15 - 15.30	<p>Sesi Paralel 7: Aturan Hukum dan Keamanan Jurnalis Tempat: Nusa Dua Hall 1 & 2</p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none">• Yosep Adi Prasetyo – Dewan Pers Indonesia, Indonesia• Jesper Højberg, Direktur Penunjang Media Internasional, Denmark• Prima Jesusa B. Quinsayas, Filipina• Gayathry Venkiteswaran, Eksekutif Direktur <i>Southeast Asian Pers Alliance</i> (Aliansi Pers Asia Tenggara), Malaysia <p>Moderator: Guy Berger, Direktur Divisi Kebebasan Berekspresi dan Pengembangan Media, UNESCO</p>	<p>Sesi Paralel 8: Jurnalisme investigatif di dalam/ dan memerangi korupsi Tempat: Nusa Dua Hall 3</p> <p>Pembicara:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gwen Lister, Kepala <i>Namibian Media Trust</i> dan Perwakilan Institut Media Afrika Selatan, Namibia• Bambang Harymurti, CEO dan Kepala Editor Tempo Indonesia, Indonesia• Yuenying (Ying) Chan, Direktur Pusat Jurnalisme dan Kajian Media, University of Hong Kong, Hong Kong• Edetaen Ojo, Eksekutif Direktur Agenda Hak-Hak Media, Nigeria <p>Moderator: Maria Ressa, CEO dan Eksekutif Direktur Rappler.com, Filipina</p>
15.30 - 16.00	Rehat dengan makanan dan minuman	
16.00 - 17.30	Sesi Khusus: Menilai Keadaan Media di Indonesia: Tantangan dan Dampak Positif	

	<p>Tempat: Nusa Dua Hall 4</p> <ul style="list-style-type: none">• Perwakilan dari LSM Media• Aditya Wardhana – Bloomberg Indonesia• Freddy Tulung, Direktur Jenderal Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Indonesia• Bagir Manan, Presiden Dewan Pers Indonesia, Indonesia <p>Moderator: Endi Bayuni – <i>The Jakarta Post</i>, Indonesia</p>
19.00	<p>Makam Malam untuk Para Pembicara (hanya dengan undangan) Tempat: Hotel Courtyard Marriot</p>

► 28 AGUSTUS

8.45 – 9.30	<p>Sesi Akhir 5: Presentasi <i>The Bali Road Map (Pedoman Bali)</i> untuk Media dan Pembangunan Tempat: Nusa Dua Hall 4</p> <p>Guy Berger, Direktur Divisi Kebebasan Berekspresi dan Pengembangan Media, UNESCO</p>
9.30 - 10.00	<p>Partisipasi Pemuda dan Warga Negara Asia – Pasifik melalui Media</p> <p>Presentasi khusus oleh para peserta Pelatihan Pemuda ASPAC tentang Media dan Partisipasi Warga Negara</p>
10.00 - 10.30	<p>SESI PENUTUP Tempat: Nusa Dua Hall 4</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Muhammad Nuh, Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia• Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia• Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Perwakilan Tingkat Tinggi untuk <i>the Alliance of Civilizations</i> (Aliansi Peradaban)• Irina Bokova, Direktur Jenderal UNESCO
10:30 – 11:30	Rehat dengan makanan dan minuman
	AKHIR DARI FORUM



UNESCO Office Jakarta

Regional Bureau for Sciences in Asia and the Pacific and Cluster Office to Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Timor Leste.

Jalan Galuh II no 5, Kebayoran Baru,
Jakarta, Indonesia, 12110

Mail: jakarta@unesco.org
Tel: +62-21 739 9818
Fax: +62-21 7279 6489